



**PEMERINTAH**  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021

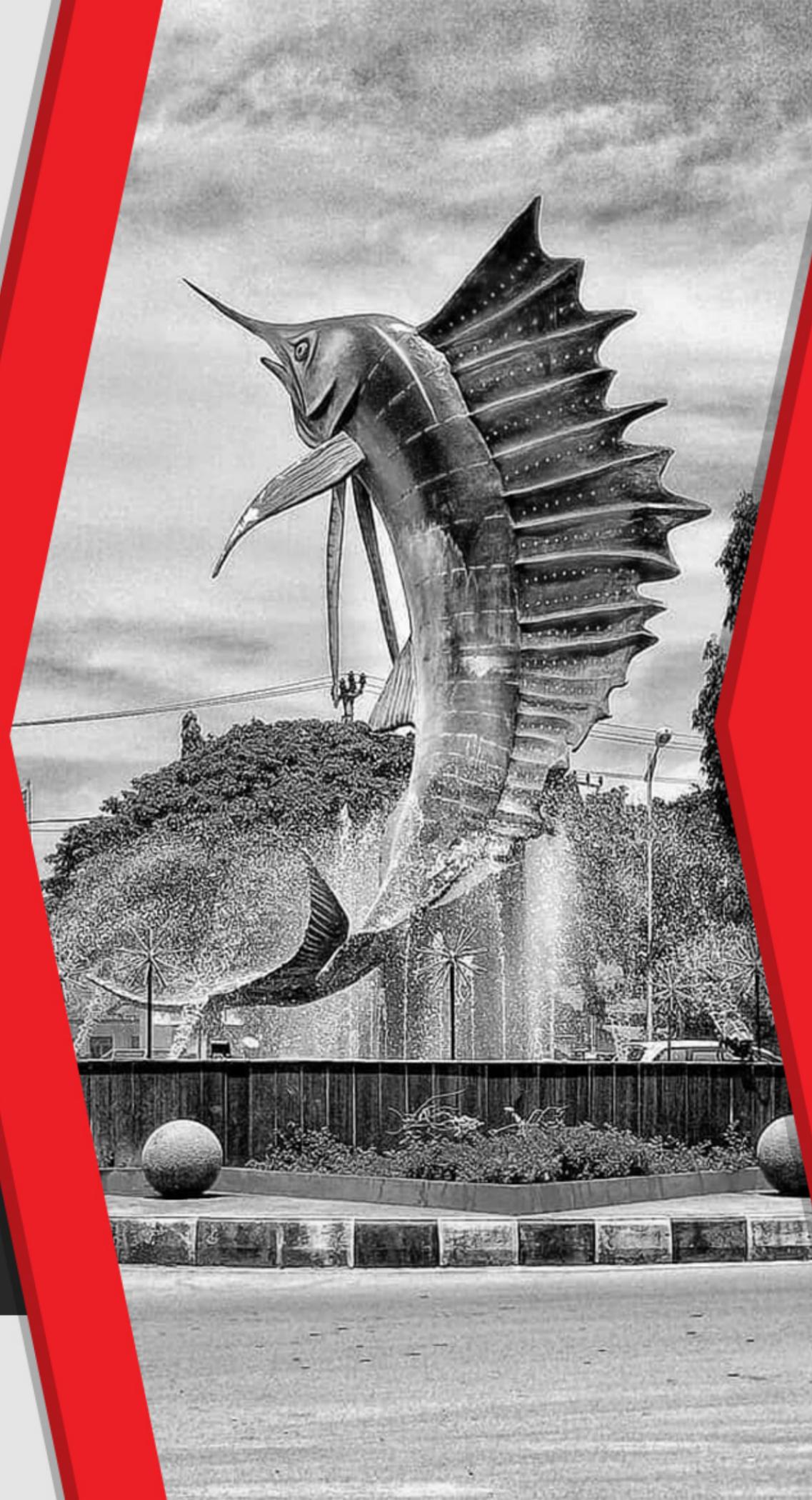
---

**LAPORAN**  
**KINERJA INTANSI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2020**

**LKIP**

 Bappeda Kabupaten Pangandaran  pangandaranbappeda  bappeda pangandaran

 perencanaanbappedapnd@gmail.com  <https://bappeda.pangandarankab.go.id/>



## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pangandaran, Maret 2021

**BUPATI PANGANDARAN,**

**H. JEJE WIRADINATA**

## Ikhtisar Eksekutif

Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Pada tahun 2020 Kabupaten Pangandaran memasuki usia yang ke-8. Namun Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertekad untuk mensejajarkan diri dengan kabupaten/kota lain yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Kesatu	1	3	10	BS = 3, B = 2, C = 1, K = 1
2.	Kedua	1	2	2	BS = 2, B = 0, C = 0, K = 0
3.	Ketiga	3	3	7	BS = 3, B = 2, C = 1, K = 0
4.	Keempat	1	3	4	BS = 2, B = 2, C = 0, K = 0
5.	Kelima	5	5	6	BS = 3, B = 2, C = 0, K = 1
6.	Keenam	1	3	8	BS = 3, B = 1, C = 0, K = 3
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>BS = 16, B = 9, C = 2, K = 5</b>

**Keterangan : 4 indikator kinerja belum ada data dan 1 indikator kinerja belum ada target**

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, diketahui bahwa 16 indikator sasaran atau 50% bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 28,14% bermakna Baik, 2 indikator sasaran bermakna Cukup atau 3,13%, dan 5 indikator sasaran bermakna Kurang atau 15,63%, 4 indikator belum ada data dan 1 belum memiliki target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 76,16% atau kategori baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 bermakna Baik.

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran berada pada angka 76,16% sementara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 76,68% sehingga terdapat ketidakefisienan sebesar 0,52%. Secara umum Kabupaten Pangandaran belum dapat dikatakan efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan terjadinya wabah Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Misi	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Rata-rata Capaian Anggaran (%)	Keterangan
1.	Kesatu	98,79	1.859.483.160,00	30.146.943.128,00	89,35	Efektif
2.	Kedua	110,41	4.314.547.967,00	4.036.998.422,00	93,57	Efektif
3.	Ketiga	105,46	99.006.218.874,00	81.534.269.378,00	86,75	Efektif
4.	Keempat	119,02	27.007.318.402,00	25.582.993.169,00	94,73	Efektif
5.	Kelima	- 22,97	469.267.317.750,00	409.680.654.811,00	87,30	Belum Efektif
6.	Keenam	79,08	23.884.224.613,00	19.039.992.224,00	94,36	Belum Efektif
Rata-rata Capaian		76,16	1.065.943.785.505,00	817.376.695.246,00	76,68	Belum Efektif

Meskipun secara rata-rata berada pada kategori **Baik**, namun masih perlu upaya-upaya untuk meningkatkan capaian 6 (enam) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu :

1. Indeks Profesionalisme ASN, dengan cara :

- Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kompensasi terhadap pegawai melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Adanya Komitmen dari seluruh ASN untuk memiliki kinerja dan disiplin yang baik sehingga capaian indeks profesionalitas ASN khususnya komponen kinerja dan disiplin dapat memenuhi target.
- Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2020;
- Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap;
- Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan cara

- Pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan air limbah cair;
- Dilaksanakan penanaman lahan kritis terutama di wilayah hulu sungai;
- Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir sungai, mengadakan program pengelolaan sampah di sumber sampah dan mengadakan pembangunan TPST 3 R di tiap Desa.

3. Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik, dengan cara :

- Merubah dan menyesuaikan dengan data dasar terbaru sebagaimana dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi;
- Merubah dan menyesuaikan kembali perencanaan rehabilitasi jaringan pada Jaringan Irigasi Teknis sesuai data terbaru.

4. Indeks Risiko Sanitasi, dengan cara :

- Penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh dan sanitasi) yaitu pembangunan RUTILAHU yang dilengkapi dengan akses rumah tangga bersanitasi.
- Meningkatkan peran masyarakat yang ikut aktif dalam pemanfaatan limbah organik untuk mengurangi pencemaran lingkungan setempat.
- Penambahan anggaran untuk pembuatan drainase guna mengurangi risiko genangan air

5. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan cara :

- Menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang agar pencari kerja dapat tertampung;
- Mengefektifkan program padat karya tunai di desa-desa di wilayah Kabupaten Pangandaran yang dibiayai dari anggaran Dana Desa agar mampu mengurangi angka pengangguran terbuka.

6. Jumlah kunjungan wisata, dengan cara :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dengan cara menciptakan dan meningkatkan kualitas produk, pelayanan kepariwisataan, kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (pilihan dan sistem transportasi) dan pembangunan sarana dan prasarana;
- Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- Menciptakan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan PAD dan ekonomi masyarakat;
- Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan sehingga kemungkinan besar wisatawan akan berkunjung kembali dan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.
- Mengembangkan penyelenggaraan event-event yang dapat menarik wisatawan untuk datang dengan berbagai strategi .
- Mengembangkan sistem informasi terpadu agar memudahkan dalam mengakses informasi seputar kepariwisataan Pangandaran sehingga sehingga dapat menangkal isu-isu negative dan informasi yang tidak benar (berita *hoax*)

Meskipun secara umum berada pada kategori Baik, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ihtisar Eksekutif	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran .....	1
1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	1
1.2.2 Perkembangan penduduk .....	2
1.2.2 Potensi Pengembangan Sektor Pariwisata .....	2
1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	2
1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	2
1.3.2 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	3
1.4 Isu-Isu Strategis .....	3
Bab II Perencanaan Kinerja .....	5
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	7
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran .....	8
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	35
3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	35
3.3.2 Efektivitas dan Efisiensi Keuangan .....	38
Bab IV Penutup .....	43
Lampiran .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .....	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.....	2
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	6
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....	7
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran .....	7
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	7
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel .....	8
Tabel 3.5	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP Pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran .....	9
Tabel 3.6	Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat .....	9
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain .....	9
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi SPIP Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar .....	10
Tabel 3.9	Kondisi Kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Hasil Penilaian Mandiri .....	10
Tabel 3.10	Perbandingan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar .....	10
Tabel 3.11	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran .....	11
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja AKIP dengan Tahun Lalu .....	11
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.....	11
Tabel 3.14	Hasil Capaian Kinerja AKIP Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 .....	12
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Dengan Tahun Lalu .....	12
Tabel 3.16	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	13
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Dengan Tahun Lalu .....	14
Tabel 3.18	Pengukuran Indeks SPBE .....	14
Tabel 3.19	Pembagian Bobot Penilaian Indeks SPBE .....	14
Tabel 3.20	Level Nilai Indikator Indeks SPBE .....	15
Tabel 3.21	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.....	15
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah dengan Tahun Lalu .....	15
Tabel 3.23	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan.....	16
Tabel 3.24	Perbandingan Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.....	16

Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.....	16	Tabel 3.58 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi .....	24
Tabel 3.26 Analisis Pencapaian kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah .....	16	Tabel 3.59 Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya .....	25
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Ketaatan Terhadap RTRW Dengan Tahun Lalu.....	17	Tabel 3.60 Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran dan Komponennya Tahun 2018-2020 .....	25
Tabel 3.28 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	17	Tabel 3.61 Perbandingan LPP dengan tahun 2019 .....	26
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Tahun Lalu .....	17	Tabel 3.62 Perbandingan LPP dengan Target Akhir RPJMD .....	26
Tabel 3.30 Pemantauan dilakukan pada 24 Titik Sampel .....	17	Tabel 3.63 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Gender .....	26
Tabel 3.31 Indeks Kualitas Air .....	18	Tabel 3.64 Akseptor KB.....	26
Tabel 3.32 Group Titing Sampling I .....	18	Tabel 3.65 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	26
Tabel 3.33 Group Titing Sampling II .....	18	Tabel 3.66 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat , 2016 – 2018 ....	27
Tabel 3.34 Hasil metode passive sampler .....	18	Tabel 3.67 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga .....	27
Tabel 3.35 Tabel Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) .....	18	Tabel 3.68 Jumlah Penduduk Menurut Usia Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	27
Tabel 3.36 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualias.....	18	Tabel 3.69 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia .....	27
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Persentase jalan dalam kondisi mantap Dengan Tahun Lalu .....	19	Tabel 3.70 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia .....	28
Tabel 3.38 Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas .....	19	Tabel 3.71 Data Pemuda yang Aktif Berorganisasi .....	28
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tahun Lalu .....	19	Tabel 3.72 Indeks Pembangunan Kepemudaan 2020 .....	28
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik Dengan Tahun Lalu ...	20	Tabel 3.73 Indeks Pembangunan Kepemudaan 2019.....	28
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Dengan Tahun Lalu .....	20	Tabel 3.74 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Periode akhir RPJMD .....	28
Tabel 3.42 Nilai IRS-Input Instrument BPS.....	20	Tabel 3.75 Pemuda yang Aktif Berolahraga .....	29
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Indeks Resiko Sanitasi Dengan Tahun Lalu.....	21	Tabel 3.76 Capain Kinerja Tahun 2019.....	29
Tabel 3.44 Capaian Indeks Risiko Bencana .....	21	Tabel 3.77 Capain Kinerja Tahun 2019.....	29
Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Dengan Tahun Lalu .....	21	Tabel 3.78 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD .....	30
Tabel 3.46 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	21	Tabel 3.79 Persentase Penurunan angka Kemiskinan .....	30
Tabel 3.47 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan.....	22	Tabel 3.80 Data Kemiskinan Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2018.....	30
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dan Prasarana Pusat Pemerintahan Dengan Tahun Lalu.....	22	Tabel 3.81 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Menurunnya kesenjangan antar wilayah .....	30
Tabel 3.49 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	22	Tabel 3.82 Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2015-2018.....	30
Tabel 3.50 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	22	Tabel 3.83 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu .....	31
Tabel 3.51 Anggaran Pendukung Strategis 2 .....	23	Tabel 3.84 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Angkatan Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020 .....	31
Tabel 3.52 Rekap Data Nilai Sikap Peserta Didik.....	24	Tabel 3.85 PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah) .....	32
Tabel 3.53 Capain Kinerja Tahun 2019 .....	24	Tabel 3.86 PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah).....	32
Tabel 3.54 Capain Kinerja Tahun 2020 .....	24	Tabel 3.87 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Parietas Daya Beli (PPP) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020.....	32
Tabel 3.55 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJM.....	24	Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM Dengan Tahun Lalu.....	32
Tabel 3.56 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kesatuan Bangsa.....	24		
Tabel 3.57 Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya .....	24		

Tabel 3.89 Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi .....	32	Tabel 3.118 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-2 RPJMD Tahun 2020.....	39
Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi Jumlah Koperasi Sehat Dengan Tahun Lalu.....	32	Tabel 3.119 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-3 RPJMD Tahun 2020.....	39
Tabel 3.91 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan .....	33	Tabel 3.120 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-4 RPJMD Tahun 2020.....	40
Tabel 3.92 Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan.....	33	Tabel 3.121 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-5 RPJMD Tahun 2020.....	40
Tabel 3.93 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2015 s.d 2020.....	33	Tabel 3.122 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-6 RPJMD Tahun 2020.....	41
Tabel 3.94 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020.....	33	Tabel 3.123 Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD .....	42
Tabel 3.95 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020.....	34	Tabel 4.1 Analisis Efektifitas dan Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	43
Tabel 3.96 Target dan Realisasi Retribusi Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020.....	34	Tabel 4.2 Analisis Efektifitas dan Efisiensi per Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....	44
Tabel 3.97 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	34		
Tabel 3.98 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....	34		
Tabel 3.99 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 5 .....	35		
Tabel 3.100 Kegiatan Pendukung Sasaran .....	35		
Tabel 3.101 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020.....	36		
Tabel 3.102 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	37		
Tabel 3.103 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi.....	37		
Tabel 3.104 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020.....	37		
Tabel 3.105 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 .....	37		
Tabel 3.106 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 .....	37		
Tabel 3.107 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA. 2020 .....	37		
Tabel 3.108 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Tahun Anggaran 2020.....	37		
Tabel 3.109 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2020 .....	37		
Tabel 3.110 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.111 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.112 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.113 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.114 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020.....	38		
Tabel 3.115 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.116 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	38		
Tabel 3.117 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-1 RPJMD Tahun 2020.....	39		



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat ..... 1

Gambar 1.2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran..... 2

Gambar 1.3 Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan WisataPangandaran ..... 2

Gambar 3.1 Capaian Nilai AKIP ..... 12

Gambar 3.2 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat daerah  
Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ..... 16

Gambar 3.3 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ..... 21

Gambar 3.4 Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat  
Tahun 2019 ..... 33





# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan kuantabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Guna melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

### 1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan luas wilayah kurang lebih 1.010,92 km<sup>2</sup> terdiri atas 10 kecamatan dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel.

Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan, 93 desa, 430 dusun, 915 Rukun Warga dan 3.188 Rukun Tetangga. Kecamatan Padaherang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak namun jumlah desa terbanyak ada di

Tabel 1.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Parigi	98,04	10	53	122	399
2	Cijulang	93,16	7	38	90	253
3	Cimerak	118,18	11	51	99	357
4	Cigugur	97,29	7	39	64	200
5	Langkaplancar	177,19	15	66	115	413
6	Mangunjaya	32,78	5	28	47	233
7	Padaherang	118,87	14	60	142	442
8	Kalipucang	136,78	9	29	80	290
9	Pangandaran	60,77	8	33	89	343
10	Sidamulih	77,98	7	33	67	258
	<b>Jumlah</b>	<b>1.011,04</b>	<b>93</b>	<b>430</b>	<b>915</b>	<b>3.188</b>

Sumber: Dinas Sosial dan PMD Kab. Pangandaran, 2019

kecamatan Langkaplancar. Kecamatan Cimerak terdiri dari 11 desa, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 desa, Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 15 desa, Kecamatan Parigi terdiri 10 desa, Kecamatan Sidamulih terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 desa, Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 desa, Kecamatan Padaherang terdiri dari 14 desa dan Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 5 desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari,

Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.

Gambar 1.1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat



Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya



penurunan sebesar 0,22 persen, dari capaian IPM tahun 2019, hal ini menunjukkan penurunan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran mengalami sedikit penurunan. Namun demikian di usia Kabupaten Pangandaran yang baru 8 (delapan) tahun sejak dimekarkan dari kabupaten induknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terus berupaya membuat program pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

### 1.3.2 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran mengenai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari nilai dan kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam PDRB tahun 2012-2015 beserta proyeksinya hingga tahun 2021 berdasarkan harga konstan. Secara umum, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kab. Pangandaran pada periode 2012-2014. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami penurunan dan akhirnya pada tahun 2015, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan lagi sektor yang memiliki kontribusi terbesar karena kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berhasil melampaui kontribusi sektor tersebut dengan kontribusi sebesar 24,28%. Sektor lain yang memiliki kontribusi yang cukup potensial ialah sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, industri pengolahan, jasa pendidikan dan jasa lainnya dengan masing-masing kontribusi sebesar 10,72%; 8,98%; 7,97%; 5,70%; 5,07% dan 2,92%.

Hasil proyeksi kontribusi untuk masing-masing sektor pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perubahan secara struktural dari perekonomian Kabupaten Pangandaran terus terjadi. Perubahan struktural perekonomian yang dimaksud merupakan perubahan dari struktur perekonomian yang lebih menitikberatkan pada sumber daya alam (seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) menjadi struktur perekonomian

yang lebih menitikberatkan pada industri terutama industri jasa yang dapat terkait dengan pariwisata. Sebagai contoh, kontribusi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan minuman, dan jasa lainnya mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Pangandaran. Kontribusi ke-4 sektor tersebut jika dijumlahkan mencapai hingga 46,41% pada proyeksi tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,92% jika dibandingkan pada tahun 2015.

Kemudian untuk proyeksi tahun 2021, kontribusi industri pengolahan dan industri-industri yang dapat berkaitan dengan pariwisata memiliki kontribusi yang dominan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktural dalam perekonomian pangandaran ke arah sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah dan jasa terutama yang dapat berkaitan dengan pariwisata. Sebagai contoh, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan dari sekitar 23,13% pada tahun 2015 menjadi sekitar 16,74% pada tahun 2021. Sektor Kontribusi dari masing-masing sektor tersebut sangat dipengaruhi juga oleh inflasi di sektor tersebut. Semakin besar inflasi, kontribusi sektor tersebut akan semakin kecil, *ceteris paribus*.

## 1.4 Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016–2021 menghadapi beberapa permasalahan baik yang terkait dengan masalah sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan pemerintahan secara umum. Berdasarkan hasil analisis serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Pangandaran 2016-2021, sebagai berikut :

### 1) **Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di Kabupaten Pangandaran**

Berbagai permasalahan tentang penegakan sistem birokrasi masih belum ideal, adanya kesenjangan antara aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan. Sehingga dengan itu semua maka roda pemerintahan menjadi sedikit terhambat untuk dapat menyesuaikan dengan Kabupaten lainnya.

### 2) **Masih lemahnya penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata**

Pembangunan pariwisata tidak berarti hanya membangun daerah tujuan wisata (DTW) dari sisi fisik saja, akan tetapi juga membangun bidang sosial dan ekonomi juga. Aktivitas pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan tidak hanya kelayakan dari aspek ekonomi, akan tetapi bagaimana agar aktivitas pariwisata tersebut dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat – karena masyarakat mendapatkan insentif dari keberadaan lokasi pariwisata tersebut – dan juga tidak merusak lingkungan. Survey Ripparda tahun 2015 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa lokasi pariwisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, cenderung akan meningkatkan aktivitas ekonomi informal di DTW tersebut, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengurangi daya tarik wisata melalui penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu penanganan limbah akibat aktivitas wisata diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan wisatawan.

### 3) **Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan**

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Hingga saat ini masih banyak pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang belum disesuaikan dengan peruntukan tata ruang. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan kedepan harus mempertimbangan aspek tata ruang dan juga aspek daya tampung dan daya dukung lingkungan.

### 4) **Kurangnya Infrastruktur pengembangan wilayah**

Kemajuan suatu wilayah sangat bergantung kepada ketersediaan dari infrastruktur yang ada di wilayahnya. Laporan PBB dalam World Development Report (WDR) tahun 1994 menggambarkan pentingnya infrastruktur – yang disebut sebagai *social overhead capital* – dalam peningkatan pembangunan. Infrastruktur bisa dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Yang dimaksud dengan infrastruktur pengembangan wilayah lebih memfokuskan pada infrastruktur ekonomi, yang terdiri atas; (1) utilitas publik seperti telekomunikasi, sistem air perpipaan, saluran air/drainase; (2) jaringan jalan; dan (3) prasarana transportasi lainnya seperti jalur kereta api, bandara dan pelabuhan.

Hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan kemajuan pembangunan sangat erat. Teori *Infrastructure Led Growth* menyatakan bahwa daerah-daerah dengan kelengkapan infrastruktur yang lebih baik akan bisa menikmati keberhasilan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang memiliki infrastruktur ekonomi. Minimnya ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan produktivitas modal menjadi rendah sehingga dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menciptakan *output* pembangunan dalam jumlah tertentu. Rendahnya produktivitas modal ditandai dengan nilai ICOR (*incremental capital output ratio*) yang tinggi, angka ini biasa ditemui pada daerah-daerah yang sedang berkembang.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih relatif terbatas. Prasarana jalan, listrik, air bersih sistem perpipaan dan saluran drainase masih belum tersebar merata di seluruh wilayah. Sehingga potensi ekonomi yang besar belum dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

### 5) **Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata**

Pengembangan pariwisata membutuhkan konektivitas yang baik antar satu daerah tujuan wisata dengan yang lainnya. Oleh sebab itu peningkatan aksesibilitas antar daerah tujuan wisata menjadi prasyarat penting pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Hingga saat ini akses pariwisata ke lokasi-lokasi tujuan wisata di pangandaran hanya terfokus pada

aksesibilitas darat saja – yaitu jalan raya. Untuk pengembangan pariwisata ke depan Kabupaten Pangandaran membutuhkan aksesibilitas lain, seperti bandara, jalur rel kereta api, jalan tol dan pelabuhan. Oleh sebab itu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata bertaraf internasional.

**6) Belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata**

Adanya kolaborasi pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat di masyarakat. Tarian ronggeng ataupun jenis kesenian lain dapat dijadikan motor penggerak promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran. selain itu, pengembangan desa-desa wisata bisa menjadi jalan lain dari terjadinya kolaborasi kesenian daerah dengan industri pariwisata.

**7) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia**

Beberapa kendala dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti diantaranya adalah hambatan kelembagaan, sikap dan sumber daya. Hambatan kelembagaan dimaksudkan adalah dominasi pendekatan *top-down* yang mekanistik membuat pengembangan partisipatif sulit untuk dilakukan, meskipun pendekatan dengan konsep yang berpusat pada manusia dan bersifat partisipatif sudah mulai mendapat perhatian. Kendala sikap dimaksudkan masih belum kuatnya struktur hirarkis Pemerintah dan masih terdapat sikap-sikap Pegawai Negeri cenderung dilayani ketimbang melayani masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah disatu sisi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah di sisi lain juga merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pangandaran sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM masih sangat rendah. Rendahnya kualitas SDM berkorelasi juga dengan masih rendahnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tersebut, seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.

**8) Belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.**

Salah satu keunggulan Kabupaten Pangandaran adalah bervariasinya jenis potensi wisata yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran. Aktivitas Pariwisata yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar. Selain itu, memadukan sektor pariwisata sebagai unggulan utama dengan didukung oleh sektor ekonomi lainnya akan menambah kuat dan tangguhnya sektor perekonomian Kabupaten Pangandaran.



**Rencana Penataan Kawasan Wisata Pantai Batuhiu**



**Rencana Penataan Kawasan Wisata Pantai Batukaras**





## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Tahun 2020 merupakan tahun ke-Empat pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pangandaran yang berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016 - 2021 sebagaimana ditetapkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pangandaran

Visi Pembangunan Kabupaten Pangandaran untuk periode 2016 - 2021 merupakan perspektif dari cita dan citra yang tidak lepas dari kerangka Pembangunan Jangka Panjang sebagai manifestasi dari pembangunan berkelanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran dirumuskan sebagai berikut :

Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data dan analisa secara teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam 6 (enam) **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

### “KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- “Kabupaten Pangandaran”** : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.
- “Tujuan Wisata”** : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing.
- “Berkelas Dunia”** : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).



Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta perjanjian kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;

**Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Awal 2016	Target 2020	Target 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani</b>							
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Target kinerja = Indeks 60	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WDP	WTP	WTP
			Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)	Skor	n.a	3	3
			Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)	Skor	n.a	3	3
			Nilai AKIP	Nilai	C	B	BB
			Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	Persen	n.a	91	92
		2. Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	n.a	65	70
			Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	Indeks	n.a	2,25	3
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	n.a	55	60
		3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas		Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)	Persen	n.a	50
Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat			n.a	Baik	Sangat Baik	
<b>Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b>							
Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	Ketaatan terhadap RTRW Target kinerja : 40% Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target kinerja : Indeks 63,36	1. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	persen	n.a	30	40
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n.a	62,91	63,36
<b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>							
1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap = 95%	1. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	n.a	75	85
			Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Kendaraan/ Thn	n.a	0,031	0,029
			Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	n.a	65	70
			Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	n.a	65	75
			Persentase Rumah Tangga bersanitasi	Persen	n.a	55	79
2. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Indeks Risiko Bencana (Target kinerja = Indeks 140)	2. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	n.a	145	140
3. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi (Target kinerja = 80)	3. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	n.a	22	80
<b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>							
Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Target kinerja = 8	1. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	n.a	70	80
		2. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	n.a	85	90
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	n.a	10	8
<b>Misi 5 : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>							
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target kinerja = indeks 67,42	1. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,42	67,12	67,42
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Target kinerja = 0,57%	2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	n.a	0,57	0,57
3. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Target kinerja = indeks 66,55	3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	n.a	66,55	66,55
4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan Target kinerja = indeks 85	4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	n.a	0,26	0,27
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	n.a	0,80	0,85
5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penurunan angka miskin Target kinerja = 0,75%	5. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	7,77	0,25	0,25
<b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Persentase pertumbuhan PDRB Target kinerja = 11	1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini	Indeks	n.a	0,320	0,309
		2. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	n.a	3,23	3,22
		3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	n.a	10	11
			Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	n.a	89	90
			Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah	n.a	2	2
			Pola Pangan Harapan	Poin	82	94	97
			Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	n.a	5,5 Juta	6 Juta
Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC)	Jumlah	n.a	0	1			



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pangandaran selaku pengemban amanah masyarakat Pangandaran melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Untuk mempermudah dalam interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran melalui pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, terdapat 12 (dua belas) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut :

- Misi Kesatu terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja;
- Misi Kedua terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;
- Misi Ketiga terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja;

- Misi Keempat terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Misi Kelima terdapat 5 tujuan, 5 sasaran dan 6 indikator kinerja;
- Misi Keenam terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 8 indikator kinerja.

**Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran**

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Kesatu	1	3	10	BS = 3, B = 2, C = 1, K = 1
2.	Kedua	1	2	2	BS = 2, B = 0, C = 0, K = 0
3.	Ketiga	3	3	7	BS = 3, B = 2, C = 1, K = 0
4.	Keempat	1	3	4	BS = 2, B = 2, C = 0, K = 0
5.	Kelima	5	5	6	BS = 3, B = 2, C = 0, K = 1
6.	Keenam	1	3	8	BS = 3, B = 1, C = 0, K = 3
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>BS = 16, B = 9, C = 2, K = 5</b>

Keterangan : 4 indikator kinerja belum ada data dan 1 indikator kinerja belum ada target

Dari 19 (sembilan belas) sasaran dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja sasaran dapat diuraikan berdasarkan hasil pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran seperti pada tabel Tabel 3.3. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) indikator sasaran, diketahui bahwa **16 indikator sasaran** atau 50% bermakna **Baik Sekali**, **9 indikator sasaran** atau 28,14% bermakna **Baik**, **2 indikator sasaran** bermakna **Cukup** atau 3,13%, dan **5 indikator sasaran bermakna Kurang** atau 15,63%, **4 indikator belum ada data** dan **1 belum memiliki target**. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 76,16% atau kategori **baik**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 bermakna **Baik**.

**Tabel 3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
<b>Misi Kesatu ( 10 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	5	55,56
2	Baik	4	44,44
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100,00</b>
<b>Keterangan : 1 Indikator kinerja belum tersedia data</b>			
<b>Misi Kedua ( 2 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	2	100,00
2	Baik	0	00,00
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>100,00</b>
<b>Misi Ketiga ( 7 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	3	50,00
2	Baik	2	33,33
3	Cukup	1	16,67
4	Kurang	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100,00</b>
<b>Keterangan 1 indikator belum ada data</b>			
<b>Misi Keempat ( 4 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	2	50,00
2	Baik	2	50,00
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100,00</b>
<b>Misi Kelima ( 6 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	3	50,00
2	Baik	2	33,33
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	1	16,67
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100,00</b>
<b>Misi Keenam ( 8 Indikator Sasaran )</b>			
1	Baik Sekali	3	42,85
2	Baik	1	14,30
3	Cukup	0	0,00
4	Kurang	3	42,85
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100,00</b>
<b>Keterangan : 1 indikator belum ada target pada tahun 2020</b>			

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sesuai dengan misi yang tertuang dalam indikator kinerja pembangunan daerah.

#### Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih, dan Melayani

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

##### 1. Opini BPK terhadap LKPD

**Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
1 Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	NA	
2 Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	3	2	66,67
3 Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	3	3	100,00
4 Nilai AKIP	Nilai	B	NA	
5 Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	Persen	88,00	97,30	100,85
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>91,88</b>

Tabel 3.4 di atas menggambarkan bahwa sasaran **Birokrasi yang bersih dan akuntabel** memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan rincian: 3 (tiga) indikator mencapai target, 1 (satu) indikator sasaran belum mencapai target, dan 2 (dua) indikator sasaran belum tersedia data. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 91,88% atau dikategorikan baik.

Perlu disampaikan bahwa sampai saat ini pemeriksaan BPK masih berlangsung. Maka untuk analisis pencapaian IKU 2.1 tahun 2020 belum bisa dilaksanakan. Namun bila melihat pencapaian hasil tahun 2019, opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah mendapatkan Nilai WTP, dengan indikator capaiannya baik yaitu "kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan

memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK terhadap LKPD mencapai target dipengaruhi oleh beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya :

- Langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan WTP ini adalah dengan membuat terobosan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu dengan membangun sistem informasi berbasis elektronik diantaranya adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang memudahkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi.
- Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis), yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 yang merupakan dokumen Kebijakan Akuntansi yang wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana Termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah disusun berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali Laporan Keuangan. Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan dengan baik dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
- Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi telah disesuaikan dengan ketentuan dari Pusat dan Provinsi.
- Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.  
Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari hambatan dan kendala, namun dapat diantisipasi dengan beberapa langkah yang dilakukan dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan dapat diminimalisir.
  - Melakukan pengkajian mendalam terhadap

penyebab pengadaan barang/jasa yang gagal lelang sehingga ditemukan solusi-solusi guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.

- Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi, pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.  
Dalam pencapaian target pendapatan ada hambatan dan kendala yaitu :
  - Arah kebijakan pembangunan fisik Tahun 2020 yang hanya melakukan pembangunan jalan dengan konstruksi hotmix dan rigid/beton saja, sehingga alat berat yang ada tidak optimal digunakan yang menyebabkan retribusi alat berat tidak tercapai.
  - Masih banyaknya perusahaan pemilik reklame yang sampai saat ini masih belum mengurus/menempuh perizinannya.
  - Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.
  - Sanksi hukum terhadap obyek pajak daerah belum dikenakan secara benar.
  - Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD
  - Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan belum maksimal.
  - Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
  - Kurangnya pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru

Berdasarkan table 3.5, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah 4 (empat) kali berturut-turut mendapatkan penilaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, yakni pada Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Namun demikian, predikat ini bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Akan tetapi WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

## 2. Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)

Target tingkat Kapabilitas APIP pada tahun 2020 adalah 3. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten Pangandaran sesuai surat dari Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor LQAPIP-1073/PW10/6/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 2 Inspektorat Kabupaten Pangandaran menunjukkan Kabupaten Pangandaran telah mencapai Kapabilitas APIP Level 2, sehingga capaian untuk indikator ini sampai dengan Tahun 2020 adalah 66,67%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu menunjukkan hasil yang sama dikarenakan Inspektorat Kabupaten Pangandaran belum melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP kembali untuk tahun 2020. Sehingga capaian untuk tahun 2020 lebih rendah dengan tahun 2019 sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

Adapun rincian hasil *Quality Assurance (QA)* BPKP perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Inspektorat Kabupaten Pangandaran terhadap 6 elemen adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Hasil *Quality Assurance (QA)* BPKP pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran**

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	2
2.	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3.	Praktik Profesional	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	2
6.	Struktur Tata Kelola	2

Sumber : BPKP Perwakilan Jawa Barat, 2019

**Tabel 3.6 Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat**

No.	Entitas Pemda	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP						
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP						
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP						
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP DPP	WTP							
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Level Kapabilitas APIP di mulai dari level 1 s.d. level 5. Sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3, sehingga capaian Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD perlu capaian sebesar 33,33% lagi. Perhitungan capaian diperoleh dari Rumus:

$$\frac{\text{Realisasi tahun 2019}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100 = \frac{2}{3} \times 100 = 66,67\%$$

Kapabilitas APIP ini terkait dengan 6 (enam) elemen dan kesemuanya berjumlah 41 KPA (Key Proses Area atau indikator-indikator kunci pencapaian tahapan kapabilitas) untuk sampai dengan level 5, level 1 tidak ada KPA, level 2 sebanyak 10 KPA, level 3 sebanyak 14 KPA, level 4 sebanyak 9 KPA, dan level 5 sebanyak 8 KPA. Adapun tahapannya berupa pembangunan infrastruktur (berupa pedoman, petunjuk teknis, SOP, rencana aksi, rencana tindak pengendalian, dan lain sebagainya) dan implementasi dari infrastruktur yang sudah dibangun tersebut.

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota Lain**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kab. Pangandaran	Realisasi Kota Banjar
Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	2	3

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasi Kabupaten Pangandaran lebih kecil dikarenakan *Key Process Area (KPA)* untuk Kapabilitas APIP Kota Banjar mencapai Level 3 atau sudah terpenuhi.

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak mengusulkan untuk dilakukan *Quality Assurance (QA)* kembali ke perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dikarenakan pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pangandaran tidak melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Kapabilitas APIP;
- 2) Tidak adanya kegiatan workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas APIP;
- 3) Tidak membangun infrastruktur-infrastruktur yang sesuai dengan hasil *benchmarking* dan meningkatkan pertemuan dengan BPKP selaku instansi pembina;

Untuk meningkatkan percepatan menuju Level 3 sesuai dengan target akhir RPJMD diperlukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan infrastruktur-infrastruktur yang sesuai dengan hasil *benchmarking* dan meningkatkan pertemuan dengan BPKP selaku instansi pembina;
- 2) Mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui Diklat, Bimtek dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
- 3) Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan *Key Process Area (KPA)* secara baik dan terus menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi;
- 5) Melakukan *Self Assesment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

### 3. Tingkat Kematangan implementasi SPIP

Target tingkat kematangan implementasi SPIP pada tahun 2020 adalah level 3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP bersumber dari hasil *Quality Assurance* oleh BPKP terhadap laporan hasil penilaian mandiri masing-masing Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementrian/Lembaga Negara. Tingkat kematangan Implementasi SPIP dimulai dari 0 sampai dengan 5, dinilai berdasarkan 125 (seratus dua puluh lima) indikator yang terbagi ke dalam 5 (lima) unsur. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP bahwa tingkat Kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3, sehingga pada Tahun 2020 capaiannya 100%, Kondisi tersebut diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP evaluasinya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan level 1 s.d level 5. Sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3, sehingga capaian Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100,00 % yang diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi SPIP Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar**

Unsur SPIP	Inspektorat Kabupaten Pangandaran		Inspektorat Kota Banjar	
	Skor	Nilai	Skor	Nilai
Lingkungan Pengendalian	3,1250	0,9375	3,000	0,9000
Penilaian Risiko	3,0000	0,6000	3,000	0,600
Kegiatan Pengendalian	3,0000	0,7500	3,091	0,773
Pemantauan	3,0000	0,300	3,000	0,300
Jumlah	3,0000	0,4500	3,000	0,450
Keterangan	Level 3 (Terdefinisi)		Level 3 (Terdefinisi)	

Tingkat Implementasi SPIP jika dibandingkan dengan Inspektorat Kota Banjar realisasinya telah sama yaitu berada pada level 3 berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP dengan hasil perbandingan seperti di Tabel 3.10

Secara rinci kondisi kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) sesuai Laporan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor: Lap-163/PW10/3/2019 tanggal 16 April 2019 bahwa tingkat kematangan (maturitas)

penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3 (Terdefinisi).

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran bahwa tingkat Kematangan Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3. Secara rinci hasil Penilaian Mandiri terhadap 21 Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Kondisi Kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Hasil Penilaian Mandiri**

No	Nama SKPD	Skor	Level
1.	Sekretariat Daerah	3,652	Terdefinisi
2.	Inspektorat	3,744	Terdefinisi
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,624	Terdefinisi
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,198	Terkelola dan Terukur
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,667	Terdefinisi
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,829	Terdefinisi
7.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,700	Terdefinisi
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,749	Terdefinisi
9.	Dinas Kesehatan	4,092	Terkelola dan Terukur
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3,659	Terdefinisi
11.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3,777	Terdefinisi
12.	Dinas Pertanian	4,100	Terkelola dan Terukur
13.	Sekretariat DPRD	3,500	Terdefinisi
14.	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	4,300	Terkelola dan Terukur
15.	Kecamatan Cijulang	3,700	Terdefinisi
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	3,300	Terdefinisi
17.	Kecamatan Cigugur	3,400	Terdefinisi
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4,00	Terkelola dan Terukur
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3,800	Terdefinisi
20.	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,400	Terdefinisi
21.	Kecamatan Mangunjaya	3,500	Terdefinisi
	<b>Nilai Tingkat Kabupaten</b>		<b>Terdefinisi</b>

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar hasil *Quality Assurance* (QA) BPKP Kabupaten Pangandaran realisasinya pada tahun 2020 sama berada di Level 3, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.10 Perbandingan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kabupaten Pangandaran dengan Kota Banjar**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kab. Pangandaran	Realisasi Kota Banjar
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (1 s/d 5)	3	3

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Adanya Komitmen Pimpinan Daerah (Bupati) untuk meningkatkan Maturitas SPIP baik di level Kabupaten maupun di SKPD;
- 2) Adanya kebijakan untuk meningkatkan Level SPIP melalui dibentuknya Satuan Tugas Khusus (Satgas) dengan dibentuknya Peraturan Bupati No. 19 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

- 4) Adanya sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD;
- 5) Adanya pembinaan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk mendorong percepatan peningkatan Maturitas SPIP di Pemerintahan Kabupaten Pangandaran melalui Bimtek dan Pendampingan.

Meskipun sudah mencapai target akhir RPJMD, tetapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya untuk mempertahankan implementasi SPIP Level 3 atau upaya untuk mempercepat pencapaian menjadi Level 4 adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD, sehingga diharapkan seluruh SKPD pada Tahun 2019 sudah memiliki Profil Risiko berikut Rencana Tindak Pengendaliannya. Tata kelola risiko ini menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan karena merupakan unsur penting dan penyumbang terbesar dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 2) Menyusun Komite Pengendali Risiko Tingkat Kabupaten Pangandaran yang bertugas mengendalikan risiko strategis;
- 3) Memonitor penyelenggaraan SPIP dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil penilaian maturitas SPIP;
- 4) Meningkatkan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem;
- 5) Menyusun Unit Pengendali risiko (UPR) yang bertugas mengendalikan risiko organisasi;
- 6) Mengkoordinasikan hasil Profil Risiko dan RTP yang telah disusun oleh masing-masing OPD dan mereviu serta memantau pelaksanaannya.
- 7) Memantau serta mengevaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan SPIP;
- 8) Meningkatkan kompleksitas organisasi, sumber daya manusia dan perspektif pengembangannya.
- 9) Penganggaran kegiatan SPIP lebih ditingkatkan dalam dokumen anggaran tahun

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran No. 20 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- 3) Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran No. 700/Kpts.143-Huk/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Pangandaran;

#### 4. Nilai AKIP

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Untuk menghitung nilai capaian AKIP diperoleh melalui formula :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Oleh karena hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 belum selesai maka nilai SAKIP tahun 2020 menggunakan hasil evaluasi tahun 2019 yang dilakukan Inspektur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 memperoleh nilai sebesar 65,90 atau mendapat predikat B (Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian :

**Tabel 3.11 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

NO	KOMPONEN	BOBOT (%)	HASIL EVALUASI (%)	
			2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30%	20,57	22,09
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,02	15,42
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,23	9,81
4	Evaluasi Internal	10%	5,67	7,15
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	10,33	11,43
J u m l a h		100 %	60,82	65,90

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Pangandaran

Berdasarkan target di RPJMD, pada tahun 2019 nilai AKIP adalah B atau dengan skor minimal 60. Dari informasi di atas dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian skor AKIP} = \frac{65,9}{60} \times 100\%$$

$$= 109,9\%$$

Hasil perhitungan di atas, memberikan gambaran bahwa meskipun pada kategori sama, yaitu B, namun secara skor telah mencapai melebihi target.

**Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja AKIP dengan tahun Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan
2018	CC (50)	B (60,82)	121,6 4%	10,82
2019	B (60)	B (65,90)	109,9 %	5,90

Dibandingkan dengan tahun 2018, percepatan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 4,92 atau bila ditinjau dari capaiannya terjadi penurunan sebesar 11,74%. Hal ini diakibatkan masih adanya indikator yang mengarah pada proses, dan beberapa kegiatan outputnya masih belum jelas. Selain itu, masih perlu penajaman dalam analisa indikator sasaran LKIP. Meskipun dari sisi capaian terdapat penurunan, namun dilihat dari sisi score yang diperoleh pada tahun 2019 terdapat kenaikan dibandingkan score yang diperoleh pada tahun sebelumnya (2018).

**Tabel 3.13 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Score 2018	Score 2019
A. Perencanaan Kinerja (30%)		30,00	20,57	22,09
I.	Perencanaan Strategis (10%)	10,00	7,27	7,82
a.	Pemenuhan Renstra (2%)	2,00	1,63	1,85
b.	Kualitas Renstra (5%)	5,00	3,75	4,22
c.	Implementasi Renstra (3%)	3,00	1,89	1,75
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20,00	13,30	14,27
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4,00	3,70	3,78
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10,00	6,41	7,08
c.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6,00	3,19	3,41

Dapat dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan dari setiap komponen walaupun terdapat penurunan dalam sub komponen Implementasi Renstra. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Perencanaan Kinerja

Nilai yang diperoleh atas Perencanaan Kinerja adalah sebesar 22,09 dari bobot 30,00. Kabupaten Pangandaran telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

- 1) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.

- 2) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 3) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- 4) Kegiatan belum sepenuhnya relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran.
- 5) Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai
- 6) Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan Renstra
- 7) Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
- 8) Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya mencantumkan target secara periodik
- 9) Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

##### b. Pengukuran Kinerja.

Nilai yang diperoleh atas Pengukuran Kinerja adalah sebesar 15,42 dari bobot 25,00. Kabupaten Pangandaran telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan.
- 2) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi Kriteria Indikator Kinerja yang baik
- 3) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan Indikator Kinerja atasannya
- 4) Hanya sebagian terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
- 5) Pengukuran kinerja hanya sebagian dilakukan secara berjenjang
- 6) Pengumpulan data kinerja hanya sebagian dapat diandalkan.
- 7) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
- 8) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 9) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- 10) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- 11) Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya
- 12) Hasil Pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan pemberian reward and punishment dan belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian.

- 13) IKU belum seluruhnya direviu secara berkala
- 14) Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum seluruhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

##### c. Pelaporan Kinerja

Nilai yang diperoleh atas Pelaporan Kinerja adalah sebesar 9,81 dari bobot penilaian 15,00. Kabupaten Pangandaran telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Namun terdapat kelemahan dalam Komponen Pelaporan Kinerja, yaitu:

- 1) Laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
- 2) Laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
- 3) Laporan kinerja dengan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- 4) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- 5) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 6) Meningkatkan Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- 7) Meningkatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan.
- 8) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- 9) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- 10) Meningkatkan Informasi yang disajikan agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.

##### d. Evaluasi Internal

Nilai yang diperoleh atas Perencanaan Kinerja adalah sebesar 7,15 dari bobot penilaian 10,00. Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan evaluasi internal. Namun masih terdapat kelemahan, khususnya pada pemanfaatan evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja yaitu:

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.

- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hanya sebagian ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
- 4) Hasil evaluasi program hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang.
- 5) Hasil evaluasi program hanya sebagian ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi  
Nilai yang diperoleh atas pencapaian sasaran/ kinerja organisasi adalah sebesar 11,43 dari bobot penilaian 20,00. Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengukuran pencapaian sasaran/ kinerja organisasi. Namun masih terdapat kelemahan dimana Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

**Tabel 3.14 Hasil Capaian Kinerja AKIP Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Target Tahun 2021 (Akhir RPJMD)	%
		Targ et	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat Baik	CC	B(60,82)	121,64		B	B (65,90)	109,9	BB	100

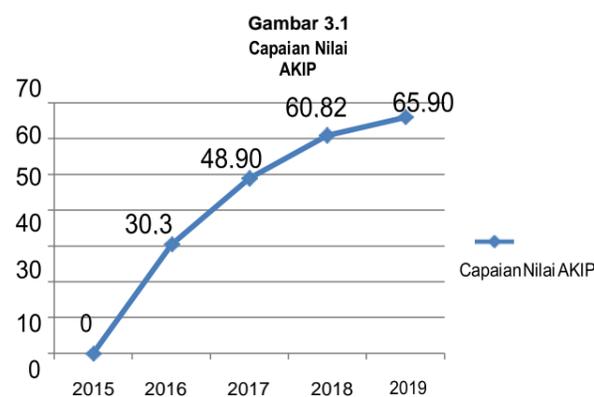
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2019 sebesar 65,90 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD (Nilai BB = minimal 70) pada Tahun 2021 bisa dihitung sebagai berikut :

$$\text{Sisa Target} = \text{Target akhir periode RPJMD} - \text{Realisasi Tahun 2019}$$

$$\text{Sisa Target} = 70 - 65,90 = 4,1$$

Jadi untuk mencapai nilai minimal pada target akhir periode RPJMD tahun 2021, masih tersisa 4,1.



Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian AKIP melebihi target antara lain :

- a. Adanya perubahan tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran berikut target capaiannya disesuaikan dengan kewenangan dan tugas pokok masing-masing;
- b. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (caseading) sampai ke eselon terendah dan re-focussing program;
- c. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya;
- d. Komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja.

### 5. Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

Nilai realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan diperoleh dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Pagu Pengadaan Melalui SPSE}}{\text{Jumlah Pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Jumlah Pagu Pengadaan yang dilakukan melalui SPSE Tahun 2020 sebesar Rp. 481.605.044.302,00. Sementara untuk Jumlah Pagu RUP Pengadaan melalui Penyedia Tahun 2020 sebesar Rp. 468.606.912.783,00.

Atas dasar data tersebut, maka dapat dihitung realisasi persentase Penggunaan E Procurement terhadap Belanja Pengadaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rp.468.606.912.783,00}}{\text{Rp.481.605.044.302,00}} \times 100\% = 97,30\%$$

Realisasi tersebut melebihi target untuk tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 90% atau apabila dipersentasekan maka capaian terhadap target kinerja Tahun 2020 sebesar 108,11% yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,30\%}{90\%} \times 100\% = 108,11\%$$

**Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/Perlambatan
2019	87	94,15	108,22	7,15
2020	90	97,30	108,11	7,3

Berdasarkan table 3.15, pada tahun 2020 terdapat percepatan sebesar 7,3% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 7,15%. Sedangkan bila dilihat dari capaian terdapat perlambatan sebesar 0,11% yaitu selisih antara capaian tahun 2020 dikurangi capaian tahun 2019. Kenaikan atau percepatan ini diakibatkan bahwa semua anggaran di seluruh OPD diwajibkan untuk dientri ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah APBD/DPA disahkan.

Dalam akhir periode RPJMD tahun 2021, indikator sasaran Presentase Penggunaan E-Procurement terhadap belanja Pengadaan memiliki target 90%. Dengan melihat realisasi capaian saat ini sebesar 97,30% maka target akhir periode RPJMD sudah mencapai melebihi target. Namun demikian indikator sasaran Presentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan akan tetap dipertahankan bahkan diupayakan terus untuk ditingkatkan.

Pencapaian kinerja yang melebihi target ini dikarenakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan upaya-upaya yang sistematis dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemantapan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintahan Kabupaten Pangandaran diantaranya sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi Pengadaan Langsung melalui e-Marketplace sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 3076-Barjas/2019 Tanggal 16 Desember 2020, Hal: Sosialisasi Pengadaan Langsung melalui e-Marketplace;
  - b. Koordinasi Penggunaan Sistem SPSE dalam PBJ Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 3014-Barjas/2019 Tanggal 10 Desember 2020, Hal: Koordinasi Penggunaan Sistem SPSE dalam PBJ Tahun Anggaran 2020;
  - c. Penjelasan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Braang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 2908-Barjas/2019 Tanggal November 2020 Hal : Penjelasan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Braang/Jasa Pemerintah;
  - d. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 2210 - Barjas/2020 Tanggal 21 September 2020, Hal : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

- e. Percepatan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/ 511-Barjas/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Hal : Percepatan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020.
- 2) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang /Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). Adapun perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - f. SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseases (COVID -19).

Selanjutnya bila dilihat dari jumlah paket pekerjaan Tender/Seleksi melalui SPSE yang diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah sebanyak 241 paket, terdiri dari Pengadaan Barang sejumlah 40 paket, Pengadaan Jasa Konstruksi sebanyak 171 paket, Pengadaan Jasa Konsultansi sebanyak 28 paket, dan Pengadaan Jasa Lainnya sebanyak 2 paket.

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yaitu :

$$\frac{241}{241} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2020 capaian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik terealisasi sebanyak 100% dari target 95 % atau capaian kerjanya mencapai 105,26%.

$$\frac{\text{Jumlah Paket Pengadaan Melalui SPSE}}{\text{Jumlah Paket pekerjaan Tender yang diusulkan}} \times 100\%$$

## 6. Indeks Profesionalitas ASN (1-100)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja dari sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Indeks Profesionalitas ASN adalah Permenpan No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Sejak tahun 2019 ada perubahan dalam penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN, dimana BKN menetapkan bahwa penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN didasarkan pada empat komponen/ dimensi utama yaitu :

1. Dimensi Kualifikasi, dimensi ini menggambarkan tingkat jenjang pendidikan yang dicapai tiap individu.
2. Dimensi Kompetensi, menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didukung dengan program pengembangan kompetensi.
3. Dimensi Kinerja, menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu atau organisasi yang memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat.
4. Dimensi Disiplin, menggambarkan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan/peraturan kedisiplinan yang berpengaruh pada hukuman disiplin.

Dimulai tahun 2019 penilaian skor Indeks Profesionalitas ASN dilakukan terhadap seluruh ASN sedangkan pada tahun sebelumnya hanya berlaku untuk pejabat struktural saja, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran sedangkan penetapan target dilakukan pada awal pembuatan Renstra.

Tahun anggaran 2020, BKPSDM Kabupaten Pangandaran sudah merencanakan kegiatan untuk menambah Indeks Profesionalitas ASN diantaranya melaksanakan kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional tetapi tidak bisa dilaksanakan karena pada bulan Pebruari 2020 terjadi Pandemi Covid-19 dimana seluruh kegiatan tatap muka ditiadakan dan anggaranpun dikembalikan untuk digunakan penanganan pandemic tersebut kecuali untuk Bimtek, seminar atau webinar yang dilaksanakan bersifat zoom meeting.

Pelaksanaan Bimtek, seminar atau webinar dengan zoom meeting dilaksanakan oleh beberapa SKPD dan peserta memperoleh sertifikat, permohonan data peserta Bimtek, webinar atau seminar tersebut sudah dimintakan ke tiap – tiap SKPD melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor : 800/087/BKPSDM.3/2020 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2020, namun sampai saat ini masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum mengirimkan data tersebut sehingga mempengaruhi penghitungan akhir dari skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran.

Perhitungan Skor Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik melalui input data pada aplikasi kepegawaian SAPK. Dan hasil penghitungan secara manual nilainya akan disandingkan dengan hasil updating data pada SAPK melalui portal <http://ip-jasn.bkn.go.id>.

Metode penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi, dengan cara menghitung gap antara kondisi ideal pendidikan, pelatihan, pengalaman dan administrasi dari setiap aparatur dengan kondisi eksisting.
- b. Kualifikasi, dengan cara menghitung gap antara kondisi ideal pendidikan dari setiap aparatur dengan jabatan yang diduduki oleh aparatur.
- c. Kinerja, dengan cara menghitung nilai SKP dari seluruh aparatur.

d. Disiplin, dengan cara menghitung jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur dibandingkan dengan jumlah aparatur yang ada, besar kecilnya nilai tergantung pada tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Berdasarkan metode penilaian di atas, maka penghitungan nilai Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pangandaran terdiri dari empat unsur yaitu:

- a. Kualifikasi: Riwayat pendidikan formal terakhir dengan bobot nilai maksimal sebesar 25% sesuai tingkat pendidikan;
- b. Kompetensi: Riwayat pengembangan kompetensi melalui diklat kepemimpinan (struktural), diklat fungsional (JFT), diklat teknis 20 JP dalam satu tahun, serta seminar/workshop/sejenisnya. Bobot maksimal unsur kompetensi sebesar 40%;
- c. Kinerja: Riwayat hasil penilaian kinerja, terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dengan masing-masing bobot nilai sebesar 15%, maksimal bobot unsur kinerja yaitu 30% sesuai dengan pencapaian nilai Prestasi Kerja PNS.
- d. Disiplin: Riwayat hukuman disiplin, bobot penilaian unsur disiplin sebesar 5%, bersifat mengurangi IP dari setiap tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN.

Formulasi untuk penghitungan skor indeks Profesionalitas ASN bagi tiap-tiap Daerah sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Gambaran capaian Skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16 Capaian Indeks Profesionalitas ASN**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	65	38.92	59,87%

Sumber data : Badan Kepegawaian Negara

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian skor Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2020 adalah sebesar 38.92

dimana capaian skor tersebut tidak memenuhi target skor yaitu 65. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya skor tersebut turun sebesar 17.27, hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam pencapaian skor Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebagai berikut:

1. Gap kompetensi masih sangat tinggi dikarenakan selisih rata-rata ASN yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dan yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbilang tinggi;
2. Gap kualifikasi masih cukup tinggi dimana masih adanya selisih rata-rata ASN yang memiliki latar pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya;
3. Adanya perubahan metode penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari Badan Kepegawaian Negara, yang semula penilaian hanya dilakukan terhadap pejabat struktural saja sedangkan saat ini penilaian berlaku untuk seluruh ASN;
4. Data pelaporan terkait dengan empat komponen utama Indeks Profesionalitas ASN dari tiap Perangkat Daerah belum lengkap, artinya masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian akhir skor Indeks Profesionalitas Kabupaten Pangandaran;
5. Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran menitikberatkan kepada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata. Jadi Profesionalitas ASN belum termasuk ke dalam program Prioritas Daerah.
6. Terjadinya wabah Covid-19 yang meniadakan kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan target pencapaian IP ASN Kabupaten Pangandaran.

Adapun upaya untuk meningkatkan skor Indeks Profesionalitas ASN di tahun berikutnya yaitu dengan:

1. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2021;
2. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap dalam aplikasi IP ASN dan SAPK.
3. Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan.

## 7. Indeks E-Government Nasional (1-4)

Indeks hasil penilaian SPBE tahun 2020 yang dirilis oleh Kemenpan-RB yang dapat diakses melalui website [monev.spbe.go.id](http://monev.spbe.go.id). Perolehan angka indeks SPBE Kabupaten Pangandaran adalah 3,02. Penyelenggaraan evaluasi SPBE tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Nilai Tingkat Kematangan *e-Government*/SPBE dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Indeks SPBE} &= \text{Indeks Domain 1 Kebijakan Internal SPBE} + \text{Indeks Domain 2 Tata Kelola SPBE} + \text{Indeks Domain 3 Layanan SPBE} \\ &= (4,12 \times 17\%) + (2,57 \times 28\%) + (3,24 \times 55\%) \\ &= 0,70 + 0,71 + 1,78 \\ &= 3,20 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap SPBE tahun 2020 capaiannya melebihi target dengan hasil capaian yaitu sebesar 142% yang diperoleh dengan formula:

$$\text{Capaian Indeks SPBE} = \frac{3,02}{2,25} \times 100\% = 134\%$$

**Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/Perlambatan
2019	2	2,3	116 %	0,3
2020	2,25	3,02	134 %	0,77

Indikator tingkat kematangan *e-Government* SPBE tahun 2019 mengalami percepatan sebesar 0,3 dengan capaian 116%. Pada tahun 2020, indikator tingkat kematangan *e-Government*/SPBE mengalami percepatan sebesar 0,77 atau capainya 134%. Hal ini didorong dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Pangandaran Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Di akhir periode RPJMD, target Tingkat Kematangan *e-Government*/SPBE adalah sebesar 3 poin, maka dengan membandingkan realisasi capaian saat ini sebesar 3,2 poin, maka target tingkat kematangan sudah melebihi target akhir periode RPJMD.

Beberapa faktor pendukung tercapainya capaian Tingkat Kematangan *e-Government* antara lain:

1. Telah disusunnya dan ditetapkan peta proses bisnis instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Peraturan terkait SPBE dalam implementasinya terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan terhadap kekurangannya;
3. Peraturan terkait SPBE di Kabupaten Pangandaran sudah sejalan dengan peraturan di tingkat pusat;
4. Aplikasi yang digunakan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Ada beberapa hal yang masih perlu diupayakan untuk memperbaiki tingkat kematangan *e-Government*/SPBE yaitu dalam hal tata Kelola SPBE. Untuk itu meskipun telah mencapai melebihi target, namun masih terdapat indikator yang belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan yang disebabkan oleh :

1. Anggaran dan belanja TIK belum terpusat;
2. Integrasi aplikasi masih terbatas pada beberapa aplikasi saja;
3. Belum terdapat aplikasi layanan naskah dinas;
4. Belum terdapat layanan *Whistle Blowing System*;
5. Penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang belum optimal;
6. Layanan publik belum sepenuhnya menggunakan aplikasi.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan implementasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Pangandaran diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi untuk membangun pemahaman bersama terkait implementasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Pangandaran;
2. Pemanfaatan aplikasi umum secara optimal;
3. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi layanan naskah dinas;
4. Mengkoordinasikan rencana perubahan dan merumuskan strategi implementasi proses bisnis.

Berikut disampaikan hasil pengukuran maturitas (pengukuran diri sendiri) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

Masing-masing domain dan aspek diberi bobot, bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda sebagaimana digambarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18 Pengukuran Indeks SPBE**

Domain, Aspek, Indikator	Nilai Indikator	Indeks	Keterangan
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE		4,18	$(4,42 \times (7\%/17\%)) + (4 \times (10\%/17\%)) = 2,35$
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		4,43	Jumlah nilai indikator 1 s.d 7 $(5+4+4+4+4+5+5=31)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 1 maka nilai aspek 1 diperoleh $31/7=4,43$
Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	5		
Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	4		
Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4		
Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	4		
Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	4		
Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	5		
Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	5		
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE		4	Jumlah nilai indikator 8 s.d 17 $(4+4+4+4+4+4+4+4+4+4=40)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 2 maka nilai aspek 2 diperoleh $40/10=4$
Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	4		
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	4		
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	4		
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	4		
Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	4		
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	4		
Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	4		
Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	4		
Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	4		
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah	4		
Domain 2 Tata Kelola SPBE		2,29	$(3 \times (8\%/28\%)) + (1,5 \times (8\%/28\%)) + (2,33 \times (12\%/28\%)) = 0,99 = 2,29$
Aspek 3 Kelembagaan		3	Jumlah nilai indikator 18 s.d 19 $(1+0=1)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 3 maka nilai aspek 3 diperoleh $6/2=3$
Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3		
Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	3		
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan		1,50	Jumlah nilai indikator 20 s.d 21 $(1+2=3)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 4 maka nilai aspek diperoleh $3/2=1,5$
Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1		
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK	2		
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi		2,33	Jumlah nilai indikator 22 s.d 24 $(3+2+2=7)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 4 maka nilai aspek 4 diperoleh $7/3=2,33$
Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data	3		
Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi	2		
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	2		
Domain 3 Layanan SPBE		3,03	$3,28 \times (35\%/55\%) + 3,16 \times (20\%/55\%)$
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,14	Jumlah nilai indikator 25 s.d 31 $(1+3+4+4+3+3+4)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 6 maka nilai aspek 7 diperoleh $22/7 = 3,14$
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas	1		
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian	3		
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan	4		
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran	4		
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan	3		
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja	3		
Indikator 31 Layanan Pengadaan	4		
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik		2,83	Jumlah nilai indikator 32 s.d 35-3 $(4+2+1+4+4+2=17)$ dibagi jumlah indikator pada aspek 6 maka nilai aspek 6 diperoleh $17/6=2,83$
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik	4		
Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2		
Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System	1		
Indikator 35-1 Layanan Publik Instansi Pemerintah	4		
Indikator 35-2 Layanan Publik Instansi Pemerintah	4		
Indikator 35-3 Layanan Publik Instansi Pemerintah	2		
<b>Indeks SPBE</b>		<b>3,02</b>	$= (4,18 \times 17\%) + (2,29 \times 28\%) + (3,03 \times 55\%) = 0,71 + 0,65 + 1,66 = 3,02$

**Tabel 3.19 Pembagian Bobot Penilaian**

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	20%

Sedangkan nilai bobot setiap indikator pada sebuah aspek dapat dihitung dari nilai bobot aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut. Masing-masing indikator memiliki rentang penilaian dari level 0 sampai dengan level 5 (ada 6 tingkatan) dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Level Nilai Indikator Indeks SPBE**

Level Indikator	Keterangan/Arti
0	Tidak Ada/terdapat
1	Terdapat konsep
2	Telah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik
3	Telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik
4	Mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi / terintegrasi
5	Dapat dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi

Ket : Penerapan level indikator berdasarkan pemenuhan kondisi eksisting terhadap indikator

Dari Tabel 3.18 Pengukuran Indeks SPBE diatas dapat digambarkan uraian penilaian SPBE untuk Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- Untuk Domain 1 Kebijakan Internal SPBE terdiri dari 2 Aspek dan 17 Indikator dengan rincian nilai sebagai berikut:  
Domain 1 memperoleh nilai 4,18 yang diperoleh dari nilai Aspek 1 dan Aspek 2. Cara menghitung Aspek 1 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada aspek 1. Sedangkan menghitung Aspek 2 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator aspek 2. Jumlah Aspek 1 ( $4,42 \times (7\%/17\%) = 1,82$ ) + jumlah aspek 2 ( $4 \times (10\%/17\%) = 2,35$ ) diperoleh hasil indeks domain 1 Kebijakan Internal SPBE sebesar 4,18.
- Untuk Domain 2 Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 Aspek dan 7 indikator dengan rincian nilai sebagai berikut :  
Domain 2 memperoleh nilai 2,29 yang diperoleh dari nilai Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5. Cara menghitung Aspek 3 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 3. Menghitung Aspek 4 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 4. Menghitung aspek 5 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 5. Jumlah Aspek 3 ( $3\% \times (8\%/28\%) = 0,85$ ) + Jumlah Aspek 4 ( $1,5 \times (8\%/28\%) = 0,42$ ) + Jumlah Aspek 5 ( $2,33 \times (12\%/28\%) = 0,99$ ), diperoleh hasil indeks Domain 2 Tata Kelola SPBE sebesar 2,29.
- Untuk Domain 3 Layanan SPBE terdiri dari 2 Aspek dan 13 indikator dengan rincian nilai sebagai berikut: Domain 3 memperoleh nilai 3,03 yang diperoleh dari nilai Aspek 6 dan Aspek 7. Cara menghitung Aspek 6 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 6. Menghitung Aspek 7 yaitu jumlah nilai indikator dibagi jumlah indikator pada Aspek 7. Jumlah Aspek 6 + Jumlah Aspek 7, diperoleh hasil indeks Domain 3 Layanan SPBE sebesar 3,03.

- Nilai Indeks SPBE dapat dihitung sebagai berikut:  
Indeks SPBE= Indeks Domain 1 Kebijakan Internal SPBE ditambah Indeks Domain 2 Tata Kelola SPBE ditambah Indeks Domain 3 Layanan SPBE  
 $= (4,18 \times 17\%) + (2,29 \times 28\%) + (3,03 \times 55\%)$   
 $= 0,71 + 0,65 + 1,66$   
 $= 3,02$

**7. Indeks Reformasi Birokrasi**

Realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kemenpan RB dapat diakses melalui situs <http://pmprrb.menpan.go.id>. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai melaksanakan pengolahan data untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 6 (enam) Perangkat Daerah diantaranya :

- Sekretariat Daerah
- Inspektorat
- BKPSDM
- Diskominfo
- Bappeda
- Kecamatan Cijulang

Oleh karena Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 belum selesai maka indeks reformasi birokrasi menggunakan tahun 2019 yakni sebesar 51,60. Hasil ini telah melebihi target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2019 dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 45. Dengan demikian maka capaiannya dapat diketahui melalui perhitungan dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \text{realisasi/target} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= 51,6/45 \times 100\% \\ &= 114,67\% \end{aligned}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 didapat dari hasil Kemenpan RB sesuai Surat Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/492/RB.06/2019 Hal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019, bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah 51,60 dengan kategori "CC", dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Nilai 2019
<b>A KOMPONEN PENGUNGKIT</b>			
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	5	1,87
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)	5	1,34
III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)	6	1,45
IV.	PENATAAN TATALAKSANA (5)	5	2,13
V.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15	4,36
VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)	6	1,65
VII.	PENGUATAN PENGAWASAN (12)	12	5,39
VIII.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)	6	2,70
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT		60	20,89
<b>B KOMPONENEN HASIL</b>			
I.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8,51
II.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	6,00	4,23
III.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	7,00	6,42
IV.	Opini BPK (3)	3,00	3,00
V.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	10,00	8,55
TOTAL KOMPONEN HASIL		40	30,71
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100	51,60

Sumber: Kemenpan RB, 2019

**8. Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah**

Target Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah tahun 2020 adalah sebesar 18,50%. Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah sampai dengan tahun 2020 realisasinya sebanyak 8,57% dengan target 18,50% sehingga belum mencapai target. Adapun capaian tersebut di dapat dari rumus :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM}}{\text{Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI / WBK / WBBM}} \times 100$$

Sehingga didapat capaian  $\frac{3}{35} \times 100 = 8,57\%$ . Capaian tersebut didapat dari 2 (dua) unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas pada tahun 2019 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Pangandaran dan 2 (dua) unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas pada tahun 2020 yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (unit kerja yang sama dengan tahun 2019) dan Puskesmas Padaherang.

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2020 oleh Inspektorat dilakukan dengan melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 10 (sepuluh) unit kerja yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi dan Puskesmas Legokjawa dan Penilaian Zona Integritas terhadap 2 (dua) unit kerja yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Padaherang.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu menunjukkan hasil yang lebih tinggi yaitu 8,57% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 7,4%.

**Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Ket
2019	7,4% (2 Unit Kerja)	7,4% (2 Unit Kerja)	- DPMPTSP - Puskesmas Pangandaran
2020	18,5% (6 Unit Kerja)	8,57% (3 Unit Kerja)	- DPMPTSP (Tahun 2019 & 2020) - Puskesmas Pangandaran (Tahun 2019) - Puskesmas Padaherang (Tahun 2020)

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD indikator sasaran strategis Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah pada tahun 2020 realisasinya sebanyak 8,57% dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 29,60% sehingga belum mencapai target. Sedangkan indikator sasaran strategis Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah tidak bisa dibandingkan dengan Kota Banjar karena perbedaan indikator sasaran.

Faktor keberhasilan Indikator sasaran strategis Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah pada tahun 2020 dikarenakan unit kerja yang diusulkan Zona Integritas adalah unit kerja yang memiliki prestasi tingkat daerah maupun tingkat nasional.

**9. Survei Kepuasan Masyarakat**

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

- Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu Penyelesaian** adalah jangka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya / Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan di terima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- Sarana dan prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Selanjutnya untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, kinerja unit pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.23 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
65,00 – 76,60	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap 86 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada tahun 2020 diperoleh data bahwa nilai IKM yang dicapai adalah 83,52 dengan predikat "BAIK".

Data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$$

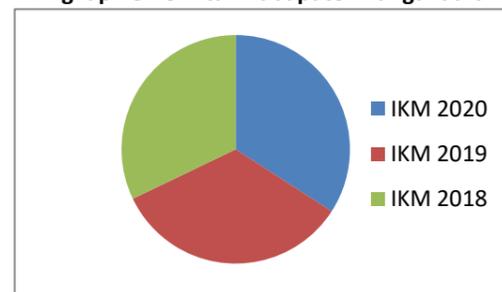
$$IKM = \frac{7182,5}{86}$$

$$IKM = 83,52$$

**Tabel 3.24 Perbandingan Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	2017	65,00 – 76,60	76,09	C
		(Cukup)		
2	2018	76,61 – 88,30	78,62	B
		(Baik)		
3	2019	76,61 – 88,30	82,62	B
		(Baik)		
4	2020	76,61 – 88,30	83,52	B
		(Baik)		
5	2021	88,31 – 100,00	-	-
		(Sangat Baik)		

**Gambar 3.2 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran**



**Tahun 2018, 2019 dan 2020**

IKM 2020	83.517
IKM 2019	82.619
IKM 2018	78.627

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM "Baik" dari target "Baik" diukur berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil

di atas 76,61 dengan menggunakan pedoman survey Permen Pan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 81 Perangkat Daerah atau 100% yang memperoleh capaian IKM diatas 76,61, pada Tahun 2020 terdapat 85 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau 98,83% memperoleh nilai IKM lebih dari 76,61, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 98,83%. Capaian kinerja tersebut turun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 109% dari 81 unit Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei terdapat 78 Perangkat Daerah, kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencapai Nilai "Baik" atau di atas 76,61.

**Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA	
		TARGET	REALISASI		
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	(76,61-88,30) Baik	(84,49) Baik	102,47%
Rata-Rata Capaian Kinerja		81,18			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan target di akhir periode RPJMD adalah memperoleh Kinerja Unit Pelayanan "Sangat Baik" dengan Nilai Interval Konversi IKM berkisar **88,31 – 100** dan Mutu Pelayanan "A". Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, maka tersisa target minimal 4,17, yaitu dengan cara 88.31 dikurangi 84.49, tetapi sehubungan dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas capaian nilai "SANGAT BAIK" tidak mungkin tercapai tetapi hanya bisa menaikan nilai Interval Konversi IKM mutu Pelayanan "BAIK".

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
- Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparat pengawas internal;

- Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## Misi 2 : Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berwawasan Lingkungan

**Tabel 3.26 Analisis Pencapaian kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	30	35	117%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				117%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tercapai melebihi target, adapun rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 117% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran ketaatan terhadap RTRW diuraikan sebagai berikut :

### 1. Ketaatan terhadap RTRW

Nilai realisasi capaian indikator Ketaatan terhadap RTRW diperoleh melalui formula (sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017) sebagai berikut:

- Rencana Peruntukan dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang harus dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW. Perwujudan rencana tata ruang wilayah tersebut merupakan gabungan dari banyaknya program utama dalam perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- Realisasi RTRW dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang sudah dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW.
- Atas dasar hal tersebut maka dapat kita peroleh bahwa Rencana Peruntukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran 2018-2038 sebanyak 391 program utama. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perwujudan rencana tata ruang tahun 2020 diperoleh bahwa program utama dalam indikasi program yang sudah dapat diwujudkan sebanyak 100 program.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{realisasi RTRW}}{\text{rencana peruntukan}} \times 100\% \\ &= \frac{136}{391} \times 100\% \\ &= 35\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui perbandingan Realisasi Ketaatan terhadap RTRW antara tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Ketaatan terhadap RTRW Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/Perlambatan
2019	20	20,72	103,60%	0,2
2020	30	35	117%	5

Indikator Ketaatan terhadap RTRW tahun 2020 terjadi percepatan yaitu sebesar 5% dengan capaian hanya sebesar 117%. sudah sesuai dengan perencanaan program utama yang ada dalam RTRW Kabupaten Pangandaran.

## 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

**Tabel 3.28 Capaian indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR TUJUAN DLHK	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,91	65,22	103,67%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Target Indikator tujuan Tahun 2020 sebesar 62,91 dengan realisasi target sebesar 65,22 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,67% dikategorikan sangat baik Sekali. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan hitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{65,22}{62,91} \times 100\% \\ &= 103,67\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/Perlambatan
2018	61,50	60,54	96,93%	0,96
2019	62,46	61,61	98,64%	0,85
2020	62,91	65,22	103,67%	2,31

Pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019, realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak pernah mencapai target, akan tetapi Pada Tahun 2020 Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai Target atau melebihi Target Sebesar 103,67%. pada tahun 2020, adanya percepatan sebesar 2,31 dan capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,96 dan tahun 2019 sebesar 0,85 dengan capaian hanya 96,93% pada Tahun 2018 dan 98,64% pada tahun 2019.

Target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 63,36, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 65,22, sehingga untuk target capaian IKLH Pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sudah tercapai dengan percepatan sebesar 1,86.

Analisis capaian indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{Indeks kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

### A. Indeks Kualitas Air (IKA)

1. Terlebih dahulu dilakukan Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan rumus:

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$$

**Tabel 3.30 Pemantauan dilakukan pada 24 titik sample**

No.	Nama Sungai	Periode	(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R <sub>2</sub>	(Ci/Lij)M <sub>2</sub>	Pij	Status Mutu Air
1	Cigugur Hulu	23/09/2020	0,67	2,68	0,45	7,18	1,95	ringan
2	Cigugur Tengah	23/09/2020	0,47	1,66	0,22	2,75	1,22	ringan
3	Cigugur Hilir	23/09/2020	1,08	4,37	1,17	19,08	3,18	ringan
4	Citonjong Hulu	23/09/2020	0,80	2,98	0,64	8,85	2,18	ringan
5	Citonjong Tengah	23/09/2020	0,79	2,96	0,62	8,75	2,16	ringan
6	Citonjong Hilir	23/09/2020	0,68	1,86	0,47	3,46	1,40	ringan
7	Ciwayang Hulu	23/09/2020	1,15	4,03	1,31	16,21	2,96	ringan
8	Ciwayang Tengah	23/09/2020	0,72	2,59	0,52	6,71	1,90	ringan
9	Ciwayang Hilir	23/09/2020	0,50	1,63	0,25	2,66	1,21	ringan
10	Ciputrapinggan Hilir	23/09/2020	0,91	2,92	0,82	8,50	2,16	ringan
11	Embung Pangandaran	23/09/2020	0,85	3,25	0,71	10,54	2,37	ringan
12	Situ Cisamping	23/09/2020	0,34	0,97	0,12	0,94	0,73	memenuhi
13	Cijulang Hulu	16/11/2020	0,89	3,65	0,79	13,33	2,66	ringan
14	Cigugur Hulu	16/11/2020	0,54	2,12	0,29	4,49	1,55	ringan
15	Cigugur Tengah	16/11/2020	0,60	2,11	0,36	4,47	1,55	ringan
16	Cigugur Hilir	16/11/2020	0,95	4,62	0,90	21,36	3,34	ringan
17	Citonjong Hulu	16/11/2020	1,35	5,05	1,82	25,54	3,70	ringan
18	Citonjong Tengah	16/11/2020	1,12	3,84	1,25	14,75	2,83	ringan
19	Citonjong Hilir	16/11/2020	0,52	1,75	0,27	3,05	1,29	ringan
20	Ciwayang Hulu	16/11/2020	0,34	0,80	0,12	0,64	0,61	memenuhi
21	Ciwayang Tengah	16/11/2020	0,67	2,61	0,45	6,82	1,91	ringan
22	Ciwayang Hilir	16/11/2020	1,29	3,93	1,65	15,47	2,93	ringan
23	Ciputrapinggan Hilir	16/11/2020	0,70	2,60	0,48	6,76	1,90	ringan
24	Embung Pangandaran	16/11/2020	0,64	2,62	0,41	6,85	1,91	ringan

2. L<sub>ij</sub> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j), C<sub>i</sub> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>)<sub>M</sub> adalah nilai maksimum dari Ci/Lij, dan (C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>)<sub>R</sub> adalah nilai rata-rata dari Ci/
3. Evaluasi Terhadap Nilai IP :  
 $0 \leq P_{ij} \leq 1,0 \rightarrow$  Baik (memenuhi baku mutu)  
 $1,0 < P_{ij} \leq 5,0 \rightarrow$  cemar ringan  
 $5,0 < P_{ij} \leq 10,0 \rightarrow$  cemar sedang  
 $P_{ij} > 10,0 \rightarrow$  cemar berat
4. Kriteria baku mutu air diambil untuk Kelas II yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau jenis peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Dalam hal baku mutu air pada sumber air belum atau tidak ditetapkan, maka berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

5. Menghitung Indeks Kualitas Air:

**Tabel 3.31 Indeks Kualitas Air**

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	2	0%	70	5,83
Ringan	22	100%	50	45,84
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
<b>Nilai Indeks Kualitas Air</b>				<b>51,67</b>

**B. Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Pengambilan sample Udara dilakukan dengan metode Passive sampler. Metode Passive sampler dilakukan pada 2 (dua) group titik sampling berbeda, masing-masing selama 2 kali pengambilan sample:

**Tabel 3.32 Group Titing Sampling I**

No.	Peruntukan	Alamat Lokasi	Tahap I	Tahap II
1.	Pemukiman	Desa Cintaratu Kecamatan Parigi	11-24 Agustus 2020	13 -26 Okt 2020
2.	Transportasi	Area Terminal Kalipucang, Dusun Girisetra, Desa Kalipucang, Kec, Kalipucang	11-24 Agustus 2020	13 -26 Okt 2020
3.	Industri	Area PT, JAPFA COMFEED INDONESIA Kec, Cimerak	11-24 Agustus 2020	13 -26 Okt 2020
4.	Perkantoran	Jl, Alun-alun No,2 Desa Parigi Kec, Parigi (Area Kantor SETDA)	11-24 Agustus 2020	13 -26 Okt 2020

**Tabel 3.33 Group Titik Sampling II**

No.	Peruntukan	Alamat Lokasi	Tahap I	Tahap II
1.	Pemukiman	Jl. Kebon Salak No.20 Desa Cijulang, Kec. Cijulang	11-24 Agustus 2020	24 Sept – 7 Okt 2020
2.	Transportasi	Area Bundaran Ikan Marlin, Desa Pananjung, Kec. Pangandaran	11-24 Agustus 2020	24 Sept – 7 Okt 2020
3.	Industri	Area Pabrik PT. PECU	11-24 Agustus 2020	24 Sept – 7 Okt 2020
4.	Perkantoran	Jl. Alun-alun No.2 Desa Parigi Kec. Parigi (Area Kantor SETDA)	11-24 Agustus 2020	24 Sept – 7 Okt 2020

**Tabel 3.34 Hasil metode passive sampler**

NO	Provinsi	Kota	Peruntukan	Rata-rata SO <sub>2</sub>	Rata-rata NO <sub>2</sub>	leu SO <sub>2</sub>	leu NO <sub>2</sub>	leu NO <sub>2</sub> & SO <sub>2</sub>	IKU
				µg/m <sup>3</sup>	µg/m <sup>3</sup>				
Group Titik sampling I									
1.	JAWA BARAT (3200)	Kabupaten Pangandaran (3218)	Pemukiman	25,63	3,38	1,28	0,08	0,68	67,62
			Transportasi						
			Industri						
			Perkantoran						
Group Titik sampling II (KLHK)									
2.	JAWA BARAT (3200)	Kabupaten Pangandaran (3218)	Pemukiman	8,91	7,51	0,45	0,19	0,32	87,96
			Transportasi						
			Industri						
			Perkantoran						
<b>IKU GABUNGAN</b>									<b>77,79</b>

**C. Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Luas Wilayah Daratan Kabupaten Pangandaran mencapai 1.011,04 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.35 Tabel Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

a. Tutupan Vegetasi Hutan (TVH)	
- Hutan Negara (Hutan Kawasan)	165,590 Km <sup>2</sup>
- Hutan Hak/ Hutan Rakyat	302,020 Km <sup>2</sup>
- Hutan Mangrove	3,100 Km <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>470,710 Km<sup>2</sup></b>
b. Tutupan Vegetasi Non Hutan (TVNH)	
- Hutan Kota	0,086 Km <sup>2</sup>
- Taman Kota	0,067 Km <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>0,153 Km<sup>2</sup></b>

Perhitungan IKL sebagai berikut :

$$IKL = 100 - \left( \frac{84,3 \left( \frac{TVH + (TVNH \times 0,6)}{\text{Luas Wilayah}} \right) \times 100}{54,3} \right)$$

$$= 100 - \left( \frac{84,3 \left( \frac{470,710 + (0,153 \times 0,6)}{1.011,04} \right) \times 100}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left( (84,3 - (0,4657 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = \mathbf{65,25}$$

**D. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Dari data-data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IKLH = (0,376 \times \text{Indeks kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

$$= (0,376 \times 51,67) + (0,405 \times 77,79) + (0,219 \times 65,25)$$

$$= 19,43 + 31,50 + 14,29$$

$$= \mathbf{65,22}$$

Target Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 tercapai disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga penanganan timbulan sampah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Dilakukan tindakan lanjut pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.
5. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di area sempadan sungai.
6. Dilakukan pemeliharaan taman kota sehingga kualitas udara dapat terjaga dengan baik.

**Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berkualitas**

**Tabel 3.36 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualias**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	85	85	100
2. Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	65	68	104
3. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	65	66	101
4. Indeks Resiko Sanitasi	Indeks	36	32	90
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				<b>102</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas memiliki 4 indikator kinerja sasaran dengan

rincian : 3 (tiga) indikator sasaran tercapai melebihi target dan 1 (satu) indicator sasaran yang tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 165% dikategorikan sangat baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jalan dalam kondisi mantap  
 Nilai realisasi capaian Persentase jalan dalam kondisi mantap diperoleh melalui formula :  

$$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{panjang total}} \times 100\%$$
 Yang dimaksud dengan jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dengan spesifikasi menggunakan menggunakan cor beton (rigid) dan lapen (baik). Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :
  - a. Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap = 429,129 km, jumlah tersebut berasal dari jumlah jalan dalam kondisi baik sebesar 397,249 km ditambah jumlah jalan dalam kondisi sedang sebesar 31,880 km, jumlah ruas Jalan tersebut bersumber dari data ruas jalan Dinas PUTRPRKP Kab. Pangandaran.
  - b. Spesifikasi jalan dalam kondisi mantap menggunakan cor beton (rigid) sepanjang 91,52 km, dan lapen (baik) sepanjang 37.937,14 km. Sisanya spesifikasi jalan dalam kondisi tidak mantap menggunakan Telford/kerikil sepanjang 79,62 km dan Tanah/Belum Tembus sepanjang 7,57 km.
  - c. Total panjang jalan kabupaten adalah 504,310 km berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 620/kpts.225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)}}{\text{panjang total}} \times 100\%$$

$$= \frac{429,129 \text{ km}}{504,310 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{85\%}$$

Capaian Kinerja dari indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 113%. Angka tersebut merupakan hasil pembagian antara target dalam RPJMD sebesar 75% dan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 85%. Perhitungan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

= realisasi/targetx100%

=85/75x100%

=113 %

Dengan nilai tersebut artinya capaian indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai melebihi target.

**Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Persentase jalan dalam kondisi mantap Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/Perlambatan
2019	70	83,38	119,11%	13,38
2020	75	85	113%	10

Pada tahun 2019 terjadi percepatan 13,38% dari target dengan capaian 119,11%. Dan pada tahun 2020 terjadi percepatan yang sedikit menurun yaitu sebesar 10% atau dengan capaian 119,11%. Penurunan percepatan ini dipengaruhi oleh wabah Covid-19 sehingga adanya pengurangan anggaran dan kegiatan dari target sebelumnya, tetapi tidak mempengaruhi capaian kinerja dan terus mengupayakan kebijakan Kepala Daerah yang menginginkan penyelesaian target infrastruktur jalan dan jembatan dipercepat sebelum akhir periode RPJMD. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Pangandaran fokus kepada 4 (empat) prioritas bidang pembangunan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata.

Dengan capaian pada tahun 2020 indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 85%, maka sisa terget dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 95% adalah tinggal sebesar 10% lagi. Keberhasilan dalam pencapaian pencapaian melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bidang infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pangandaran selain bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata;
- Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganggarkan biaya untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang cukup besar mengingat kondisi saat sebelum pemekaran daerah, jalan-jalan kabupaten sebagian besar sangat rusak.
- Spesifikasi untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan diwajibkan menggunakan

hotmix atau cor beton/rigid sehingga diharapkan memiliki ketahanan/umur jalan yang lama.

- Ketepatan waktu pekerjaan akibat adanya pengawasan yang ketat dari Dinas PUTRPRKP dalam hal pelaporan (Pengecekan Mutu/Mutual Check) dan Progres pekerjaan atau termyn.

## 2. Tingkat Kecelakaan Lalu lintas

Tingkat kecelakaan lalu lintas diperoleh melalui formula :

$$\text{Jumlah kejadian kecelakaan X } 10^6 \text{ LHR X Panjang Jalan Kabupaten X 365 hari}$$

Dimana Lalu Lintas Harian (LHR) adalah banyaknya kendaraan yang melewati jalan kabupaten per hari rata-rata sebanyak 12.625 kendaraan per hari. Data jumlah rata-rata Lalu Lintas Harian (LHR) tersebut diperoleh berdasarkan hasil survey di beberapa ruas jalan Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan teknik penghitungan lalu lintas (traffic counting) yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah angka kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2020 yang masuk ke data kepolisian yaitu sebanyak 6 kasus. (sumber: Polres Ciamis), panjang jalan Kabupaten Pangandaran = 504,31 km. (sumber : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 620/kpts.225-Huk/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Pangandaran).

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{6 \times 1.000.000}{12.652 \times 504,31 \times 365} = 0,002 \text{ Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun}$$

Untuk mengukur capaian penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas diperlukan penghitungan yang menunjukkan hasil negatif angka Indeks target dibagi realisasi.

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET		REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA 2020
				2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas							
3.2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun	0,033	0,032	0,031	0,002	155%

Adapun perhitungan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0,031}{0,002} \times 100\% = 155\%$$

Capaian kinerja tingkat kecelakaan lalu lintas tercapai melampaui target 0,031 yaitu tercapai 0,002 orang/sejuta Km kendaraan per tahun atau 155% dari target. Semakin rendah persentase capaian kinerja dan angka kecelakaan /tingkat kecelakaan lalu lintas maka semakin tinggi capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Percepatan/Perlambatan
2019	0,032	0,003	0,029
2020	0,031	0,002	0,028

Dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 semakin menurun yang artinya terdapat percepatan 0,001% pada tahun 2020. Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah implementasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang antarlain hampir semua ruas jalan di Kabupaten Pangandaran telah dilengkapi fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum (Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya) yang memadai dan dalam kondisi baik, serta didukung dengan adanya program dan kegiatan pengendalian, pengaturan, dan pengamanan lalu lintas secara rutin maupun di hari-hari besar keagamaan oleh petugas pengatur lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran beserta jajaran dari pihak Kepolisian. Untuk mencapai target sesuai akhir periode RPJMD sebesar 0,029 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,002 maka masih target

**Tabel 3.38 Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas**

akhir RPJMD sudah terlampaui. Namun demikian untuk mempertahankan angka capaian ini masih perlu upaya keras. Karena dapat diprediksi, setiap tahun jumlah kendaraan dan pengguna kendaraan semakin meningkat. Hal tersebut secara signifikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya resiko kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Pangandaran apabila tidak dilakukan langkah-langkah pencegahan dari sekarang.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian melebihi target kinerja dimaksud meliputi:

- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pengadaan Lampu PJU di beberapa titik di ruas jalan Kabupaten Pangandaran sebagai penunjang pengguna jalan dan pengendara di malam hari, terutama di lokasi umum dan lokasi rawan kecelakaan.
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum bertujuan untuk mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang secara rutin/berkala agar prasarana lalu lintas khususnya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat berfungsi dengan baik.
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas (rambu-rambu lalu lintas) mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan dan melakukan rehabilitasi rambu-rambu agar dapat berfungsi dengan baik.
- Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Lebaran, Natal dan Tahun Baru bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas di hari-hari besar dan keagamaan;

- Melakukan Sosialisasi terhadap Pengendara /

Pemilik Kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

- b. Kondisi jalan di Kabupaten Pangandaran semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Beberapa ruas jalan di Kabupaten Pangandaran telah dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan rambu-rambu lalu lintas yang memadai (Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya).

### 3. Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik

Nilai realisasi capaian Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{jumlah jaringan irigasi teknis dalam kondisi mantap (m)}}{\text{total jaringan irigasi teknis (m)}}$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh total Jaringan Irigasi Teknis seluruh Kabupaten Pangandaran adalah 16.785,38 m (berdasarkan data tahun 2020). Namun berdasarkan hasil pendataan ulang yang dituangkan dalam Permen PU tentang Penetapan Daerah Irigasi, bahwa di Kabupaten Pangandaran panjang saluran irigasi teknis sepanjang 8.678,01 m, sehingga terdapat perbedaan data dasar yang digunakan dalam perhitungan tahun 2019 dengan tahun 2020.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik (m)}}{\text{total jaringan irigasi teknis (m)}} \\ &= \frac{11.342,15}{16.785,38} \end{aligned}$$

Realisasi dari indikator Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik adalah sebesar 68%, artinya sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 65%. Dengan demikian rehabilitasi jaringan irigasi menjadi optimal dalam menambah suplai air menuju titik yang ditentukan yaitu petak sawah.

**Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Rasio Jaringan Irigasi Teknis Dalam Kondisi Baik Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Percepatan / Perlambatan
2019	60%	65%	5%
2020	65%	68%	3%

Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik mengalami perlambatan sebesar 2% pada tahun 2020. Perlambatan ini akibat dari pandemi Covid-19 sehingga adanya pengurangan anggaran dan pengurangan kegiatan pada tahun 2020.

Atas kondisi tersebut, untuk mencapai target akhir periode RPJMD masih sebesar 2% lagi dari target sebesar 70%, sehingga sejak sekarang sudah dipersiapkan strategi antara lain dengan mendata dan memetakan jaringan irigasi teknis yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan yang disesuaikan dengan kebijakan baru berdasarkan Permen PU tersebut.

### 4. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum

Nilai realisasi capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga berakses air minum}}{\text{jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah Rumah tangga berakses air minum = 95.956 kk

Jumlah tersebut merupakan jumlah rumah tangga berakses air minum seluruh Kabupaten Pangandaran, data bersumber dari akumulasi program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) dan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat) Kabupaten Pangandaran. Jumlah total Rumah tangga di Kabupaten Pangandaran = 150.047 kk

Jumlah tersebut merupakan jumlah total rumah tangga yang membutuhkan akses air minum di Kabupaten Pangandaran. Data bersumber dari Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah rumah tangga berakses air minum}}{\text{jumlah total rumah tangga}} \times 100\% \\ &= \frac{95.956}{146.045} \times 100\% \\ &= 66\% \end{aligned}$$

Capaian Kinerja dari indikator Persentase rumah tangga berakses air minum adalah sebesar 101%, Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{66}{65} \times 100\% \\ &= 101\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Percepatan / Perlambatan
2019	55%	63,67%	8,67%
2020	65%	66%	1%

Meskipun dapat mencapai melebihi target, dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi persentase rumah tangga berakses air minum mengalami perlambatan sebesar 7,67%, yaitu selisih percepatan antara tahun 2019 dengan percepatan tahun 2020. Perlambatan ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga adanya pengurangan jumlah unit kegiatan dan pengurangan anggaran di Kabupaten Pangandaran. Untuk mencapai target sesuai akhir periode RPJMD sebesar 75%, masih perlu upaya keras untuk merealisasikan persentase rumah tangga berakses air minum yang masih tersisa yaitu sebesar 9%. Melihat masih besarnya tingkat capaian persentase rumah tangga berakses air minum yang harus dicapai, maka akan dilakukan langkah-langkah antara lain :

- a. Pendataan dan survey lokasi untuk menentukan prioritas terhadap pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar cakupan pemanfaatan sambungan rumah lebih besar;
- b. Penambahan jumlah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) disesuaikan dengan target di RPJMD;
- c. Penambahan jumlah anggaran guna mendukung capaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy berupa pemberian air baku untuk beberapa daerah.
- b. Pelaksanaan kinerja ini juga didukung oleh keberhasilan output-output pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah, yaitu diantaranya adalah

Pembangunan SPAM Kecamatan Parigi sebanyak 98 unit, Kecamatan Cimerak 98 Unit, Kecamatan Padaherang 80 Unit, Kecamatan Kalipucang 148 Unit di Kabupaten Pangandaran.

### 5. Indeks Resiko Sanitasi

Nilai realisasi Indeks Risiko Sanitasi datanya diperoleh berdasarkan pendataan terhadap rumah tangga bersanitasi di wilayah Kabupaten Pangandaran yang berasal dari 3 (tiga) instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan data tersebut diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.42 Nilai IRS-Input Instrument BPS**

Nama Kecamatan	Genangan Air		Persampahan		PHBS		Air Limbah Domestik		Sumber Air Rumah Tangga		IRS	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
CIMERAK	4	4	45	45	36	10	59	58	31	31	35	30
CIJULANG	8	8	65	65	30	4	57	56	29	29	38	32
CIGUGUR	6	6	43	43	37	8	63	63	38	37	37	31
LANGKAP LANCAR	8	8	88	88	40	9	63	63	26	26	45	39
PARIGI	18	16	67	67	32	3	47	47	27	27	38	32
SIDAMULIH	12	12	43	43	28	1	44	44	17	17	29	23
PANGANDARAN	9	9	50	50	36	3	36	35	32	32	33	26
KALIPUCANG	28	28	66	66	36	15	51	51	32	31	42	38
PADAHERANG	16	16	96	96	33	4	46	46	32	32	45	39
MANGUNJAYA	13	13	71	71	34	-	65	64	20	20	41	34
<b>IRS KABUPATEN</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38,27</b>	<b>32,39</b>

Indeks Risiko Sanitasi diukur melalui kajian EHRA yaitu :

- a. Risiko Air Bersih, tersusun atas 3 sub-variabel, yaitu: Penggunaan sumber air terlindungi; Penggunaan sumber air yang tidak terlindungi; Kelangkaan air.
- b. Risiko Air Limbah Domestik, tersusun atas 3 sub-variabel, yaitu: Tanki septik suspek aman; Pencemaran karena pembuangan isi tanki septik; Pencemaran karena SPAL.
- c. Risiko Persampahan, tersusun atas 4 sub-variabel, yaitu: Pengelolaan sampah; Frekuensi pembuangan sampah; Ketepatan waktu pembuangan sampah; Pengolahan sampah setempat.
- d. Risiko Genangan Air, tersusun atas 1 sub-variabel yaitu genangan air.
- e. Risiko Perilaku Higiene dan Sanitasi tersusun atas 7 sub-variabel, yaitu: Cuci Tangan Pakai

Sabun di lima waktu penting; Kebersihan lantai dan dinding jamban; Keberadaan kecoa dan lalat dalam jamban; Keberfungsian penggelontor; Ketersediaan sabun dalam jamban; Pencemaran pada wadah penyimpanan air dan penanganan air; Perilaku Buang Air Besar yang berisiko pada kesehatan.

Berdasarkan data hasil kajian EHRA (Environmental Health Risk Assessment) tahun 2020 maka diperoleh data Indeks Risiko Sanitasi (IRS) sebesar 32,39. Pengukuran Indikator Indeks Risiko Sanitasi menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Untuk menghitung capaian realisasi Indeks Risiko Sanitasi digunakan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{32,39}{36} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

Artinya capaian dari indikator Indeks risiko sanitasi sudah mencapai target dan dikategorikan Baik.

**Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Indeks Resiko Sanitasi Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Percepatan / Perlambatan
2019	38	38,27%	0,27
2020	36	32,39%	4,39

Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indeks Resiko Sanitasi mengalami percepatan sebesar 6%, yaitu selisih percepatan antara tahun 2019 dengan percepatan tahun 2020. Artinya realisasi pada tahun 2020 mengalami percepatan capaian kinerja.

## 6. Indeks Resiko Bencana

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dapat dilihat dari Tabel 3.47 berikut:

**Tabel 3.44 Capaian Indeks Risiko Bencana**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Risiko Bencana	150,6	146,13 *	103,05
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				103,05

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2020 masih menggunakan data tahun 2019 sampai BNPB Mengeluarkan Data terbaru.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Indeks Risiko Bencana memiliki 1 indikator kinerja sasaran dengan indikator sasaran dengan mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 103,05% dikategorikan sangat baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

Penghitungan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dilakukan setiap tahun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pengkajian untuk setiap daerah dengan memperhatikan beberapa parameter yaitu tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas daerah dalam rangka mengurangi risiko bencana.

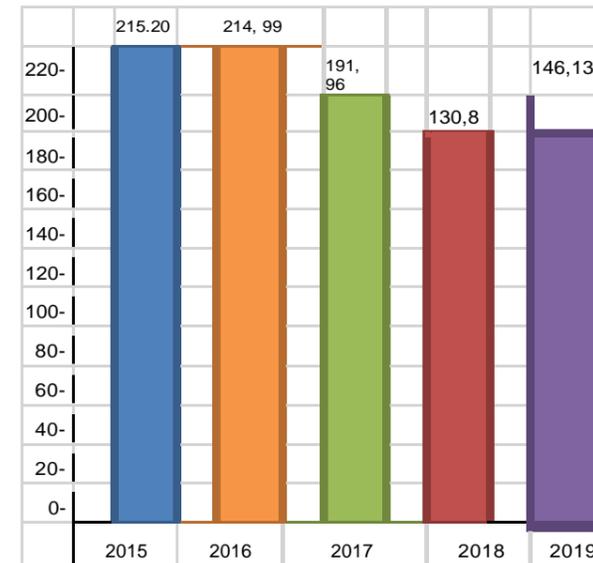
Untuk pengukuran Indikator Indeks Resiko Bencana Indonesia menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Pada tahun 2019 nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pangandaran sebesar 146,13. Capaian kinerja dari indikator Indeks Resiko Bencana adalah sebesar 103,05%. Angka tersebut didapat berdasarkan perhitungan dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 150,6, dengan formulasi sebagai berikut :

$$= 150,6/146,13 \times 100\%$$

$$= 103,05\%$$

Berdasarkan data IRBI, sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran selalu terdapat penurunan tiap tahunnya. Pencapaian penurunan indeks risiko bencana ini menandakan adanya : peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan daerah.

**Gambar 3.3**  
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran**



Jika dibandingkan dengan tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran dengan tahun lalu seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan / Perlambatan
2018	155	130,8	118,5%	24,2
2019	150,6	146,13	103,05%	4,47

Meskipun secara capaian telah mencapai melebihi target, namun pada tahun 2019 terdapat penurunan percepatan sebesar 19,73 (24,2 dikurangi 4,47) bila dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini akibat adanya penurunan dalam efektivitas mitigasi bencana yang dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan semua unit early warning system di beberapa titik guna memberikan kepastian bahwa setiap upaya mitigasi berbasis teknologi telah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut terdapat beberapa peralatan early warning system yang kurang atau bahkan tidak berfungsi dan memerlukan perbaikan sampai dengan penggantian alat.

Selanjutnya apabila capaian tahun 2019 sebesar 146,13 dibandingkan dengan target akhir sebesar 140, masih terdapat selisih sebesar 6,13 lagi. Maka diperlukan strategi yang tepat guna menurunkan nilai indeks risiko bencana sesuai dengan target periode RPJMD.

Gambaran Indeks Risiko Bencana di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.46 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**

KABUPATEN/KOTA	IRBI
Cirebon	160,90
Kota Bandung	150,80
Ciamis	150,72
Pangandaran	146,13
Cianjur	144,99
Tasikmalaya	142,11
Sukabumi	133,52
Garut	131,65
Subang	122,64
Karawang	122,64
Kota Cirebon	120,93
Indramayu	117,05
Majalengka	115,20
Sumedang	113,40
Bandung Barat	111,33
Kuningan	107,80
Kota Banjar	106,96
Purwakarta	96,60
Bogor	95,82
Bekasi	93,12
Kota Bekasi	92,12
Kota Cimahi	84,28
Bandung	83,82
Kota Tasikmalaya	83,44
Kota Sukabumi	80,08
Kota Depok	60,06
Kota Bogor	53,03

Berdasarkan data dari tabel Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 146,13 Hal ini menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu kabupaten yang memiliki Indeks Risiko Bencana dengan kategori sedang. Dapat diketahui pula bahwa Kabupaten Pangandaran menduduki urutan ke 4 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran termasuk kabupaten di Jawa Barat yang memiliki risiko bencana sedang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019 menargetkan penurunan indeks risiko bencana di setiap daerah sebesar 30%. Pada Tahun 2018, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran ada di angka 168,4, hal ini berarti harus ada penurunan sekitar 50,52 guna mencapai target BNPB sebesar 30% tersebut. Pada Tahun 2019, Indeks risiko bencana Kabupaten Pangandaran telah mengalami penurunan sebesar 22,27 atau 13,22% sehingga angka Indeks Risiko Kabupaten pangandaran Tahun 2019 menjadi sebesar 146,13.

Dari pemaparan diatas, maka pencapaian kinerja Kabupaten Pangandaran untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan membandingkan target nasional tahun 2019, target kinerja kabupaten pangandaran 150,6 dan target nasional BNPB 118,6 dengan persentasi yaitu mencapai 126,98%.

Beberapa faktor yang mendukung terhadap pencapaian melebihi target dalam penurunan indeks risiko bencana di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

- Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; Kabupaten Pangandaran telah melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan berbasis masyarakat melalui kegiatan pembentukan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM) Menuju Desa Tangguh Bencana sebanyak 18 FKDM.
- Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; Dalam hal ini, dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Pangandaran telah disusun dan diterapkan untuk berbagai keperluan perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
- Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; Dalam mengembangkan akses layanan sistem informasi yang terpadu, telah berdiri Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) di Kabupaten Pangandaran dengan mengintegrasikan berbagai software dan website guna penyebaran informasi secara cepat dan aktual.
- Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; Kawasan di pesisir Kabupaten Pangandaran merupakan daerah rawan bencana gelombang tsunami, oleh karena itu telah dilakukan pembuatan dan pemasangan beberapa unit Early Warning Sistem (EWS), jalur evakuasi beserta rambu-rambu evakuasi sebagai bentuk peringatan dini menghadapi bencana gelombang tsunami.
- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; Peningkatan efektivitas mitigasi bencana dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan semua unit early warning sistem di beberapa titik guna memberikan kepastian bahwa setiap upaya mitigasi berbasis teknologi telah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hal ini telah dilakukan melalui kegiatan latihan gabungan relawan penanggulangan bencana di

Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini merupakan sarana untuk berbagai ilmu mengenai kesiapsiagaan dan penanganan ketika bencana terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat dengan dibantu oleh relawan telah siap siaga menghadapi kemungkinan risiko bencana yang akan terjadi.

- Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Upaya untuk memulihkan daerah terdampak bencana di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan melalui kegiatan koordinasi antara berbagai stakeholder, dari mulai kegiatan pemulihan trauma korban terdampak bencana sampai pemulihan prasarana permukiman dan atau bantuan logistik bagi korban bencana.

### 7. Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi

**Tabel 3.47 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
1 Persentase sarana dan prasarana	Persen	22	11	52
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				52

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 11%. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:  
 Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{jumlah gedung kantor yang dibangun}}{\text{jumlah kebutuhan gedung kantor}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sampai dengan tahun 2018, jumlah gedung kantor yang dibangun adalah 3 gedung dan jumlah kebutuhan gedung kantor adalah 35 gedung. Selanjutnya pada tahun 2019 belum ada gedung yang dibangun, dan pada tahun 2020 baru melakukan pembangunan gedung kantor.

Pada tahun 2019 telah terjadi perlambatan sebesar 18%. Namun pada tahun 2020 malah sebaliknya terjadi percepatan sebesar 11%. artinya

pada tahun 2020 baru dilakukan pembangunan gedung kantor yaitu pembangunan gedung Setda dan Bappeda. Berdasarkan target akhir periode RPJMD, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 80%. Melihat total capaian saat ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, capaiannya masih jauh. Berdasarkan data kebutuhan gedung kantor pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa jumlah kebutuhan gedung kantor yaitu sebanyak 35 unit, sedangkan gedung kantor

**Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dan Prasarana Pusat Pemerintahan Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Percepatan / Perlambatan
2019	18	0	18%
2020	22	11	11%

yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 5 unit. Artinya masih terdapat 30 unit yang belum dibangun. 5 unit bangunan berarti capaiannya yaitu baru 11%, yang dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{35} \times 100\% \\ &= 11\% \end{aligned}$$

Capaian indikator kinerja sasaran untuk sarana dan prasarana pusat pemerintahan memang belum mencapai target dikarenakan :

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat melalui 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan dan jembatan dan Pariwisata. Sehingga untuk pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan dibangun bertahap dengan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED);
- Pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan baru akan dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2021 sesuai dengan rencana Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu akhir periode RPJMD tahun 2021.

### Misi 4: Memperkuat Ketahanan Nilai-nilai Kearifan Lokal

#### 4.1 Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu persentase pemajuan kebudayaan lokal. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.49 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dikembangkan	X 100%
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal	

Kinerja sasaran meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal dengan indikator persentase pemajuan kebudayaan lokal pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.50 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	50%	70%	60%	85,71	80%	62.50

Perhitungan persentase pemajuan kebudayaan lokal dihitung dari jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal yang dikembangkan dibagi dengan jumlah objek pemajuan kebudayaan lokal. Untuk memajukan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, diperlukan langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek pemajuan kebudayaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi: Tradisi lisan; Manuskrip; Adat istiadat; Permainan rakyat; Olahraga tradisional; Pengetahuan tradisional; Teknologi tradisional; Seni; Bahasa; Ritus.

Dari target sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut di atas, pada tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan pengembangan dan penanganan 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan. Berikut 6 (enam) objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Pangandaran:

1. Ritus seperti pada proses karasemen adat pada kegiatan Hajat Laut yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muhharam;
2. Seni seperti tarian Ronggeng yang dipentaskan pada acara Karnaval Seni Budaya dan Kegiatan di Ruang Publik;
3. Tradisi Lisan seperti cerita tentang Nyai Rengganis yang dilakukan sebelum pementasan tari ronggeng dimulai (dalam penyampaian sinopsis);
4. Pengetahuan Tradisional seperti ketika Karnaval Budaya ada pagelaran busana;
5. Permainan Tradisional seperti Permainan Layang-layang ketika pelaksanaan event *Kite Festival* dan pengenalan permainan tradisional kepada Finalis Mojang Jajaka (MOKA) Kabupaten Pangandaran untuk dapat disosialisasikan kepada anak-anak sekolah ketika mereka melakukan kegiatan *MOKA Goes to School*.
6. Manuskrip seperti di Kecamatan Cijulang (bulan Muharam) oleh tokoh masyarakat/adat dilaksanakan tradisi ngabuku tahun dimana kegiatan membaca manuskrip yang disebut Purwaning Jagat.

Dengan realisasi tersebut capaian kinerja persentase pemajuan kebudayaan lokal masuk ke dalam kategori tinggi. Pada tahun 2018 ada 2 obyek pemajuan kebudayaan yang sudah ditangani atau dimajukan secara langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah Seni dan Ritus, terdapat kenaikan atau percepatan pencapaian kinerja sebanyak 3 objek pemajuan kebudayaan tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 1 objek yaitu manuskrip yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Cijulang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam hal ini membantu menginventarisasi dan mentransliterasi naskah kuno ke dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 2020 setelah pada bulan Maret diumumkan tentang Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia banyak hal yang direfocusing dan banyak kegiatan yang dibatasai, hal tersebut juga berpengaruh pada capaian kinerja sasaran strategis 2 yakni persentase objek pemajuan kebudayaan lokal. Sehingga pada tahun 2020 objek pemajuan yang dikembangkan yakni hanya manuskrip.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebanyak 80% pemajuan kebudayaan maka masih ada 20% atau 2 objek pemajuan yang harus ditangani dan dikembangkan.

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian target tahun 2020 antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang mengharuskan semua kalangan untuk membatasi kegiatan berkerumun sehingga banyak kegiatan kebudayaan yang dibatalkan;
2. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk menginventarisasi dan mengklasifikasikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten; Beberapa faktor pendukung untuk mencapai target akhir RPJMD antara lain:
  1. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran yang masih memegang teguh tradisi, adat istiadat dan budaya lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
  2. Para pelaku budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran banyak yang masih hidup sehingga masih dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya;
  3. Generasi muda mulai banyak yang peduli dan menggali serta mau mempelajari seni dan budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran. Mereka secara perlahan dapat mengapresiasi seni dan kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Untuk mendukung sasaran 2 Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Lokal terdapat 3 program pendukungnya, yaitu:

1. Program Pelindungan Kebudayaan Lokal mendapatkan pagu 4,59% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dengan focus pendataan dan inventarisasi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang di data setiap Tahun.
2. Program Pengembangan Kebudayaan Lokal mendapatkan pagu 16,52% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Pengayaan Keberagaman Kebudayaan Lokal mendapatkan persentase terbesar yang didalamnya meruapakan pembelian alat musik.
3. Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal mendapatkan pagu sebesar 78,89% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 2. Kegiatan Diplomasi kebudayaan mendapatkan persentase terbesar dalam rangka penyebaran kebudayaan di setiap kecamatan.

**Table 3.51 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Prosentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi	Program Pelindungan Kebudayaan Lokal	Rp 34.800.000,00
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	Rp 125.318.800,00
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dimanfaatkan	Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal	Rp 598.280.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

#### 4.2 Persentase Skala Sikap Peserta Didik yang Berkepribadian Baik

Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik yang berkepribadian baik}}{\text{Jumlah Seluruh peserta didik}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

Data diambil dari Laporan Pendidikan (raport) peserta didik dari setiap sekolah yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan data dilakukan oleh koordinator wilayah kecamatan masing - masing untuk SD, sedangkan untuk SMP pengumpulan data dilakukan oleh kepala sekolah masing – masing dengan cara mengirimkan data Nilai Sikap Peserta Didik yang berkepribadian Baik ke Disdikpora dalam periode setiap akhir semester.

**Tabel 3.52 Rekap Data Nilai Sikap Peserta Didik**

NO	Kecamatan	Jumlah Siswa		Nilai Sikap					
		SD	SMP	SD			SMP		
				A	B	C	A	B	C
1	PARIGI	3.542	2.119	777	2.312	453	224	1229	666
2	CIJULANG	2.314	571	232	1.872	210	22	360	189
3	CIMERAK	3.761	1.204	721	2.063	977	205	798	201
4	CIGUGUR	1.395	372	386	887	122	75	198	99
5	LANGKAPLANCAR	3.903	1.405	812	2.877	214	111	889	405
6	MANGUNJAYA	1.992	925	810	992	190	175	539	211
7	PADAHERANG	5.116	2.749	995	3.166	955	263	2058	428
8	KALIPUCANG	3.123	1.282	956	1.871	296	198	883	201
9	PANGANDARAN	4.435	1.958	1.276	2.738	421	124	1230	604
10	SIDAMULIH	2.343	1.061	419	1.658	266	88	798	175
<b>JUMLAH</b>		<b>31.924</b>	<b>13.646</b>	<b>7.384</b>	<b>20.436</b>	<b>4.104</b>	<b>1.485</b>	<b>8.982</b>	<b>3.179</b>

Ket: A: sangat Baik, B: Baik, C: Cukup Baik Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah peserta didik yang berkepribadian sangat baik dan baik = 38.287, Jumlah seluruh peserta didik = 45.570.

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Presentase Nilai Sikap berkepribadian baik

$$= \frac{\text{Jumlah peserta didik yang berkepribadian baik}}{\text{Jumlah Seluruh peserta didik}} \times 100\%$$

$$= \frac{38.287}{45.570} \times 100\%$$

$$= 84,02\%$$

$$= 84\%$$

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja tercapai yaitu 84% dari target 85% atau dengan capaian 98,82%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{84}{85} \times 100\% \\ &= 98,82\% \end{aligned}$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2020 yaitu sebesar 98,82%.

1. Analisa Capaian

a. Hasil Perhitungan Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja Tahun 2020 dikatakan kurang berhasil yakni 98,82% yang disebabkan adanya pandemi covid yang melanda di Kabupaten pangandaran sehingga peserta didik tidak melakukan pembelajaran

tatap muka di sekolah melainkan pembelajaran jarak jauh (daring). Maka dari itu pembelajaran kurang efektif sehingga target tidak tercapai.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

**Tabel. 3.53 Capaian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019	Capaian Kinerja 2019
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	75%	83%	110,67 %

**Tabel. 3.54 Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2020
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	85%	84%	98,82

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2020 mengalami perlambatan dari Tahun 2019 sebesar 110,67% sedangkan Tahun 2020 sebesar 98,82% sehingga terdapat perlambatan sebesar 11,85% Faktor Pendukung Perlambatan Tingkatan Capaian Kinerja. Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia sehingga peserta didik tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan di sekolah melainkan pembelajaran jarak jauh (daring). Maka dari itu pembelajaran kurang efektif sehingga target tidak tercapai.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Periode akhir RPJM

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 90% maka dengan realisasi kinerja 84% kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 93,33% sehingga untuk mencapai 100% tersisa 6,67%.

3. Faktor Penyebab Kegagalan

Adanya pandemi covid-19 yang melanda di dunia sehingga peserta didik tidak melakukan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan di sekolah melainkan pembelajaran jarak jauh (daring). Maka dari itu pembelajaran kurang efektif sehingga target tidak tercapai.

**Tabel 3.55 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja 2020	Target Periode akhir RPJM	Capaian Kinerja Terhadap Akhir RPJM (%)
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	85	84	90	93,33

4. Hal – hal yang masih perlu ditingkatkan: Melakukan pengadaan alat sarana dan prasarana untuk memaksimalkan proses pembelajaran secara daring

5. Efektivitas dan Efisiensi

a. Perhitungan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik mempunyai Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 11.644.566.810, realisasi anggaran Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.10.658.875.000,

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{10.658.875.000}{11.644.566.810} \times 100 \\ &= 91,54\% \end{aligned}$$

b. Sisa Pagu Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp. 11.644.566.810} - \text{Rp. 10.658.875.000} \\ &= \text{Rp. 985.691.810,00} \end{aligned}$$

c. Analisa Efektifitas dan Efisiensi

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki sisa anggaran sebesar Rp. 985.691.810.

Pada Anggaran 2019 pagu anggaran untuk sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik memiliki Pagu Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.12.957.276.250., realisasi anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.4.482.511.500,

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{4.482.511.500}{12.957.276.250} \times 100 \\ &= 34,59\% \end{aligned}$$

Sehingga :

$$\begin{aligned} \text{Sisa Pagu Anggaran} &= \text{pagu anggaran} - \text{realisasi} \\ &= \text{Rp.12.957.276.250} - \text{Rp.4.482.511.500} \\ &= \text{Rp.8.474.764.750,} \end{aligned}$$

Pada sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik tidak mencapai target yaitu 84% dari target 85% dengan capaian kinerja sebesar 98,82% dan memiliki tingkat capaian realisasi anggaran 91,54% dengan Sisa Pagu Anggaran Rp. 985.691.810, maka dari itu dapat dikatakan bahwa sasaran Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik yaitu tidak efektif dan tidak efisien.

**4.3 Angka Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan**

Nilai realisasi konflik suku, agama, ras, dan antar golongan diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 - (0 - 10)}{10} \times 100\% = 100\%$$

Untuk pengukuran Indikator Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

**Tabel 3.56 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Kesatuan Bangsa**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
1 Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	10	0	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran sepanjang tahun 2020 tidak terjadi konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan.

**Tabel 3.57 Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator	Target 2019	Target 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2018	% Capaian
1	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	11	12	1	1	100%

Dilihat dari tabel 3.63 di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator angka konflik suku, agama, ras dan antar golongan dapat dijelaskan bahwa Jumlah kejadian konflik dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2019 dibanding tahun 2018 adalah sama yaitu sebesar 100 %.

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8, berarti target akhir RPJMD sudah terlampaui karena untuk pengukuran Indikator ini menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Faktor Pendukung keberhasilan dari indikator Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yaitu : Adanya kegiatan Muspika serta Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, kerjasama antar anggota Tim melakukan cegah dini sehingga konflik tidak terjadi. Jikalau pun terjadi konflik dilakukan penanganan sehingga konflik tidak berkembang.

**4.4 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

**Tabel 3.58 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
1 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	81%		
• Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persen		82,08	
• Pemilu Legislatif (DPRD) Kabupaten	Persen		82,13	
• Pemilu DPD	Persen		82,01	
• Pemilu DPR RI	Persen		82,19	
• Pemilu DPRD Provinsi	Persen		82,08	
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen		82,10	
Rata-Rata Capaian Kinerja				101,36%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi memiliki 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101,36%. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, nilai realisasi capaian diperoleh dari Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Pangandaran dengan data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Menyalurkan Hak Pilih (PWP, DP)}}{\text{Jumlah Seluruh Masyarakat Yang Memiliki Hak}}$$

$$\text{Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam} \\ \frac{1.331.437}{1.621.710} \times 100\% = 82,10 \%$$

2. Capaian Kinerja  
Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dari indikator Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi yaitu :

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{82,10}{81} \times 100\% \\ = 101,36\%$$

**Tabel 3.59 Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator	Target 2019	Target 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2018	% Capaian
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	81%	80,5%	82,10	79,04	103,87%

Dilihat dari tabel di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Hak pilih dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2019 dibanding tahun 2018 terjadi peningkatan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi diantaranya :

1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak pilih
2. Kinerja pelaksana yang maksimal dari tingkat Kabupaten sampai dengan PPS

Dilihat dari tabel di atas maka hasil analisis pencapaian sasaran dari indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Hak pilih dilihat dari realisasi kinerja ditahun 2019 dibanding tahun 2018 terjadi peningkatan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi diantaranya :

1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak pilih
2. Kinerja pelaksana yang maksimal dari tingkat Kabupaten sampai dengan PPS

**Misi 5 Membangun Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing**

**5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan IPM

Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan sebesar 0,22 persen, dari capaian IPM tahun 2019, hal ini menunjukkan penurunan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran mengalami sedikit penurunan. Apabila dilihat dari target akhir RPJMD sebesar 68,78 masih terdapat selisih sebesar 0,72. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan diperlihatkan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan indeks komponennya dengan menggunakan Laju Pertumbuhan. Dengan melihat Tabel di bawah, tampak bahwa kinerja perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2020 minus sebesar 0,22 persen. Namun terdapat kenaikan untuk Pertumbuhan Indeks Kesehatan sebesar 0,55 persen, Pertumbuhan Indeks Pendidikan (IP) sebesar 0,44 persen. Sedangkan Pertumbuhan Indeks Daya Beli minus sebesar 1,64 persen. Pertumbuhan Indeks Daya Beli menjadi yang tertinggi diantara indeks lainnya. Hal ini selaras dengan penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020. Dengan demikian, tantangan bagi masing-masing daerah adalah bagaimana cara memaksimalkan nilai laju pertumbuhan IPM (mendekatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh sedekat-dekatnya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia ideal).

**Tabel 3.60 Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran dan Komponennya Tahun 2018-2020**

No	Uraian	Periode Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	66,60	67,44	68,21	68,06
2	Indeks Pendidikan (IP)	57,98	58,71	59,07	59,33
3	Indeks Kesehatan (IK)	77,78	78,22	78,65	79,08
4	Indeks Daya Beli (IDB)	65,48	66,81	68,32	67,20
5	Pertumbuhan IPM (%)		1,26	1,16	-0,22
6	Pertumbuhan IP (%)		1,26	0,62	0,44
7	Pertumbuhan IK (%)		0,57	0,55	0,55
8	Pertumbuhan IDB (%)		2,03	2,31	-1,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2020

Dengan melihat kinerja perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran tersebut, dengan situasi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian di daerah.

Program-program yang berhubungan dengan bidang pendidikan juga masih perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan program penyeteraan/kejar paket A/B/C, meminimalisir angka drop out sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan meningkatkan angka kelulusan siswa di setiap jenjang sehingga nantinya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komponen daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan. Permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Tentunya hal itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan kemudahan dalam hal akses ke pusat-pusat ekonomi, peningkatan kapasitas agar kemampuan ekonomi mereka meningkat juga pengendalian inflasi daerah agar harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah harus tepat dalam memberikan intervensi program kepada masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak meninabobokan masyarakat tapi membangun kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas ekonomi mereka sendiri.

Apalagi usia Kabupaten Pangandaran yang baru 8 (delapan) tahun sejak dimekarkan dari kabupaten induknya, sehingga terus berupaya membuat program pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

## 5.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ditargetkan 0,57% namun terealisasi 0,55% dengan pencapaian 103,63%. Nilai ini diperoleh dengan formula:

$\text{Nilai Target} \times 100\%$

Nilai Realisasi

$= 0,57/0,55 \times 100\%$

$= 103,63\%$

Nilai perolehan realisasi sebesar 0,55% dihitung dengan cara :

$$\text{LPP} = \frac{\text{Jml Penduduk 2020} - \text{Jml Penduduk 2019}}{\text{Jml Penduduk 2019}} \times 100$$

$$\text{LPP} = \frac{401493 - 399284}{401493} = 0,55\%$$

### Keterangan :

- Jumlah Penduduk tahun 2019 sebanyak 399.284 jiwa;
- Jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 401.493 jiwa.

Data tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari **Badan Pusat Statistik (BPS)**. Akan tetapi secara tupoksi realisasi target diatas dapat dicapai melalui : Pencapaian Akseptor Baru yakni sebesar **9.562 akseptor** dari **target 12.786 Akseptor (74,78%)**. Pengendalian DO (Droup Out) masih dalam batas toleransi sebesar **10%** dengan Realisasi sebesar **4,67% (semakin kecil artinya semakin baik)**. Dan yang terakhir pencapaian penggunaan alat kontrasepsi (Akseptor Aktif) sebanyak **75,94%** dari target **61,04% (target yang ditentukan oleh Provinsi)**.

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis perlu adanya perbandingan dengan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja tahun berjalan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 61 Perbandingan LPP dengan tahun 2019**

No	Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,53%	0,55%

Adapun faktor yang mempengaruhi ketercapaian target Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Untuk Sasaran yang pertama yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diketahui hasil daripada penilaian AKIP OPD (2019) mendapatkan Nilai BB dengan bobot 70,78% sedangkan pada tahun 2020 DKBP3A mendapatkan Nilai A dengan bobot 88,29%;
2. Untuk Sasaran yang kedua yakni Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 0,57% terrealisasi 0,53% (pada Tahun 2019) dengan pencapaian 107,55%. Data tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pada tahun 2020 memiliki target sebesar 0,57% dengan realisasi 0,55% (Sumber Data : BPS). Dan secara tufoksi pencapaian penggunaan alat kontrasepsi (akseptor aktif) pada tahun 2019 s/d 2020 mengalami penurunan yakni dari 76,75% menjadi 75,94% atau sebesar 0,81%. Faktor Lain yang mempengaruhi kenaikan jumlah Penduduk di kabupaten Pangandaran diantaranya adalah meningkatnya jumlah migrasi penduduk dari luar yang masuk ke Kabupaten Pangandaran;

3. Untuk Sasaran yang ketiga yakni Indeks Pemberdayaan Gender dengan target 65,67 terrealisasi 69,20 (pada tahun 2019/Data yg digunakan adalah kondisi 2018) dengan pencapaian 105,4%. Data tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan pada tahun 2020 memiliki target 66,55% dengan pencapaian yang sama (masih pada angka 69,20) hal ini dikarenakan hasil untuk tahun 2019 dan 2020 masih belum dapat diketahui (Sumber Data : BPS).

**Tabel 3.62 Perbandingan LPP dengan Target Akhir RPJMD**

No	Sasaran	Reliasasi s/ d th 2020	Target jangka menengah
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,55%	0,57%

Jika dilihat dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa pencapaian dari target yang ditetapkan dalam target Jangka Menengah dapat dikatakan mendapat Kategori "Sangat Baik" karena jika kita rata-ratakan dari ketiga sasaran diatas memiliki capaian diatas 102,54% (menurut kategori Capaian yang ditetapkan). Hal ini dapat diperoleh dengan adanya kenaikan pada indikator-indikator yang mendukung terhadap ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan seperti yang telah diurai dan dijelaskan pada sub judul "Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020" diatas.

**Tabel 3.63 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Gender**

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,57%	0,55%	103,63%
2	Meningkatnya kesetaraan gender	66,55	69,20	103,98%

Diketahui penambahan jiwa selama 2020 yakni 2.209 jiwa. Jadi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2020 adalah Penambahan penduduk di tahun 2020 sebesar 2.209 jiwa dibagi Jumlah penduduk 2020 sebanyak 401.493 jiwa dikali 100 = **0,55%**.

**Tabel 3.64 Akseptor KB**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA	
		TARGET	REALISASI		
1	Capaian Akseptor Baru	Akseptor	12.786	9.562	74,78%
2	Cakupan Pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB Aktif /CPR	Persen	61,04	75,94	124,41%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				99,59%	

Sumber Data : DKBP3A Kab. Pangandaran

Cara menghitung dari indikator diatas dapat diketahui melalui; Capaian Akseptor Baru: Jumlah target peserta KB baru dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun berkenaan. Cakupan pasangan Usia subur peserta KB Aktif /CPR: Jumlah target peserta KB Aktif dibandingkan dengan Cakupan pasangan usia subur/CPR.

Gambaran capaian Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.65 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

No.	Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			Persentase LPP
		2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Jawa Barat	49.935.858	49.316.712	48.683.861	1,24
2	Bogor	6.088.233	5.965.410	5.840.907	2,02
3	Sukabumi	2.470.219	2.466.272	2.460.693	0,16
4	Cianjur	2.264.328	2.263.072	2.260.620	0,06
5	Bandung	3.831.505	3.775.279	3.717.291	1,47
6	Garut	2.636.637	2.622.425	2.606.399	0,54
7	Tasikmalaya	1.755.710	1.754.128	1.751.295	0,09
8	Ciamis	1.201.685	1.195.176	1.188.629	0,54
9	Kuningan	1.087.105	1.080.804	1.074.497	0,58
10	Cirebon	2.209.633	2.192.903	2.176.213	0,76
11	Majalengka	1.210.709	1.205.034	1.199.300	0,47
12	Sumedang	1.154.428	1.152.400	1.149.906	0,18
13	Indramayu	1.737.624	1.728.469	1.719.187	0,53
14	Subang	1.612.576	1.595.825	1.579.018	1,04
15	Purwakarta	971.889	962.893	953.414	0,93
16	Karawang	2.370.488	2.353.915	2.336.009	0,70
17	Bekasi	3.899.017	3.763.886	3.630.907	3,47
18	Bandung Barat	1.714.982	1.699.896	1.683.711	0,88
19	Pangandaran	401.493	399.284	397.187	0,55
20	Kota Bogor	1.126.927	1.112.081	1.096.828	1,32
21	Kota Sukabumi	330.691	328.680	326.282	0,61
22	Kota Bandung	2.510.103	2.507.888	2.503.708	0,09
23	Kota Cirebon	322.322	319.312	316.277	0,93
24	Kota Bekasi	3.075.690	3.003.923	2.931.897	2,33
25	Kota Depok	2.484.186	2.406.826	2.330.333	3,11
26	Kota Cimahi	620.393	614.304	607.811	0,98
27	Kota Tasikmalaya	663.986	663.517	662.723	0,07
28	Kota Banjar	183.299	183.110	182.819	0,10

Dari 2 indikator pendukung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tersebut diperoleh rata-rata Capaian Kinerja sebesar 99,59%. Bila melihat rata-rata pencapaian meskipun dibawah 100%, akan tetapi prosentase pasangan usia subur (PUS) yg menjadi peserta KB aktif berhasil tercapai sebesar 75,94% dari target 61,04%. Adapun faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Kepala Daerah terhadap Program DKBP3A di Kab. Pangandaran sesuai dengan Misi 5 yakni "Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing";
2. Dukungan sarana prasarana cukup memadai baik dari Tk. Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten;
3. Mitra kerja dengan lintas sektoral dan Institusi Masyarakat Pedesaan sangat baik;
4. Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Program KB sangat tinggi.

### 5.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Sasaran yang terakhir yakni Meningkatkan kesetaraan gender dengan target 66,55 terrealisasi 69,20 dengan pencapaian 103,98%. Data tersebut diperoleh dari **Badan Pusat Statistik (BPS)**. Akan tetapi secara tufoksi realisasi target diatas dapat dicapai melalui : Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif sebanyak 9 orang (*Sumber Data : KPUD Kab. Pangandaran*) atau sekitar 22,5% dari total 40 orang. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, setidaknya ada 30% keterwakilan Perempuan dari total keseluruhan anggota Legislatif. Yang kedua yakni tenaga perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 42,50% (*Sumber Data : BPS*); dan yang terakhir yakni Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 35,51% (*Sumber Data : BPS*).

Gambaran capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel 3.71

### 5.4 Indeks Pembangunan Kepemudaan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga memiliki 2 indikator kinerja sasaran dengan rincian: indikator sasaran Indeks Pembangunan Kepemudaan dengan realisasi yaitu sebesar 0,55 telah memenuhi target dari 0,26 sehingga memperoleh capaian kinerja 211,54% dan indikator sasaran Indeks Pembangunan Keolahragaan yaitu sebesar 0,73 tidak memenuhi target dari 0,80 sehingga memperoleh capaian kinerja 91,25%.

Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Perhitungan realisasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Kepemudaan, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula:  

$$IPP = 0,34 (\text{Indeks Pendidikan}) + 0,34 (\text{Indeks Kelayakan Hidup}) + 0,2 (\text{Indeks Kesehatan}) + 0,12 (\text{Indeks Partisipasi Pemuda})$$
 Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh informasi sebagai berikut :

**Tabel 3.66 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat , 2016 – 2018**

No.	Wilayah Jawa Barat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota		
		2018	2017	2016
1	2	3	4	5
1	Provinsi Jawa Barat	70,20	70,04	71,15
2	Bogor	56,64	57,10	-
3	Sukabumi	53,07	58,33	-
4	Cianjur	60,36	55,95	-
5	Bandung	72,40	76,50	-
6	Garut	64,67	-	-
7	Tasikmalaya	63,15	63,04	-
8	Ciamis	64,54	63,67	-
9	Kuningan	73,05	72,39	-
10	Cirebon	72,39	74,27	-
11	Majalengka	61,67	59,15	-
12	Sumedang	70,57	68,08	-
13	Indramayu	61,12	58,94	-
14	Subang	68,81	65,90	-
15	Purwakarta	72,04	72,25	-
16	Karawang	68,52	68,08	-
17	Bekasi	57,02	57,16	-
18	Bandung Barat	62,71	53,98	-
19	Pangandaran	69,20	65,45	-
20	Kota Bogor	62,04	67,37	-
21	Kota Sukabumi	59,55	60,20	-
22	Kota Bandung	63,63	58,84	-
23	Kota Cirebon	73,97	74,23	-
24	Kota Bekasi	65,96	65,68	-
25	Kota Depok	81,49	81,40	-
26	Kota Cimahi	77,21	76,97	-
27	Kota Tasikmalaya	62,92	63,50	-
28	Kota Banjar	53,80	47,96	-

2. Indeks Pendidikan = 59,33 dikonversi dalam skala 1 menjadi 0,59 (merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Indeks Kelayakan Hidup= 0,285, Indeks Kesehatan=79,08 dikonversi dalam skala 1 menjadi 0,79 (merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Indeks Partisipasi Pemuda = 0,84. Selanjutnya diperoleh hasil perhitungan IPP sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 IPP &= 0,34 (0,59) + 0,34 (0,285) + 0,2 (0,79) \\
 &+ 0,12 (0,84) \\
 &= 0,2 + 0,09 + 0,16 + 0,1 \\
 &= 0,55 \text{ dikonversi dalam skala 100 menjadi } 55.
 \end{aligned}$$

Uraian data perhitungan unsur untuk Indeks Pembangunan Kepemudaan, diperoleh sebagai berikut:

- a. Indeks Pendidikan  
Data diperoleh dari BPS Kabupaten Ciamis yaitu sebesar 59,33
- b. Indeks Kelayakan Hidup  
Indek Kelayakan Hidup terdiri dari 3 dimensi yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pemuda Miskin.  
Dimensi Tingkat Pengangguran terbuka Usia Pemuda yaitu 11,84 dikonversi dalam skala 1 = 0,12

**Tabel 3.67 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAI AN KINER JA
		TAR GET	REALI SASI	
1 Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,26	0,55	211,54
2 Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,80	0,73	91,25
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.usaha dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan.usaha dan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan atau usaha, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kontek ini yaitu tingkat pengangguran terbuka usia pemuda.

Penduduk Pemuda menurut Undang – Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia dari 16 (enam belas) samapai 30 (tiga puluh) tahun. Di bawah ini terdapat data penduduk menurut usia bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan seberapa banyak penduduk pemuda yang ada di kabupaten Pangandaran.

**Tabel 3.68 Jumlah Penduduk Menurut Usia Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 16 – 30 TAHUN (JIWA)
1	PARIGI	9.664
2	CIJULANG	5.530
3	CIMERAK	10.254
4	CIGUGUR	5.090
5	LANGKAPLANCAR	11.717
6	MANGUNJAYA	7.507
7	PADAHERANG	15.436
8	KALIPUCANG	8.703
9	PANGANDARAN	13.367
10	SIDAMULIH	6.046
<b>JUMLAH</b>		<b>93.314</b>

Dari tabel diatas dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk pemuda sebanyak 93.314 orang.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Pemuda} &= \frac{\text{Jumlah Pemuda Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja pemuda}} \times 100 \\
 &= \frac{7.832}{66.124} \times 100 \\
 &= 11,84
 \end{aligned}$$

dikonversi dalam skala 1 = 0,12  
 Jumlah Pemuda Pengangguran diperoleh dari angkatan kerja usia pemuda dikurangi pemuda yang bekerja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia dan tabel Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia, sebagai berikut:

**Tabel 3. 69 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia**

Usia	Penduduk Angkatan Kerja
15-19	9.224
20-24	17.942
25-29	18.855
30-34	20.103
35-39	23.691
40-44	25.868
45-49	28.890
50-54	26.255
55-59	22.921
60-64	17.719
65+	22.535
<b>Jumlah</b>	<b>234.003</b>

Dari tabel diatas yang termasuk angkatan kerja usia pemuda yaitu dari usia 15 – 34 tahun, maka dapat diperoleh partisipasi angkatan kerja usia pemuda sebanyak 66.124 orang. Untuk memperoleh data jumlah penduduk yang bekerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.70 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Usia**

Usia	Penduduk Yang Bekerja
15-19	7.069
20-24	15.143
25-29	16.920
30-34	19.160
35-39	23.252
40-44	25.868
45-49	27.954
50-54	25.371
55-59	22.727
60-64	17.719
65+	22.334
<b>Jumlah</b>	<b>223.517</b>

Sumber : Buku Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat-BPS, 2019

Dari tabel diatas yang termasuk penduduk pemuda yang bekerja yaitu dari usia 15 – 34 tahun, maka dapat diperoleh penduduk pemuda yang bekerja sebanyak 58.292 orang.

Setelah diperoleh kedua data yaitu partisipasi angkatan kerja usia pemuda sebanyak 66.124 orang dan jumlah penduduk pemuda yang bekerja sebanyak 58.292 orang, maka dapat dihitung jumlah pemuda pengangguran sebagai berikut:

Jumlah Pemuda Pengangguran = angkatan kerja usia pemuda – pemuda yang bekerja  
 = 66.124 - 58.292  
 = 7.832

1) Dimensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia Pemuda yaitu = 80,49 dikonversi dalam skala 1 = 0,8

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah presentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam konteks ini yaitu tingkat pengangguran terbuka usia pemuda.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Usia Pemuda

$$= \frac{\text{jumlah angkatan kerja pemuda}}{\text{Jumlah penduduk usia pemuda}} \times 100$$

$$= \frac{66.124}{93.314} \times 100$$

$$= 70,86$$

$$= 70,86$$

dikonversi dalam skala 1 = 0,71

Jumlah angkatan kerja pemuda dapat dilihat pada tabel Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Usia yaitu sebanyak 66.124 sedangkan Penduduk usia pemuda dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 93.314.

2) Dimensi Tingkat Pemuda Miskin yaitu 11,84 dikonversi dalam skala 1 = 0,12  
 Tingkat Pemuda Miskin diasumsikan pada Tingkat Pengangguran terbuka Usia Pemuda. Sehingga Tingkat Pemuda Miskin sama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Pemuda.

Selanjutnya dihitung Indeks Kelayakan Hidup sebagai berikut :

Indeks Kelayakan Hidup =  
 0,31 (Tingkat Pengangguran terbuka) + 0,28 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) + 0,41 (Tingkat Pemuda Miskin) = 0,31 (0,12) + 0,28 (0,71) + 0,41 (0,12)  
 = 0,037 + 0,199 + 0,0 = 0,285

Indeks Kesehatan

Data diperoleh dari BPS Kabupaten Ciamis tahun 2019 yaitu sebesar 78,65.

#### Indeks Partisipasi Pemuda

Indeks Partisipasi Pemuda diperoleh melalui formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Pemuda} = \frac{\text{TPP} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$$

TPP yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda pada Organisasi Kepemudaan / Masyarakat dengan formula:

$$\text{TPP} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}}$$

Untuk memperoleh data jumlah pemuda yang aktif berorganisasi diperoleh data dari KNPI Kabupaten Pangandaran, Karang Taruna Kabupaten Pangandaran, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Tabel 3.71 Data Pemuda yang Aktif Berorganisasi**

NO	ORGANISASI	JUMLAH ORANG
1	KNPI	3.500
2	Karang Taruna	27.900
3	Forum Remaja Palang Merah Indonesia	16.350
4	Kwartir Cabang Pramuka	30.690
	<b>JUMLAH</b>	<b>78.440</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah yang aktif berorganisasi sebanyak 78.440 orang. Untuk memperoleh nilai Jumlah Penduduk Pemuda

dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 93.314

Setelah diperoleh kedua data yaitu jumlah pemuda yang aktif berorganisasi sebanyak 78.440 orang dan jumlah penduduk pemuda sebanyak 93.314 orang, maka dapat dihitung TPP sebagai berikut :

$$\text{TPP} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi}}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}} \times 100$$

$$= \frac{78.440}{93.314} \times 100$$

$$= 84,06\% = 84\%$$

$$= 84,06\% = 84\%$$

Dengan demikian dapat dihitung Indeks Partisipasi Pemuda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Partisipasi Pemuda} &= \frac{\text{TPP} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}} \\ &= \frac{84 - 0}{100 - 0} \\ &= \frac{84}{100} \\ &= 0,84 \end{aligned}$$

Keterangan: nilai Mak yaitu 100 dan min yaitu 0 bersumber dari KEMENPORA.

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja tercapai yaitu 0,55 dari target 0,26 atau dengan capaian 207,69%.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capain} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ &= \frac{0,55}{0,26} \times 100 \\ &= 211,54\% \end{aligned}$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2020 yaitu sebesar 211,54%

#### 1. Analisa Capaian

##### a. Hasil Perhitungan Capaian Kinerja

Dari pehitungan tingkat capaian kinerja diatas untuk Tahun 2020 dikatakan berhasil, dikarenakan memiliki tingkat capain kinerja 211,54%

##### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

**Tabel 3.72 Indeks Pembangunan Kepemudaan 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2020
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,26	0,55	211,54%

**Tabel 3.73 Indeks Pembangunan Kepemudaan 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019	Capaian Kinerja 2019
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,25	0,539	215,6%

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2020 mengalami perlambatan dari Tahun 2019 sebesar 215,6% sedangkan Tahun 2020 sebesar 211,54% sehingga terdapat perlambatan sebesar 4,06%

c. Faktor Pendukung Perlambatan Tingkatan Capaian Kinerja: Adanya pandemi Covid.

**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Periode akhir RPJM**

**Tabel 3.74 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Periode akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indiaor Kinerja Utama	Target	Realisasi nerja 2020	Target Periode akhir RPJM	Capaian Kinerja Terhadap Akhir RPJM (%)
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,26	0,55	0,27	203,7

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 0,27 maka dengan realisasi kinerja 0,55 kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 203,7% sehingga telah melebihi 100% yaitu sebesar 103,7%.

d. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan:

Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal di antaranya :

1. Adanya kenaikan indeks kesehatan yang dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu lingkungan, prilaku masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.
2. Adanya kenaikan Indek Pendidikan dengan adanya Program Pangandaran Hebat
3. Adanya Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan kegiatan yang mendukung Indeks Pembungnan Pemuda

4. Adanya Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang mendukung Indeks Kelayakan Hidup

Hal – hal yang masih perlu ditingkatkan atas pendukung keberhasilan:

Kedepan seyogyanya ada koordinasi dengan SKPD lain yang berkaitan erat dengan kepemudaan misalnya dengan Disnakertrans, KB, DISDAGKOPUMKM, Dinas Kesehatan.

#### 5.5 Indeks Pembangunan Keolahragaan

Indeks Pembangunan Keolahragaan, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula: Perhitungan realisasi capaian kinerja:

$$IPK = 0,25 (\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan}) + 0,25 (\text{Indeks Ruang Terbuka}) + 0,25 (\text{Indeks Kebugaran}) + 0,25 (\text{Indeks SDM})$$

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan} = 0,76$$

$$\text{Indeks Ruang Terbuka} = 0,544$$

$$\text{Indeks Kebugaran} = 0,71$$

$$\text{Indeks SDM} = 0,913$$

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$IPK = 0,25 (\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan}) + 0,25 (\text{Indeks Ruang Terbuka}) + 0,25 (\text{Indeks Kebugaran}) + 0,25 (\text{Indeks SDM})$$

$$IPK = 0,25 (0,76) + 0,25 (0,544) + 0,25 (0,71) + 0,25 (0,913) \\ = 0,19 + 0,136 + 0,177 + 0,228 \\ = 0,731 = 0,73$$

Uraian data perhitungan untuk unsur Indeks Pembangunan Keolahragaan, diperoleh sebagai berikut :

a. Indeks Partisipasi Keolahragaan  
Indeks Partisipasi Keolahragaan diperoleh melalui formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Partisipasi Keolahragaan} \\ = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$$

Nilai Aktual yaitu Jumlah Partisipasi Pemuda

yang mengikuti Kegiatan Olahraga dengan formula:

$$\text{Nilai Aktual} \\ = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berolahraga} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}}$$

Untuk memperoleh jumlah pemuda yang aktif berolahraga diperoleh data dari KONI Kabupaten Pangandaran, NPCI Kab. Pangandaran, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

**Table 3.75 Pemuda yang Aktif Berolahraga**

NO	NAMA CABOR	JUMLAH
1	(National Paralympic Committee Indonesia) NPCI	22
2	Tarung Drajat	16
3	Pencak Silat	31
4	Pordasi (Berkuda)	21
5	Bola Volly Pasir	8
6	Bulu Tangkis	15
7	Catur	15
8	Renang	34
9	Polo Air	15
10	Atletik	18
11	Federasi Hockey	25
12	Tinju Amatir	10
13	Dayung	21
14	Angkat Berat Dan Binaraga	15
15	Karate	6
16	Bola Basket	19
17	Sepak Bola	38
18	Selam	19
19	Tenis Meja	19
20	Sepak Takraw	14
21	Sport Speda	24
22	Biliar	13
23	Taekwondo	13
24	Drum Band	10
25	Arum Jeram	14
26	Wushu	33
27	Persatuan Wanita Olahraga	24
28	Senam	9
29	Federasi Air Sport	11
30	Jujitsu	13
31	Pelajar	52.730
32	Senam	980
33	sepak bola	7.470
34	Voli	8.562
35	Sepeda	985
Jumlah yang aktif berolahraga		71.272

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemuda yang aktif berolahraga sebanyak 71.272 orang. Untuk memperoleh nilai Jumlah Penduduk Pemuda dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur yaitu sebanyak 93.314:

Setelah diperoleh kedua data yaitu jumlah pemuda yang aktif berolahraga sebanyak 71.272 orang dan jumlah penduduk pemuda sebanyak 93.314 orang, maka dapat dihitung nilai aktual sebagai berikut:

$$\text{Nilai Aktual} \\ = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berolahraga} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}} \\ = \frac{71.272 \times 100}{93.314} \\ = 76,37 \%$$

Dengan demikian untuk perhitungan Indeks Partisipasi Keolahragaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Aktual} \\ = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif berolahraga} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk Pemuda}} \\ = \frac{71.272 \times 100}{93.314} \\ = 76,37 \%$$

Dengan demikian untuk perhitungan Indeks Partisipasi Keolahragaan sebagai berikut:  
Indeks Partisipasi Keolahragaan  
=  $\frac{\text{Nilai aktual} - \text{Min}}{\text{Mak} - \text{Min}}$

$$= \frac{76,37 - 0}{100 - 0} \\ = \frac{76,37}{100} \\ = 0,76$$

Keterangan : nilai 100 adalah nilai dan nilai 0 adalah nilai minimal yang bersumber dari KEMENPORA

b. Indeks Ruang Terbuka  
Yang dimaksud ruang terbuka berdasarkan dari Lakip Kemenpora tahun 2014 adalah sebagai berikut: Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga, sengaja dirancang untuk kegiatan berolahraga, dapat diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut, ruang terbuka di Kabupaten Pangandaran diperoleh data dari KONI Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah lapang Voli: 281
  - 2) Jumlah lapang Sepak Bola: 90
  - 3) Jumlah gor/gelangan: 107
  - 4) Jumlah ruang Senam: 7
  - 5) Jumlah lapang Bulu tangkis: 22
  - 6) Jumlah lapang Basket: 37
- Total: 544

Selanjutnya dihitung Indeks Ruang terbuka sebagai berikut :

$$\text{Indeks Ruang Terbuka} \\ = \frac{\text{Jumlah Ruang Terbuka} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}} \\ = \frac{544 - 0}{1000 - 0} \\ = 0,544$$

Keterangan : 1000 adalah angka maksimal untuk konversi dalam skala 1

1. Indeks Kebugaran  
Indeks kebugaran merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti maka dapat disimpulkan orang yang bugar adalah orang yang selalu aktif dalam berolahraga atau dapat dikatakan partisipasi pemuda yang aktif berolahraga yaitu sebanyak 86.700 (lihat Jumlah pada Tabel Pemuda yang Aktif Berolahraga).  
Indeks Kebugaran  
=  $\frac{\text{jumlah Pemuda yang Aktif Berolahraga} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}}$   
=  $\frac{71.272 - 0}{100.000 - 0}$   
= 0,71

2. Indeks SDM  
Indeks SDM merujuk pada jumlah pelatih olahraga, guru pendidikan jasmani dan kesehatan dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah kabupaten. Maka diperoleh data (Sumber data : KONI Kabupaten Pangandaran) sebagai berikut :

- 1) Pelatih olahraga: 238
  - 2) Guru penjaskes: 665
  - 3) Instruktur olahraga: 10
- Jumlah: 913

Dengan demikian SDM yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 885 orang, selanjutnya dihitung Indeks SDM :

$$\text{Indeks SDM} = \frac{\text{jumlah SDM} - \text{minimal}}{\text{Maksimal} - \text{minimal}} \\ = \frac{913 - 0}{1000 - 0} \\ = 0,913$$

Dari perhitungan diatas maka realisasi sasaran kinerja tercapai yaitu 0,81 dari target 0,75 atau dengan capaian 108%

$$\text{Tingkat capain} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \\ = \frac{0,73}{0,80} \times 100 = 91,25\%$$

Sehingga tingkat capain Tahun 2020 yaitu sebesar 91,25%

#### Analisa Capaian

Hasil Perhitungan Capaian Kinerja  
Dari pehitungan tingkat capaian kinerja diatas untuk Tahun 2020 dikatakan berhasil, dikarenakan memiliki tingkat capain kinerja 91,25%.

#### Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

**Tabel. 3.76 Capain Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2020
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,80	0,73	91,25%

**Tabel. 3.77 Capain Kinerja Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019	Capaian Kinerja 2019
Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,75	0,75	100%

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2020 mengalami perlambatan dari Tahun 2019 sebesar 100% sedangkan Tahun 2020 sebesar 91,25% sehingga terdapat pelambatan sebesar 8,75%. Faktor Pendukung Perlambatan Tingkatan Capaian Kinerja: Adanya pandemi Covid.

**Tabel 3.78 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Periode akhir RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja 2020	Target akhir RPJM	Capaian Kinerja Terhadap Akhir RPJM (%)
1	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,80	0,73	0,85	85,88

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target periode akhir RPJM yaitu 0,85 maka dengan realisasi kinerja 0,73 kontribusi terhadap capaian kinerja akhir RPJM yaitu 85,88% sehingga untuk mencapai 100% tersisa sebesar 14,12%. Faktor penyebab ketidakberhasilan: Adanya pandemi Covid-19

Hal – hal yang masih perlu ditingkatkan atas pendukung keberhasilan: dari Disdikpora berusaha mengakomodir dari masyarakat olahraga untuk pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan didalam forum Perangkat Daerah Provinsi, semoga dapat terwujud dan keolahragaan di kabupaten Pangandaran lebih meningkat.

#### 5.6 Penurunan Angka Kemiskinan

Nilai angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 bersumber dari BPS Kabupaten Ciamis yaitu sebesar 8,99% bila dibandingkan dengan angka tahun 2019 yakni sebesar 7,71%, terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 1,28%. Sedangkan target penurunan angka kemiskinan di RPJMD adalah sebesar 0,25%, yang berarti capainnya masih jauh dari target. Hal ini diakibatkan terjadinya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap bertambahnya keluarga miskin di Kabupaten Pangandaran.

**Tabel 3.79 Persentase Penurunan Angka Kemiskinan**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)	
		TARGET	REALISASI		
1	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,25	-1,28	-5,12
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					

Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Persentase penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, nilai realisasi capaian diperoleh sebagai berikut :  
 Angka kemiskinan tahun 2019 = 7,71 %  
 Angka kemiskinan tahun 2020 = 8,99%  
 Penurunan angka kemiskinan = 7,71- 8,99  
 = -1,28

Persentase target Penurunan angka kemiskinan RPJMD = 0,25

Capaian persentase penurunan angka kemiskinan =  $\frac{-1,28}{0,25}$   
 = -5,12%

Adapun keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target terjadi pada kurun waktu 2018, dari 8,12% menjadi 7,71% pada 2019, yang ditunjang oleh kebijakan Bupati Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat diantaranya berikut :

- Adanya program “Pangandaran Hebat” berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggratiskan biaya pendidikan sampai dengan SLTA bagi siswa yang orang tuanya berpenduduk/KTP Kabupaten Pangandaran. (DATA PENDIDIKAN)
- Program pelayanan kesehatan dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018. Seluruh warga yang memiliki KTP Kabupaten Pangandaran gratis berobat di puskesmas dan untuk pengobatan lanjutan Kabupaten Pangandaran dengan menyediakan Jaminan Kesehatan Kertawaluya. (DATA KESEHATAN)
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rutilahu setiap tahun dianggarkan di APBD Kabupaten. Rutilahu Tahun 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten 55 Unit. Sedangkan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui BSPS pada Tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi sebanyak ..... unit. (Data PU)
- Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin di Perdesaan Tahun 2020 yang bersumber dari APBN yang mendapat bantuan yaitu di Kecamatan Cijulang yaitu 12 kelompok. Masing – Masing Kelompok Mendapatkan Bantuan Rp. 30.000.000.
- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebanyak 29.282 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Program Keluarga Harapan (PKH) Bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Pangandaran sebanyak 18.308, dan yang menjadi PMKS yang Mandiri dari Graduasi PKH sebanyak 3.914 jiwa. Graduasi PKH artinya keluar dari

kepesertaan PKH dan tidak mendapatkan bantuan sehingga bisa hidup mandiri.

- Diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa, dimana Pemerintah Desa dapat memberi bantuan kepada masyarakat miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Gambaran capaian angka kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.80 Data Kemiskinan Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Data Kemiskinan			
		Kabupaten Pangandaran		Provinsi Jawa Barat	
		Jumlah Jiwa (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah Jiwa (Jiwa)	Persentase (%)
1	2015	41.970	10,76	4.435.700	9,53
2	2016	40.140	10,23	4.224.320	8,95
3	2017	39.460	10,10	4.168.440	8,71
4	2018	32.190	8,12	3.615.790	7,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

Tabel 3.78 diatas menggambarkan kemiskinan kemiskinan di tingkat provinsi maupun Kabupaten Pangandaran dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami penurunan yang berarti baik jumlah maupun persentase kemiskinan semakin menurun yang berarti bersifat positif. Besaran capaian angka penurunan tersebut yaitu sebesar 1,98% dari tahun 2107 sebesar 10,10% (39.460 Jiwa) menjadi 8,12% (32.190 Jiwa) tahun 2018.

#### Misi 6: Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan

##### 6.1 Indeks gini

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran **Menurunnya kesenjangan antar wilayah** memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 102,98 dikategorikan baik. Analisis capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.81 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Menurunnya kesenjangan antar wilayah**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA (%)	
		TARGET	REALISASI		
1	Indeks Gini	Indeks	0,335	0,345	102,98
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					

- Indeks Gini, nilai realisasi capaian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 adalah sebesar 0,345 (angka sementara). Nilai tersebut masih masuk dalam kriteria kesenjangan rendah < 0,40.

Pengukuran Indikator indeks gini menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Artinya semakin besar nilai rasio indeks gini, semakin besar angka kesenjangan atau ketimpangan.

Berdasarkan data tersebut dapat dihitung capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0,345}{0,335} \times 100\% = 102,98\%$$

- Gini ratio Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 2015-2018 terlihat cenderung stabil masih < 0,40 walaupun tiap tahunnya nilai gini rasionya bervariasi. Tabel dibawah menggambarkan nilai Indeks Gini Rasio Kabupaten Pangandaran dan Jawa Jawa Barat Tahun 2015-2018.

**Tabel 3.82 Nilai Indeks Gini Ratio Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2015-2018**

Uraian	Periode Tahun			
	2015	2016	2017	2018*
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Gini Ratio	0,358	0,337	0,352	0,345

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, 2018. \*) Angka Sementara

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya kinerja sasaran adalah :

- Sejak adanya pemekaran daerah menjadi Kabupaten Pangandaran, perekonomian daerah mengalami peningkatan dan dengan semakin baiknya infrastruktur jalan telah memudahkan akses transportasi sampai pelosok Kabupaten Pangandaran yang gilirannya dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk secara merata.
- Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta layanan kesehatan dasar gratis serta terjangkau, merata dan berkualitas.
- Meningkatnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

## 6.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS kondisi Agustus 2019, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pangandaran sebanyak 237.582 orang. Namun, pada November 2020 jumlah angkatan kerja tersebut bertambah menjadi sebanyak 245.619 orang.

Target penurunan TPT pada LPPD RPJMD tahun 2020 sebesar 3,34% sedangkan realisasinya sebesar 5,08% sehingga capaiannya sebesar 65,75%, yang diperoleh dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \text{Target/Realisasi} \times 100\% \\ &= 3,34/5,08 \times 100\% \\ &= 65,75\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.83 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu**

No	Uraian	Periode Tahun			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	2019	3,46	4,52	76,55	1,06
2	2020	3,34	5,08	65,75	1,74

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 10,8% dan terjadi perlambatan sebesar 0,68% dibandingkan dengan tahun 2019. Faktor terbesar yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja adalah terjadinya wabah pandemi Covid-19. Hal lainnya adalah disebabkan oleh status ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran dimana porsi pekerja keluarganya cukup besar sehingga rawan untuk berhenti bekerja dan hanya mengurus rumah tangga (bukan angkatan kerja). Sebagai contoh, saat musim kemarau atau cuaca buruk maka usaha pertanian akhirnya berhenti sementara akibat kekeringan, sebagian industri juga mengurangi aktivitasnya karena kekurangan bahan baku, begitupun nelayan akan tidak melaut akibat cuaca buruk.

Fenomena ini bukanlah tanda keterpurukan tetapi anomali ketenagakerjaan. Di saat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat maka akan menarik para pencari kerja yang mempersiapkan usaha, apalagi ada cuaca buruk mengakibatkan pekerja sektor pertanian banyak yang berhenti. Akhirnya, jumlah pengangguran terbuka (pembilang) berkurang tetapi jumlah angkatan kerja (penyebut) berkurang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat.

**Tabel 3.84 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Angkatan Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020**

No	Uraian	Periode Tahun	
		2019	2020
1	Angkatan Kerja (orang)	237.582	245.619
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	5,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2020,

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Pangandaran masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah, apalagi ditambah pada tahun 2020 jumlah pengangguran semakin bertambah karena dampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada "human capital" ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai

bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

## 6.3 Pertumbuhan PDRB

Target persentase pertumbuhan PDRB menurut RPJMD pada tahun 2020 adalah sebesar 4,34%, namun realisasinya turun sebesar -0,05%. Pandemi Covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Pangandaran. Dampaknya dapat dirasakan mulai dari Triwulan I-2020 hingga Triwulan III-2020, walaupun pada akhir Triwulan III-2020 mulai adanya perubahan. Dari 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha, 4 (empat) kategori lapangan usaha mengalami sedikit pertumbuhan positif dan 13 (tiga belas) kategori mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian capaian kerjanya adalah sebesar -1,15% yang dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi/Target} \times 100\% \\ &= -0,05/4,34 \times 100\% \\ &= -1,15\% \end{aligned}$$

Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 5,94/4,28= 138,79%. Ini berarti terjadi perlambatan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 139,94%.

Dari keempat kategori lapangan usaha yang mengalami perumbuhan positif yaitu pertanian, konsumsi listrik, informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Sektor pertanian mengalami sedikit pertumbuhan positif karena faktor cuaca yang mendukung dan tidak adanya serangan hama penyakit pada pertanaman. Sedangkan untuk kategori konsumsi listrik meningkat karena pekerja dan pelajar/mahasiswa banyak menggunakan komputer/laptop selama *work from home*. Pada kategori informasi dan komunikasi peningkatan terjadi seiring dengan kebijakan *work from home* dan PSBB sehingga setiap aktivitas banyak dilakukan secara virtual melalui daring. Peningkatan juga terjadi pada kategori jasa kesehatan yang disebabkan karena meningkatnya konsumsi pembelian sarana prasarana kesehatan, diantaranya masker, *hand sanitizer*, obat-obatan, vitamin dll.

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap capaian PDRB tahun 2020, yang diperkirakan nilainya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB (adhb) Kabupaten Pangandaran tahun 2019 sebesar Rp. 11,322 Trilyun lebih. Penurunan nilai capaian PDRB pada tahun 2020 akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Pangandaran, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang dan jasa secara umum.

Sampai dengan tahun 2019, sektor pertanian masih memberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran. Hal ini dapat dipahami karena lahan pertanian di wilayah Kabupaten Pangandaran masih cukup luas. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor pertanian mencapai Rp. 3,065 Milyar lebih, tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 berasal dari subsektor tanaman pangan, diikuti oleh sub sektor subsektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Kita masih bersyukur pada tahun 2020 kontribusi sektor ini masih sedikit mengalami pertumbuhan positif. Walaupun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya kontribusi sektor pertanian cenderung fluktuatif, kondisi tersebut disebabkan adanya peningkatan nilai tambah dari sektor lain yang lebih cepat. Fenomena ini dapat merupakan transisi ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke tersier (jasa) yang dianggap sebagai indikasi kemajuan perekonomian. Pada sisi lain, saat ini luas lahan pertanian cenderung terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Capaian nilai tambah PDRB dari semua sektor lapangan usaha pada Tahun 2020 baik yang memiliki nilai pertumbuhan positif maupun yang pertumbuhannya negatif belum diperoleh data hasil rilis atau Berita Resmi Statistik (BRS) dari BPS, data tersebut baru keluar awal Maret 2021 (sumber BPS Ciamis).

Kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah.

**Tabel 3.85 PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	2019	2020 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Primer</b>		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.814.827,54	
2	Pertambangan dan Penggalian	47.985,14	
<b>II</b>	<b>Skunder</b>		
1	Industri Pengolahan	382.886,81	
2	Pengadaan Listrik dan Gas	5.385,28	
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.015,78	
4	Konstruksi	748.300,10	
<b>III</b>	<b>Tersier</b>		
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.761.761,54	
2	Transportasi dan Pergudangan	847.203,25	
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	706.084,90	
4	Informasi dan Komunikasi	166.235,40	
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	147.995,66	
6	Real Estate	238.268,97	
7	Jasa Perusahaan	81.706,32	
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231.985,70	
9	Jasa Pendidikan	404.745,11	
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.402,16	
11	Jasa lainnya	145.134,58	
	<b>PDRB</b>	<b>7.750.924,24</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2020  
\*) data belum tersedia

Namun demikian, upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang lebih penting seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk dicermati.

Pada tahun 2020, diprediksi perekonomian Kabupaten Pangandaran akan mengalami pertumbuhan negatif. Dan akan berdampak pula pada Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif menunjukkan terjadi pula pada penurunan aktivitas ekonomi di suatu daerah.

Salah satu dampak dari Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif bisa terlihat dari besaran pengeluaran per kapita penduduk. Dalam situasi perekonomian yang stabil (inflasi terkendali), nilai pengeluaran yang meningkat menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp.9.423.000,00 per tahun sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp.9.084.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 339.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan daya beli masyarakat seiring dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi dimana-mana.

**Tabel 3.86 PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	2019	2020 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Primer</b>		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.065.084,73	
2	Pertambangan dan Penggalian	62.336,53	
<b>II</b>	<b>Skunder</b>		
1	Industri Pengolahan	540.706,07	
2	Pengadaan Listrik dan Gas	7.973,87	
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.671,50	
4	Konstruksi	1.004.704,87	
<b>III</b>	<b>Tersier</b>		
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.283.410,53	
2	Transportasi dan Pergudangan	1.318.347,07	
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.060.116,39	
4	Informasi dan Komunikasi	166.214,79	
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.116,75	
6	Real Estate	298.425,31	
7	Jasa Perusahaan	124.320,39	
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	316.297,03	
9	Jasa Pendidikan	658.673,62	
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.668,68	
11	Jasa lainnya	180.733,47	
	<b>PDRB</b>	<b>11.322.801,61</b>	

**Tabel 3.87 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Parietas Daya Beli (PPP) di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020**

No	Rincian	Capaian Tahun	
		2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,96	*)
2	Kemampuan Daya Beli PPP (Rp.)	9.423.000,00	9.084.000,00

**6.4 Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM**

Nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran bahwa pada Tahun 2020 jumlah Usaha Mikro tidak ada

penambahan dari tahun sebelumnya yakni 10.908 pelaku dan Usaha Kecil 452 pelaku, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah Usaha Mikro : 10.908 unit  
Jumlah UMKM : 11.360 Unit

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = \frac{10.908}{11.360} \times 100\%$$

$$\text{Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM} = 96,00\%$$

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM pada Tahun 2020 sebesar 96,00% dari yang ditargetkan 97,00% atau capaian 98,96% dengan kriteria baik.

**Tabel 3.88 Perbandingan Realisasi Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan / Perlambatan
2019	1	1	100 %	0
2020	2	1	50 %	-1

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 tidak terjadi percepatan ataupun perlambatan karena antara target dan realisasi sama ataupun sehingga capaian 100 %. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perlambatan 1 % karena target 97 % tetapi realisasinya hanya 96 % sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 1,04 %. Perlambatan ini disebabkan karena pada Tahun 2020 tidak ada pendataan atau pemuktahiran data UMKM akibat dari refocusing anggaran Covid-19.

**6.5 Jumlah Koperasi yang sehat**

Nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat} \times 100\%}{\text{Target Koperasi sehat}} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran bahwa pada Tahun 2020 hanya 1 (satu) Koperasi yang memperoleh predikat "Koperasi Sehat" yakni Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Megah yang beralamat di Jl. Padaherang No. 316/318 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang. Dari Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS)

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Nomor 800/339/DISDAGKOP Tanggal 11 November 2020 bahwa berdasarkan penilaian terhadap 7 (tujuh) aspek mulai dari permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri Koperasi terhadap KPRI megah diperoleh skor 81,80 dengan predikat "sehat".

**6.5 Jumlah Koperasi yang Sehat**

**Tabel 3.89 Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi**

NO	ASPEK PENILAIAN	BASIS/ NILAI	SKOR	Jumlah	Kategori
A	PERMODALAN 1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	75,8% 39,46% 45,00%	3,00 6,00 3,00	12,00	SEHAT
B	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF 1 Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap total volume pinjaman diberikan 2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan 3 Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 4 Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	100,0% 1,00% 114,65% 15,57%	10,00 4,00 5,00 5,00	24,00	SEHAT
C	MANAJEMEN 1 Manajemen Umum 2 Manajemen Kelembagaan 3 Manajemen Permodalan 4 Manajemen Aktiva 5 Manajemen Likuiditas	2,50 1,50 3,00 1,80 3,00	2,50 1,50 3,00 1,80 3,00	11,80	SEHAT
D	EFISIENSI 1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Beano 2 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor 3 Rasio Efisiensi Pelayanan	81,4% 9,98% 0,00%	4,00 2,00 2,00	8,00	SEHAT
E	LIKUIDITAS 1 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	0,77% 80,14%	2,50 5,00	7,50	DALAM PENGAWASAN
F	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN 1 Rasio Rentabilitas Aset 2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	5,54% 9,66% 12,85%	1,50 3,00 4,00	8,50	SEHAT
G	JATI DIRI KOPERASI 1 Rasio Partisipasi Beano 2 Rasio Promosi/Ekonomi Anggota	100,00% 17,33%	7,00 3,00	10,00	SEHAT
TOTAL SKOR PENILAIAN KESEHATAN			81,80		
KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN			SEHAT		

Sumber: Hasil Pengukuran Kesehatan Koperasi - Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2020

**Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi Jumlah Koperasi Sehat Dengan Tahun Lalu**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan / Perlambatan
2019	96%	96%	100%	0
2020	97%	96%	98,96%	-1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi percepatan atau perlambatan pada Tahun 2019 karena target dengan realisasi sama yaitu 1 (satu) Koperasi yaitu KPRI Segar Kalipucang atau jika dipersentasekan capaiannya 100 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir di RPJMD masih terdapat selisih 1 (satu). Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perlambatan sebesar 1 atau jika dipersentasekan capaiannya hanya sebesar 50 % dari target yang telah ditentukan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan capaian sebesar 50 %.

1. Penurunan pencapaian target ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Penurunan tingkat kepatuhan Koperasi terhadap pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2019 akibat pandemi Covid-19
2. Tingkat likuiditas Koperasi yang rendah karena kurangnya kesadaran anggota Koperasi terhadap kewajibannya .
3. Banyaknya Lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga kompetitif dan persyaratan yang mudah dan rendahnya inovasi pelayanan koperasi membuat koperasi kalah bersaing

### 6.6 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Energi (AKE)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan.}$$

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 3.91 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	94,00	94,50	100,53

**Tabel 3.92 Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan**

No	Unsur Jenis Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
		Persen AKE		Bobot	Skor PPH
1	Padi- padian	62,8	X	0,5	= 25,0
2	Umbi-umbian	3,8	X	0,5	= 1,9
3	Pangan Hewani	12,5	X	2,0	= 24,0
4	Minyak dan lemak	14,4	X	0,5	= 5,0
5	Buah biji berminyak	1,3	X	0,5	= 0,7
6	Kacang-kacangan	2,9	X	2,0	= 5,8
7	Gula	4,1	X	0,5	= 2,0
8	Sayuran dan Buah	8,1	X	5,0	= 30,0
9	Lain-lain	2,4	X	0,0	= 0,0
<b>JUMLAH</b>					<b>94,5</b>

Sumber : Buku Analisis Pola Konsumsi Pangan DKPKP Tahun 2020

Dari data di atas diperoleh hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan = **94,50**. Keberhasilan dalam pencapaian yang melebihi target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
- b. Tersedianya pangan yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah untuk dikonsumsi.
- c. Tercapainya target realisasi skor pola pangan harapan di Kabupaten Pangandaran tidak terlepas realisasinya dari terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh bidang ketahanan pangan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
- d. Terealisasinya alokasi anggaran untuk program peningkatan ketahanan pangan sebesar Rp. 96.217.300,- pada tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD kabupaten pangandaran.

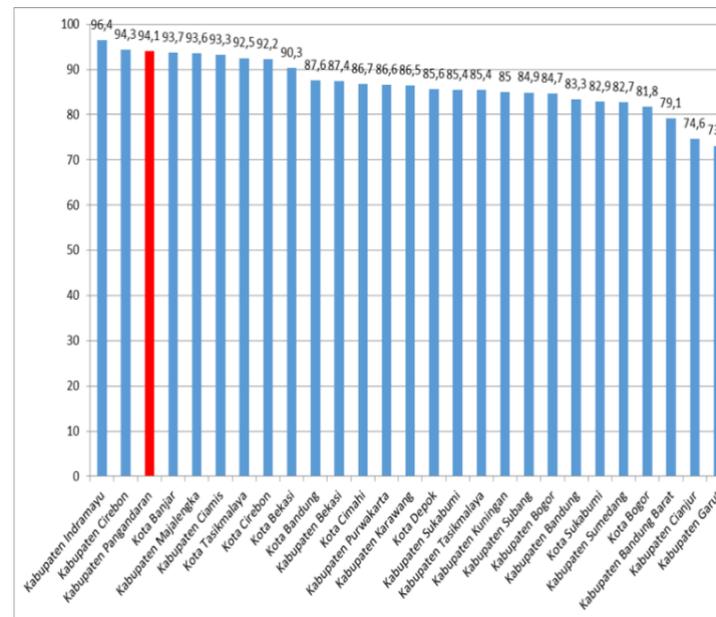
Dibandingkan dengan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Skor PPH Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 berada pada posisi 3 seperti di gambarkan dalam grafik berikut.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Pangandaran berada diatas Provinsi Jawa Barat maupun Nasional seperti di gambarkan dalam tabel dan grafik berikut.

**Tabel 3.93 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2015 s.d 2020**

No	Skor PPH	Poin					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangandaran	-	87,10	82,03	89,50	93,20	94,50
2	Jawa Barat	81,00	84,30	85,20	89,00	87,80	**
3	Nasional	85,20	86,00	90,40	91,30	90,80	**

**Gambar 3.4 Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten-Kota di Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : Buku Direktori Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran di peroleh dari Buku Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dengan basis data Tahun 2015. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat diperoleh dari Buku Direktori Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Skor Pola Pangan Harapan Nasional diperoleh dari Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Seri 20 Tahun 2020 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

### 6.7 Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata yang tertuang dalam target RPJMD tahun 2020 5,5 juta wisatawan sedangkan dengan realisasinya sebesar 2.930.506 wisatawan dengan capaian kinerja sebesar 53,28% yang diperoleh dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi/Target} \times 100\% \\ &= 2.930.506/5.500.000 \times 100 \\ &= 53,28\% \end{aligned}$$

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2019 yakni sebesar 5 juta wisatawan dan realisasinya sebesar 3.893.040 dengan capaian sebesar 77,86% maka terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 24,58%.

Ketidaktercapaian target kunjungan wisatawan tahun 2020 disebabkan wabah pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan skala besar.

Salah satu keberhasilan dalam penataan destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran dapat dinilai dari peningkatan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa, PT. Perhutani, Masyarakat maupun Pemerintah Daerah seperti pada tabel di bawah ini:

Jika dilihat dari tabel di atas menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan ke Objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 terjadi penurunan, baik Wisman (Wisatawan Mancanegara) maupun Wisnus (Wisatawan Nusantara) sebanyak 1.195.602 orang jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019. Hal tersebut dampak dari pandemi Covid-19.

Dari 12 (dua belas) objek wisata yang ada, baru lima 5 (lima) objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dari 5 (lima) objek wisata yang dikelola pemerintah daerah masih ada 1 (satu) objek wisata yang masih kurang diminati oleh wisman yaitu objek wisata Karapyak, sehingga mulai tahun 2020 mulai dilakukan penataan yang lebih diprioritaskan, adapun jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.94 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020**

No	Objek Wisata	2019		2020	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1	OW Pangandaran	1.231	2.663.980	62	2.036.980
2	OW Taman Wisata Alam Pangandaran	68	25.391	16	5.390
3	OW Batu Hiu	188	180.316	6	109.107
4	OW Citumang	242	26.379	10	19.051
5	OW Green Canyon	2.880	136.750	155	64.075
6	OW Santirah	-	7.991	-	4.767
7	OW Curug Bojong	-	268	-	113
8	OW Ciwayang	-	3.254	-	2.421
9	OW Batu Karas	1.456	519.468	237	349.041
10	OW Pantai Madasari	-	44.964	10	50.288
11	OW Karapyak	15	268.989	-	282.360
12	OW Pantai Karangnini	41	9.169	18	6.400
<b>Jumlah</b>		<b>6.121</b>	<b>3.886.919</b>	<b>514</b>	<b>2.929.992</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.893.040</b>		<b>2.930.506</b>	

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran 2020

**Tabel 3.95 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020**

No	Objek Wisata	2019		2020	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	OW Pangandaran	19.431.594.082,00	13.326.055.000,00	8.204.612.179,00	10.185.207.500,00
2	OW Batu Hiu	1.501.821.479,00	902.520.000,00	426.021.102,00	545.563.750,00
3	OW Green Canyon	1.140.126.993,00	698.150.000,00	269.183.451,00	321.150.000,00
4	OW Batu Karas	4.090.844.188,00	2.604.620.000,00	1.377.074.857,00	1.746.387.500,00
5	OW Karapyak	1.335.613.258,00	941.513.000,00	723.108.410,00	988.260.000,00
Jumlah		27.500.000.000,00	18.472.858.000,00	11.000.000.000,00	13.786.568.750,00

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran 2020

Dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran baik yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun Perum Perhutani, diharapkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu berupa retribusi pariwisata, dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan maka pendapatan dari retribusi pariwisata akan meningkat. Gambaran capaian retribusi pariwisata dari 5 (lima) Objek Wisata yang dikelola pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.96 Target dan Realisasi Retribusi Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2020**

No	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisatawan				Jumlah Wisman Wisnus	
		Mancanegara		Nusantara		2019	2020
		2019	2020	2019	2020		
1	Pantai Pangandaran	1.231	62	2.663.980	2.036.980	2.665.211	2.037.042
2	Pantai Batu Hiu	188	6	180.316	109.107	180.504	109.113
3	Pantai Batukaras	1.456	237	519.468	349.041	520.924	349.278
4	Cukang Taneuh/ Green Canyon	2.880	155	136.750	64.075	139.630	64.230
5	Pantai Karapyak	15	-	268.989	282.360	269.004	282.360
Jumlah		5.770	460	3.769.503	2.841.562	3.775.273	2.842.022

Sumber: Disparbud Kab. Pangandaran 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa target kunjungan atau jumlah pengunjung pariwisata masih belum tercapai, tidak tercapainya target tersebut selama pada tahun 2020 yaitu:

1. Dalam rangka memutus mata rantai penularan virus Covid-19 yang masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret dan April tahun 2020, maka pada bulan April Kabupaten Pangandaran, memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai arahan Gubernur Jawa Barat yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pangandaran. Peraturan tersebut yang menjadi dasar adanya penutupan secara total di 5 destinasi wisata yang dikelola PEMDA selama 2,5 bulan di awal tahun 2020 (April akhir - Juli) karena wabah pandemi covid-19. Setelah itu ada Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) selama 1 bulan berikutnya sampai sekitar bulan Juli 2020 dengan menerapkan 75% kapasitas tiket wisata dan 50% kunjungan wisatawan yang diperbolehkan di dalam satu lokasi destinasi wisata. Hal ini juga dilanjutkan pada beberapa bulan berikutnya dengan pembatasan kegiatan berkerumun di tempat wisata, sehingga memberikan efek berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan di semua destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran.

2. Adanya pembatasan aktivitas wisata pada musim liburan Natal dan Tahun Baru 2021 yang merupakan high season di destinasi wisata Kabupaten Pangandaran, sehingga tidak mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 dampak pandemi Covid-19.

### 6.8 Jumlah Destinasi Wisata yang Memperoleh Pengakuan dari Global Sustainable Tourist (GSTC)

Tolak ukur capaian sasaran berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.97 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi
1	2	3	4
1	Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	Jumlah Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata yang Mempunyai Kriteria Baik X 100% Jumlah Total Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata

Kinerja sasaran berkembangnya destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan GSTC dengan

indikator persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata.pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

GSTC-D diciptakan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria GSTC-D merupakan upaya minimum yang perlu dicapai oleh setiap organisasi manajemen pariwisata ketika mempertimbangkan keberlanjutan dalam praktik mereka. Untuk memenuhi definisi pariwisata berkelanjutan, destinasi harus mengambil pendekatan interdisipliner, holistik dan integratif yang meliputi empat tujuan utama yaitu :

1. Mendemonstrasikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan;
2. Memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif;
3. Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengunjung dan budaya, serta meminimalkan dampak negatif;
4. Memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.

Kriteria GSTC-D dirancang untuk dapat digunakan oleh semua jenis dan skala destinasi. Lokasi yang dijadikan target destinasi berkelas dunia sesuai dengan kriteria GSTC *Destination* (GSTC-D) yaitu Kawasan Wisata Pantai Pangandaran.

**Tabel 3.98 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s.d 2020 terhadap target 2021 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	63,41%	80%	63,41%	79,26	100%	63,41

Pada tahun 2016 dilakukan *Pangandaran Sustainable Tourism Destination Snapshot Evaluation* dengan menggunakan *Global Sustainable Tourism Criteria for Destination (version 1,1 November 2013) combined with Suggested performance Indicators (version 1,10 Desember 2013)* untuk menilai sejauh mana Kawasan Wisata Pangandaran memenuhi kriteria GSTC-D sehingga terlihat sejauh mana kesiapan Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi berkelas dunia. Dari 41 kriteria yang dievaluasi Kawasan Wisata Pangandaran memperoleh nilai sebagai berikut :

1. Terdapat 4 kriteria yang tidak dievaluasi dikarenakan tidak cukup data untuk dievaluasi yaitu :
  - a. Akuisisi Properti;

- b. Promosi;
  - c. Pelindungan Warisan Budaya;
  - d. Pelindungan Kekayaan Intelektual.
2. 17 kriteria yang dinilai sudah baik yaitu :
    - a. Manajemen Organisasi (DMO);
    - b. Pengelolaan Pariwisata Musiman;
    - c. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata;
    - d. Keselamatan dan Keamanan;
    - e. Manajemen krisis dan Kedaruratan;
    - f. Peluang Kerja untuk Masyarakat Lokal;
    - g. Partisipasi Masyarakat;
    - h. Opini Masyarakat Lokal;
    - i. Akses Bagi Masyarakat Lokal;
    - j. Pencegahan Eksploitasi;
    - k. Dukungan Untuk Masyarakat;
    - l. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan Yang Adil;
    - m. Pelindungan Atraksi Wisata;
    - n. Perilaku Pengunjung;
    - o. Pelindungan Lingkungan Sensitif;
    - p. Pelindungan Alam Liar (Flora dan Fauna);
    - q. Polusi Cahaya dan Suara.
  3. 11 kriteria dimana perencanaan sudah ada tetapi implementasi belum maksimal:
    - a. Strategi Destinasi Berkelanjutan;
    - b. Pengaturan Perencanaan;
    - c. Akses Untuk Semua;
    - d. Kepuasan Pengunjung;
    - e. Pemantauan Ekonomi;
    - f. Fungsi Edukasi Sadar Wisata;
    - g. Pengelolaan Pengunjung;
    - h. Interpretasi Tapak;
    - i. Konservasi Energi;
    - j. Pengelolaan Air;
    - k. Keamanan Air.
  4. 9 kriteria yang belum ada dan belum dikembangkan yaitu :
    - a. Monitoring;
    - b. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim;
    - c. Standar Keberlanjutan;
    - d. Resiko Lingkungan;
    - e. Emisi Gas Rumah Kaca;
    - f. Kualitas Air;
    - g. Limbah Cair;
    - h. Mengurangi Limbah Padat;
    - i. Transportasi Ramah Lingkungan.

Dari hasil analisa di atas maka persentase pemenuhan kriteria GSTC-D yang dicapai sampai Tahun 2016 untuk mendukung tercapainya Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia sebesar 41,46 % dimana Dari 41 kriteria GSTC-D yang dievaluasi di Kabupaten Pangandaran memperoleh 17 kriteria GSTC-D yang dianggap baik. Adapun perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{17}{41} \times 100 \% = 41,46 \%$$

Pada tahun 2019 setidaknya ada 2 kriteria yang berusaha dipenuhi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu:

1. Akses Untuk Semua;
2. Pengelolaan Pengunjung.

Sedangkan sampai Tahun 2018 setidaknya ada 7 kriteria GSTC-D yang berusaha untuk dipenuhi meliputi :

1. Promosi;
2. Perlindungan Warisan Budaya;
3. Strategi Pengembangan Destinasi Berkelanjutan;
4. Kepuasan Pengunjung;
5. Fungsi Edukasi dan sadar wisata;
6. Monitoring;
7. Regulasi Perencanaan.

Jika dianalisis dan dievaluasi ulang, dengan adanya penambahan pemenuhan 2 kriteria GSTC-D, maka kondisi pencapaian pemenuhan GSTC-D sampai tahun 2019 dengan menggunakan penilaian mandiri diharapkan dapat mengalami kenaikan menjadi 26 kriteria dengan kategori baik sehingga capaiannya menjadi sebesar 63,41%.

Agar mencapai target pemenuhan kriteria GSTC-D 100% pada tahun 2021 maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama dukungan lintas sektor. Salah satu strategi yang dapat mempercepat pemenuhan kriteria dimaksud adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjadikan destinasi wisata Pantai Pangandaran berkelas dunia merujuk pada kriteria GSTC-D. Pada tahun 2019 daya Tarik wisata alam Green Canyon mendapatkan penghargaan *Green Bronze* dalam ajang ISTA yang kriteria dan indikator penilaiannya diadopsi dari kriteria dan indikator GSTC-D.

Pada tahun 2020 kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D yakni pembentukan tim percepatan pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D yang dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata.

Adapun faktor penghambat pemenuhan kriteria dan indikator GSTC-D adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pegawai tentang GSTC-D belum menyeluruh sehingga;
2. Banyaknya indikator dan kriteria yang harus dipenuhi dan tersebar hampir diseluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pangandaran sedangkan pembentukan tim secara resmi baru dilakukan tahun 2020;
3. Sumber daya untuk pemenuhan indikator dan kriteria GSTC-D masih terbatas.

Untuk mendukung sasaran 5 Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC terdapat 2 program pendukungnya.

1. Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mendapatkan pagu 75,61% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 5. Kegiatan yang mendapatkan pagu terbesar adalah kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua) sebesar

62,33% yang didalamnya pengembangan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.

2. Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata mendapatkan pagu 24,39% dari total anggaran pendukung sasaran strategis 5. Kegiatan yang mendapatkan pagu tersebar adalah Bimtek Pengembangan SDM Bidang Pariwisata (DAK) sebesar 100% merupakan kegiatan yang didalamnya ada pelatihan SDM di bidang pariwisata.

Berikut ini kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam rangka mendukung sasaran 5 Berkembangnya Destinasi Wisata untuk Memperoleh Pengakuan GSTC:

**Table 3.99 Anggaran Pendukung Sasaran Strategis 5**

No	Indikator Kinerja	Sasaran Program	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemenuhan Kriteria GSTC-D Sektor Pariwisata	Persentase SDM Pengelola Yang Memahami Prinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Rp1.082.900.014,00
		Persentase Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Yang Memperoleh Manfaat Ekonomi dari Pengembangan Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	Rp 344.050.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

**Table 3.100 Kegiatan Pendukung Sasaran**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	1.082.900.014,00	100,00	
	Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D	45.000.000,00	4,16	
	Penyelenggaraan Event pariwisata di musim sepi kunjungan	5.287.004,00	0,49	
	Penyusunan Database kepariwisataan	55.517.000,00	5,13	
	Analisa kepuasan wisatawan	4.625.000,00	0,43	
	Pengembangan Tanda daftar Usaha Pariwisata	38.650.000,00	3,57	
	Pembuatan Media Promosi	64.600.000,00	5,97	
	Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata	194.243.260,00	17,94	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua)	674.977.750,00	62,33	
2	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	344.050.000,00	100,00	
	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata(DAK Non Fisik)	344.050.000,00	100,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. Rp. 1.999.445.513.862,05 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Lima Sen). Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi - strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan / anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : alokasi, distribusi dan stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
  - b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

### 3.3.1 Pengelolaan Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016 - 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya - upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Pangandaran lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Berikut ini ditampilkan tabel yang memuat efektifitas penggunaan anggaran Tahun 2020 dalam pencapaian sasaran strategis pada misi pertama RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani". Apabila dilihat pada tabel dibawah efektifitas anggaran dalam pencapaian misi kesatu bisa dikatakan efektif karena dari total pagu sebesar Rp. 31.859.483.160,00 terealisasi sebesar Rp. 30.146.943.128,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 89,36% sementara rata-rata capaian kinerjanya hanya sebesar 98,79% jadi persentase realisasi anggaran lebih kecil daripada persentase capaian kinerja.

**Tabel 3.117 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-1 RPJMD Tahun 2020**

Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani									
SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Open BPM terhadap UPD	Status Laporan	WTP	-	-	4.937.083.220,00	4.934.232.120,00	-
		2. Tingkat Kapabilitas APP (1-4) (%)	Skor	3	2	66,67	1.494.206.650,00	1.264.127.096,00	90,17
		3. Tingkat kematangan implementasi SPP (1-4) (%)	Skor	3	3	100,00	386.200.220,00	380.774.300,00	46,63
		4. Nilai AHP	Nilai	8	-	-	155.741.499.994,00	94.576.999.484,00	-
		5. Persentase Pengawasan E-Procurement terhadap Belanja Peralatan	Persentase	88	97,3	110,57	681.733.500,00	665.235.950,00	97,58
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	3. Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Indeks Profesionalitas ASN (1-4) (%)	Skor	65	38,42	39,11	765.025.000,00	765.025.000,00	100,00
		2. Tingkat Kematangan E-Government (1-4) (%)	Indeks	2,25	3,2	142,22	318.048.900,00	314.375.100,00	98,84
		3. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	95	0	-	24.941.091.516,00	23.566.627.730,00	-
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	4. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1. Cakupan Zona Integritas Daerah (1-4) (%)	Persentase	38,5	8,57	48,32	323.025.000,00	283.240.500,00	87,68
		2. Survei Kepuasan Masyarakat	Persentase	80%	80%	100,00	27.961.429.884,00	26.572.164.571,00	95,52
						<b>98,27</b>	<b>31.859.483.160,00</b>	<b>30.146.943.128,00</b>	<b>89,95</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa efektifitas anggaran dalam pencapaian sasaran strategis kesatu yaitu "Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" secara umum dikatakan efektif karena rata-rata capaian kinerja masih lebih besar dari penyerapan anggaran. Apabila dirata-ratakan untuk sasaran strategis kesatu, capaian kinerjanya sebesar 114,63% sementara itu pagu anggarannya sebesar Rp. 2.471.948.376,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.112.137.856,00 atau sebesar 84,36%. Terdapat dua indikator yaitu Nilai AKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi yang belum ada data capaian kinerjanya karena pada saat laporan ini disusun audit BPK Tahun 2020 belum selesai dilaksanakan.

Indikator selanjutnya yaitu "Tingkat Kapabilitas APiP" dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.404.186.656,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.266.127.006,00 atau 90,17% sementara capaian kinerjanya sebesar 66,67%, maka dapat dikatakan tidak efektif. Kemudian indikator "Tingkat Kematangan Implementasi SPIP" dari pagu anggaran sebesar Rp. 386.028.220,00 yang terealisasi sebesar Rp. 180.774.900,00 apabila dipersentasekan sebesar 46,83% sementara capaian kinerjanya sebesar 100% maka

penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja "Tingkat Kematangan SPIP" dapat dikatakan **efektif**.

Indikator selanjutnya yaitu "Persentase Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 681.733.500,00 terealisasi sebesar Rp. 665.235.950,00 atau 97,58% sementara itu capaian kinerjanya lebih tinggi yaitu sebesar 110,57% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

Sasaran strategis yang kedua pada misi pertama yaitu "Birokrasi yang Efektif dan Efisien" dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN", Tingkat Kematangan e-Government dan Indeks Reformasi Birokrasi. Secara rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator untuk sasaran strategis kedua yaitu sebesar 100,66% sementara penyerapan anggarannya dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.044.167.416,00 terealisasi sebesar Rp. 24.646.227.830,00 atau 66,28% sehingga dapat dikatakan efektif karena persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran. Untuk efektifitas masing-masing indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Indeks Profesionalitas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 765.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 765.025.000,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 100% sementara itu capaian target kinerjanya sebesar 59,11% sehingga dapat dikatakan tidak **efektif**. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan metode diklat menjadi online yang sebelumnya offline yaitu diklat fungsional dan structural.
- Tingkat Kematangan e-Government memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 318.048.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 314.375.100,00 atau apabila dipersentasekan sebesar 98,84% sementara itu capaian target kinerjanya hanya 142,22% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

Sasaran strategis ketiga pada misi kesatu yaitu "Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas" dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Cakupan Zona Integritas Daerah dan Survey Kepuasan Masyarakat. Secara rata-rata penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini belum dapat dikatakan tidak efektif karena rata-rata capaian kinerja indikator sasaran hanya 73,16% sementara penyerapan anggaran sebesar 91,50% (pagu anggaran sebesar Rp. 28.304.460.884,00 sementara realisasi sebesar Rp. 26.955.405.172,00). Hal ini disebabkan oleh indikator "Cakupan Zona Integritas Daerah" belum memiliki target kinerja akan tetapi sudah menyerap

anggaran sebesar Rp. 283.240.500,00 dari pagu sebesar Rp. 323.025.000,00 atau 87,68%. Sementara itu untuk indikator selanjutnya yaitu Survey Kepuasan Masyarakat dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.981.435.884,00 terealisasi sebesar Rp. 26.672.164.672,00 atau 95,32% sementara itu capaian target kinerjanya cukup tinggi yaitu sebesar 100% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

Selanjutnya untuk misi kedua RPJMD yaitu "Mewujudkan Penataan Ruang yang Harmonis dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.118 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-2 RPJMD Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana	1. Ketaatan terhadap RTRW	persen	30	35	116,67	1.865.318.720,00	1.827.414.105,00	97,97
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,91	65,52	104,15	2.449.229.247,00	2.209.584.317,00	90,22

Pada misi kedua RPJMD terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah" dengan indikator "Ketaatan terhadap RTRW" dan "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk misi kedua RPJMD ini pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.314.547.967,00 sementara realisasinya sebesar Rp. 4.036.998.422,00 apabila dipersentasekan sebesar 93,57% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar 110,41% sehingga dapat dikatakan **efektif**. Apabila diuraikan masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ketaatan terhadap RTRW memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 1.865.318.720,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.827.414.105,00 atau 97,97% sementara capaian target kinerjanya sebesar 116,67% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.449.229.247,00 terealisasi sebesar 90,22% atau Rp.

2.209.584.317,00 sementara target indikatornya sebesar 104,15% sehingga dapat diberi predikat **efektif**.

Misi ketiga RPJMD Kabupaten Pangandaran mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 299.006.218.874 dan terealisasi sebesar Rp. 181.534.269.378 atau 86,75% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar Rp. 105,46% sehingga dapat dikatakan efektif.

**Tabel 3.119 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-3 RPJMD Tahun 2020**

Misi 3: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas																																
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9																								
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	85	85	100,00	241.826.202.720,00	129.504.810.469,00	53,55																								
									2. Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Jendaraan per Tahun	0,031	0,002	165,00	1.112.500.000,00	1.090.896.077,00	98,06																
																	3. Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	65	68	104,62	21.957.584.077,00	18.462.602.200,00	84,08								
																									4. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	65	66	101,54	8.508.007.000,00	7.605.106.100,00	89,39
	2. Menurunkan risiko bencana di daerah rawan bencana	6. Indeks Risiko Bencana	Indeks	145	0	-	24.944.091.900,00	24.458.785.350,00	98,05																							
										3. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	7. Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	22	16	72,73	18.000.000.000,00	17.338.522.465,00	96,33														
<b>JUMLAH</b>					<b>105,46</b>	<b>299.006.218.874,00</b>	<b>181.534.269.378,00</b>	<b>86,75</b>																								

Berdasarkan tabel di atas, akan diuraikan efektifitas capaian kinerja menurut masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

- Sasaran strategis "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang Berkualitas" mempunyai total pagu anggaran sebesar Rp. 281.006.218.874,00 dengan realisasi sebesar Rp. 164.195.746.913,00 apabila dipersentasekan sebesar 84,83% sementara itu rata-rata capaian kinerjanya sebesar 112,01% sehingga dapat dikatakan **efektif**. Adapun analisis efektifitas untuk masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :
  - Indikator kinerja pertama yaitu "Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap" yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 241.826.202.720 dan terealisasi sebesar Rp. 129.504.810.469,00 atau 53,55% sementara itu capaian kinerjanya sebesar 100%, jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sudah **efektif**.
  - Indikator kinerja kedua yaitu "Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas" dengan pagu anggaran Rp. 1.112.500.000,00 dan jumlah anggaran yang diserap sebesar Rp. 1.090.896.077,00

atau secara persentase sebesar 98,06% sementara itu capaian kerjanya sangat tinggi yaitu sebesar 165,00% sehingga dapat dikatakan **efektif** dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- c. Indikator kinerja ketiga yaitu "Rasio Jaringan Irigasi Teknis dalam Kondisi Baik" yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 21.957.584.077,00 dan terelisasi sebesar Rp. 18.462.602.200,00 sehingga apabila dipersentasekan realisasinya sebesar 84,08% sementara itu capaian kerjanya mencapai 104,62%, maka dapat dikatakan **efektif**.
- d. Indikator kinerja keempat yaitu "Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.508.007.000,00 dan terelisasi sebesar Rp. 7.605.106.100,00 atau 89,39% adapun capaian kerjanya sangat tinggi yaitu sebesar 101,54% sehingga dapat dikatakan **efektif**.
- e. Indikator kinerja kelima yaitu "Indeks Risiko Sanitasi" yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 7.601.925.077,00 dan terelisasi sebesar Rp. 7.532.332.067,00 atau 99,08% adapun capaian kerjanya mencapai 88,89% sehingga dapat dikatakan tidak **efektif**.

2. Selanjutnya sasaran strategis ketiga pada misi ketiga yaitu "Mewujudkan Pemenuhan Bangunan Pusat Pemerintahan" dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni "Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan yang Terpenuhi". Dari pagu anggaran sebesar Rp 18.000.000.000,00 terseraap sebesar Rp 17.338.522.465,00 atau 96,33%. Sedangkan capaian kinerja mencapai 72,73% sehingga dikatakan tidak efektif.

Misi keempat RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu "Memperkuat Ketahanan Nilai-nilai Kearifan Lokal" mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama.

**Tabel 3.120 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-4 RPJMD Tahun 2020**

Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal								
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	1. Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	70	60	85,71	758.398.800,00	757.503.800,00	99,88
	2. Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	85	88	97,65	11.644.566.810,00	10.658.875.000,00	91,54
2. Meningkatkan Kesatuan Bangsa	1. Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	10	1	192,00	14.490.211.192,00	14.056.117.712,00	97,00
3. Meningkatkan partisipasi	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	81,50%	82,10%	100,74	114.141.600,00	110.496.657,00	96,81
					119,02	27.007.318.402,00	25.582.993.169,00	94,73

Dilihat pada tabel diatas, pagu anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis pada misi keempat yaitu sebesar Rp. 27.007.318.402,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.582.993.169,00 atau 94,73% sementara rata-rata capaian kinerja indikator utama sasaran pada misi keempat sebesar 119,02% sehingga penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada misi keempat RPJMD dapat dikatakan efektif. Untuk melihat sejauh mana efektifitas pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama yaitu "Terwujudnya Masyarakat Berkepribadian dalam Kebudayaan dan Keagamaan" memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.402.965.610,00 dan terelisasi sebesar Rp. 11.416.378.800,00 apabila dipersentasekan mencapai 95,71% sementara rata-rata capaian kerjanya cukup tinggi mencapai 91,68%, sehingga efektifitas anggaran pada sasaran strategis pertama misi keempat dapat dikatakan kurang efektif. Selanjutnya diuraikan menurut masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator pertama yaitu "Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 758.398.800,00 dan terelisasi sebesar Rp. 757.503.800,00 atau 99,88%. Sementara itu capaian target kinerja untuk indikator tersebut cukup besar yakni 85,71% sehingga persentase capaian kinerja lebih kecil dari persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan kurang **efektif**.
- b. Indikator kedua yaitu "Persentase Skala Sikap Peserta Didik yang Berkepribadian Baik" memiliki pagu anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 11.644.566.810,00 sementara realisasinya sebesar Rp. 10.658.875.000,00 atau 91,54% sementara capaian kerjanya mencapai 97,65% sehingga dapat dikatakan **efektif**.

2. Sasaran strategis kedua "Meningkatnya Kesatuan Bangsa" hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan". Adapun anggarannya yaitu sebesar Rp. 14.490.211.192,00 dan terelisasi sebesar Rp. 14.056.117.712,00 atau 97,00% sementara capaian kerjanya cukup tinggi mencapai 192,00% sehingga persentase capaian kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran maka dapat dikatakan **efektif** dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja indikator sasaran.
3. Sasaran strategis ketiga "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik dan

Berorganisasi" hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu". Adapun pagu anggarannya sebesar Rp. 114.141.600,00 dan terelisasi Rp 110.496.657,00 atau 96,81% sementara itu capaian kinerja indikator sasarannya hanya sebesar 100,74% sehingga dikatakan efektif.

Selanjutnya misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu "Membangun Sumberdaya Manusia yang Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing" terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama.

**Tabel 3.121 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-5 RPJMD Tahun 2020**

Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing								
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,17	68,06	99,84	447.043.486.481,00	391.354.881.851,00	87,54
2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,57	0,55	107,55	7.191.311.000,00	6.478.343.030,00	90,09
3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	66,55	69,2	103,98	174.754.492,00	174.644.607,00	99,94
4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	4. Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,26	0,55	211,54	86.800.000,00	85.689.000,00	98,72
	5. Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,8	0,73	91,25	325.866.400,00	325.321.700,00	99,83
5. Menurunnya angka kemiskinan	6. Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,25	-1,88	-752,00	14.445.099.377,00	11.261.774.623,00	77,96
					-22,97	469.267.317.750,00	409.680.654.811,00	87,30

Dilihat pada tabel di atas, rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator pada misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran sangat tinggi yaitu mencapai 22,97% sementara realisasi anggarannya dari pagu sebesar Rp. 469.267.317.750,00 terelisasi sebesar Rp. 409.680.654.811 atau mencapai 87,30% sehingga secara rata-rata, penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan tidak **efektif**. Untuk melihat efektifitas masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis kesatu "Meningkatkan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat" mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pagu anggaran untuk sasaran strategis kesatu sebesar Rp. 447.043.486.481,00 sementara realisasinya mencapai Rp. 391.354.881.851 atau sebesar 87,54%. Adapun Capaian kinerja untuk indikator IPM sebesar 99,84% sehingga persentase capaian indikator kinerja lebih besar

daripada persentase realisasi anggaran, maka termasuk ke dalam kategori **efektif**.

2. Sasaran strategis kedua "Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk" dengan indikator kinerja "Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)" mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 7.191.311.000,00 dan terelisasi sebesar Rp. 6.478.343.030,00 atau secara persentase mencapai 90,09%. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator LPP sebesar 107,55% sehingga termasuk ke dalam kategori **efektif**.
3. Sasaran strategis ketiga "Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender" dengan indikator kinerja "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 174.754.492,00 dan terelisasi sebesar Rp. 174.644.607,00 apabila dipersentasekan mencapai 99,94%, sementara itu capaian kinerja untuk indikator IDG sebesar 103,98% sehingga termasuk ke dalam kategori **efektif**.
4. Sasaran strategis keempat yaitu "Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga" memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 412.666.400,00 dari jumlah itu terelisasi sebesar 99,28% atau Rp. 411.010.700,00. Sementara itu rata-rata capaian kerjanya cukup tinggi berada di angka 151,39% sehingga dapat diberi predikat efektif. Selanjutnya uraian untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :
  - a. Indikator yang pertama yaitu "Indeks Pembangunan Kepemudaan" memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 86.800.000,00 dengan realisasi mencapai 98,72% atau Rp. 85.689.000,00 sementara itu capaian kerjanya cukup tinggi mencapai angka 211,54% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
  - b. Indikator yang kedua yaitu "Indeks Pembangunan Keolahragaan" memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 325.866.400,00 dengan realisasi mencapai 99,83% atau Rp. 325.321.700,00 sementara itu capaian kerjanya mencapai 91,25% sehingga termasuk kedalam kategori kurang **efektif**.
5. Sasaran strategis kelima "Menurunnya Angka Kemiskinan" hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase Penurunan Angka Kemiskinan", adapun pagu anggarannya sebesar Rp. 14.445.099.377,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.261.774.623,00 atau 77,96%. Sementara itu capaian target indikator kinerja penurunan angka kemiskinan sangat

fantastis yakni sebesar -752,00% sehingga termasuk kedalam kategori tidak **efektif**.

Kemudian yang terakhir adalah misi keenam yaitu “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan” terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama.

**Tabel 3.122 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis pada Misi ke-6 RPJMD Tahun 2020**

Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan								
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	1. Indeks Gini	Indeks	0,34	0,345	101,47	549.868.000,00	542.094.050,00	98,59
2. Menurunnya tingkat pengangguran	2. Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,34	5,08	152,10	474.610.000,00	445.237.020,00	93,81
3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	3. Persentase pertumbuhan PDRB	persen	4,34	-0,05	-1,15	5.960.402.042,00	5.812.070.182,00	97,51
	4. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	97	96	98,97	252.892.000,00	251.542.000,00	99,47
	5. Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah	2	1	50,00	68.009.500,00	67.919.500,00	99,87
	6. Pola Pangan Harapan	Poin	94	94,5	100,53	96.658.100,00	96.217.300,00	99,54
	7. Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	5.500.000	2.842.022	51,67	16.481.784.971,00	11.824.912.172,00	71,75
8. Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	Jumlah	0	0	-	-	-	-	-
					79,08	23.884.224.613,00	19.039.992.224,00	94,36

Dilihat pada tabel di atas, pagu anggaran untuk pencapaian seluruh sasaran strategis pada misi keenam adalah sebesar Rp. 23.884.224.613,00 dengan realisasi anggaran mencapai 94,36% atau sebesar Rp. 19.039.992.224,00. Sementara itu rata-rata capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis pada misi keenam RPJMD Kabupaten Pangandaran sebesar 79,08% sehingga secara rata-rata, penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada misi keenam RPJMD Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan kurang **efektif**. Untuk melihat efektifitas masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis kesatu yaitu “Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah” hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Gini (Gini Ratio) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 549.868.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 542.094.050,00 atau mencapai 98,59%. Sementara itu, capaian kinerja untuk indikator Indeks Gini sebesar 101,47% sehingga capaian indikator kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran maka termasuk ke dalam kategori **efektif**.
2. Sasaran strategis kedua yaitu “Menurunnya Tingkat Pengangguran” mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 474.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 445.237.020,00 atau 93,81%. Sementara itu capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 152,10% sehingga persentase capaian indikator kinerja lebih besar daripada persentase realisasi anggaran maka termasuk ke dalam kategori **efektif**.

3. Sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan” memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama dengan pagu total sebesar Rp. 22.859.746.613,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.052.661.154,00 atau mencapai 93,63% sementara rata-rata capaian kerjanya sebesar 60,00% sehingga dapat dikatakan tidak efektif. Untuk penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja yang pertama “Persentase Pertumbuhan PDRB” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.960.402.042,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.812.070.182,00 atau 97,51% sementara itu capaian kerjanya sebesar -1,15% sehingga termasuk kedalam kategori **belum efektif**.
- b. Indikator kinerja yang kedua “Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 252.892.000,00 dengan realisasi anggaran mencapai 99,47% atau Rp. 251.542.000,00. Sementara itu capaian kerjanya sebesar 98,97% sehingga termasuk kedalam kategori tidak **efektif**.
- c. Indikator kinerja yang ketiga “Jumlah Koperasi yang Sehat” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 68.009.500,00 dengan realisasi anggaran mencapai 99,87% atau Rp. 67.919.500,00. Sementara itu capaian kerjanya sangat tinggi yakni sebesar 50,00% sehingga termasuk kedalam kategori tidak **efektif**.
- d. Indikator kinerja yang keempat “Pola Pangan Harapan” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 96.658.100,00 dengan realisasi mencapai 99,54% atau Rp. 96.217.300,00. Sementara itu capaian kerjanya mencapai 100,53% sehingga termasuk kedalam kategori **efektif**.
- e. Indikator kinerja yang kelima “Jumlah Kunjungan Wisatawan” memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 16.481.784.971,00 dengan realisasi mencapai 71,75% atau Rp. 11.824.912.172,00. Sementara itu capaian kerjanya sebesar 51,67% sehingga termasuk kedalam kategori **belum efektif**.

- f. Indikator kinerja yang keenam “Jumlah Destinasi Wisata yang Memperoleh Pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)”, indikator ini belum memiliki target capaian pada tahun 2018 sehingga belum dapat dihitung efektifitasnya.

Selain menganalisis efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran, juga dianalisis terkait dengan efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran. Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian kinerja yang maksimum dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang paling minimum. Pada tabel di bawah ini tergambar bahwa masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dapat dikatakan efisien apabila capaian indikator kerjanya  $\geq 100\%$ .

Tabel 3.129 di bawah ini menjelaskan bahwa secara rata-rata terdapat ketidakefisienan terhadap capaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020 sebesar 0,53%. Penjelasan atas efisiensi masing-masing indikator sasaran per misi adalah sebagai berikut :

1. Pada misi kesatu dari total 10 (sepuluh) indikator sasaran strategis, terdapat 5 (lima) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya dan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak efisien. Tingkat Kapabilitas APIP dengan tingkat efisiensi sebesar 43,17%; Tingkat Kematangan SPIP dengan tingkat efisiensi sebesar 53,17%; Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan dengan tingkat efisiensi sebesar 12,99%; Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100) dengan tingkat inefisiensi sebesar 40,89%; Cakupan zona integritas Daerah (0 s.d. 10) dengan tingkat inefisiensi sebesar 41,36%; dan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tingkat efisiensi sebesar 4,68%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kesatu sebesar 10,73%.
2. Pada misi kedua dari total 2 (dua) indikator sasaran strategis, terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya yaitu Ketaatan terhadap RTRW dengan tingkat efisiensi sebesar 18,70% dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 13,93%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kedua sebesar 16,32%.
3. Pada misi ketiga dari total 7 (tujuh) indikator sasaran strategis, terdapat 4 (empat) indikator sasaran strategis yang efisien dan 2 (dua) sasaran yang tidak efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya. Persentase jalan

dalam kondisi mantap dengan tingkat efisiensi sebesar 46,45%; Tingkat kecelakaan lalu lintas dengan tingkat efisiensi sebesar 66,94%; Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik dengan tingkat efisiensi sebesar 20,53%; Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum dengan tingkat efisiensi sebesar 12,15%; Indeks Risiko Sanitasi dengan tingkat inefisiensi sebesar 10,20%; Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi dengan tingkat inefisiensi sebesar 23,60%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi ketiga sebesar 18,71%.

4. Pada misi keempat dari total 4 (empat) indikator sasaran strategis, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang efisien dan 3 (tiga) sasaran yang tidak efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya. Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal dengan tingkat inefisiensi sebesar 14,17%; Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik dengan tingkat efisiensi sebesar 6,11%; serta Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan tingkat efisiensi sebesar 95,00%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi keempat sebesar 3,93%.
5. Pada misi kelima dari total 6 (enam) indikator sasaran strategis, terdapat 4 (empat) indikator sasaran strategis yang efisien dan 2 (dua) sasaran tidak efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat efisiensi sebesar 12,30%; Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan tingkat efisiensi sebesar 17,46%; Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dengan tingkat efisiensi 4,04 %; Indeks Pembangunan Kepemudaan dengan tingkat efisiensi sebesar 112,82%; Indeks Pembangunan Keolahragaan dengan tingkat inefisiensi 8,58% dan Persentase penurunan angka kemiskinan dengan tingkat inefisiensi sebesar 829,96%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi kelima sebesar -115,32%.
6. Pada misi keenam dari total 8 (delapan) indikator sasaran strategis, terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang efisien dan 4 (empat) indikator sasaran yang tidak efisien dalam pencapaian target indikator kerjanya yaitu Indeks Gini dengan tingkat efisiensi sebesar 2,88%; Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat efisiensi sebesar 58,28%; Persentase pertumbuhan PDRB dengan tingkat inefisiensi sebesar 98,66%; Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dengan tingkat inefisiensi sebesar 0,50%; Jumlah Koperasi yang Sehat dengan tingkat inefisiensi sebesar 49,87%; Pola Pangan Harapan dengan tingkat efisiensi sebesar 0,99%; dan Jumlah kunjungan wisata dengan tingkat inefisiensi sebesar 20,07%. Apabila dirata-ratakan tingkat efisiensi pada misi keenam sebesar -13,37%.

Tabel 3.123 Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	
			(Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$ )			
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani</b>						
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK terhadap LKPD	-	93,87	-
		2	Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)	133,33	90,17	43,17
		3	Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)	100,00	46,83	53,17
		4	Nilai AKIP	-	60,79	
		5	Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	110,57	97,58	12,99
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	1	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	59,11	100,00	- 40,89
		2	Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	142,22	98,84	43,38
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	94,41	
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1	Cakupan Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)	46,32	87,68	- 41,36
		2	Survey Kepuasan Masyarakat	100,00	95,32	4,68
<b>Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b>						
1	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	1	Ketaatan terhadap RTRW	116,67	97,97	18,70
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,15	90,22	13,93
<b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>						
1	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	100,00	53,55	46,45
		2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	165,00	98,06	66,94
		3	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	104,62	84,08	20,53
		4	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	101,54	89,39	12,15
		5	Indeks Resiko Sanitasi	88,89	99,08	- 10,20
2	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	1	Indeks Risiko Bencana	-	98,05	
3	Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	1	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	72,73	96,33	- 23,60
<b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>						
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	85,71	99,88	- 14,17
		2	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	97,65	91,54	6,11
2	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	1	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	192,00	97,00	95,00
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	100,74	96,81	3,93
<b>Misi 5 : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>						
1	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,84	87,54	12,30
2	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	107,55	90,09	17,46
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	103,98	99,94	4,04
4	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	1	Indeks Pembangunan Kepemudaan	211,54	98,72	112,82
		2	Indeks Pembangunan Keolahragaan	91,25	99,83	- 8,58
5	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penurunan angka kemiskinan	- 752,00	77,96	-829,96
<b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>						
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	1	Indek Gini	101,47	98,59	2,88
2	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	152,10	93,81	58,28
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	Persentase pertumbuhan PDRB	- 1,15	97,51	- 98,66
		2	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98,97	99,47	- 0,50
		3	Jumlah Koperasi yang sehat	50,00	99,87	- 49,87
		4	Pola Pangan Harapan	100,53	99,54	0,99
		5	Jumlah kunjungan wisata	51,67	71,75	- 20,07
		6	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	-	-	-
<b>RATA-RATA</b>			<b>76,16</b>	<b>76,68</b>	<b>- 0,53</b>	



# BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, meskipun terjadinya wabah Covid-19 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 37 (tiga puluh tujuh) Indikator Kinerja, diketahui bahwa **16 indikator sasaran** atau 50% bermakna **Baik Sekali**, **9 indikator sasaran** atau 28,14% bermakna **Baik**, **2 indikator sasaran** atau 3,14% bermakna **Cukup**, **5 indikator sasaran** atau 15,63% bermakna **kurang** dan **5 Indikator sasaran belum tersedia data**. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 76,17% atau dikategorikan **Baik**. Jadi, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 bermakna **Baik**.

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran berada pada angka 76,16% sementara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 76,68% sehingga terdapat ketidakefisienan sebesar 0,52%. Secara umum Kabupaten Pangandaran belum dapat dikatakan efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan terjadinya wabah Covid-19 dan adanya kebijakan penangguhan pembayaran beberapa kegiatan di tahun anggaran 2020 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2021 sesuai surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/3039/SJ dan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindakan lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-19 (Covid-19) tanggal 30 April 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1  
Analisis Efektifitas dan Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Strategis RPJMD  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja yang ≥100%)	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Efektifitas	
<b>Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani</b>							
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK terhadap LKPD	-	93,87	-	n.a
		2	Tingkat Kapabilitas APIP ( 1 s/d 5)	133,33	90,17	43,17	Efektif
		3	Tingkat Kematangan implementasi SPIP ( 1 s/d 5)	100,00	46,83	53,17	Efektif
		4	Nilai AKIP	-	60,79		
		5	Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	110,57	97,58	12,99	Efektif
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	1	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	59,11	100,00	- 40,89	Belum Efektif
		2	Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	142,22	98,84	43,38	Efektif
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	94,41		
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1	Cakupan Zona Integritas Daerah ( 0 s/d 10)	46,32	87,68	- 41,36	Belum Efektif
		2	Survey Kepuasan Masyarakat	100,00	95,32	4,68	Efektif
<b>Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan</b>							
1	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	1	Ketaatan terhadap RTRW	116,67	97,97	18,70	Efektif
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104,15	90,22	13,93	Efektif
<b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas</b>							
1	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	100,00	53,55	46,45	Efektif
		2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	165,00	98,06	66,94	Efektif
		3	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	104,62	84,08	20,53	Efektif
		4	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	101,54	89,39	12,15	Efektif
		5	Indeks Resiko Sanitasi	88,89	99,08	- 10,20	Belum Efektif
2	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	1	Indeks Risiko Bencana	-	98,05		
3	Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	1	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	72,73	96,33	- 23,60	Belum Efektif
<b>Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal</b>							
1	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	85,71	99,88	- 14,17	Belum Efektif
		2	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	97,65	91,54	6,11	Efektif
2	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	1	Angka Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	192,00	97,00	95,00	Efektif
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	100,74	96,81	3,93	Efektif
<b>Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing</b>							
1	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,84	87,54	12,30	Efektif
2	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	107,55	90,09	17,46	Efektif
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	103,98	99,94	4,04	Efektif
4	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	1	Indeks Pembangunan Kepemudaan	211,54	98,72	12,82	Efektif
		2	Indeks Pembangunan Keolahragaan	91,25	99,83	- 8,58	Belum Efektif
5	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penurunan angka kemiskinan	- 752,00	77,96	- 829,96	Belum Efektif
<b>Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan</b>							
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	1	Indek Gini	101,47	98,59	2,88	Efektif
2	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	152,10	93,81	58,28	Efektif
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1	Persentase pertumbuhan PDRB	- 1,15	97,51	- 98,66	Belum Efektif
		2	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98,97	99,47	- 0,50	Belum Efektif
		3	Jumlah Koperasi yang sehat	50,00	99,87	- 49,87	Belum Efektif
		4	Pola Pangan Harapan	100,53	99,54	0,99	Efektif
		5	Jumlah kunjungan wisata	51,67	71,75	- 20,07	Belum Efektif
		6	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	-	-	-	
<b>RATA-RATA</b>			<b>76,16</b>	<b>76,68</b>	<b>- 0,52</b>	<b>Belum Efektif</b>	

Sedangkan untuk analisis efektifitas dan efisiensi per misi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.2**  
**Analisis Efektifitas Per Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

No.	Misi	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Rata-rata Capaian Anggaran (%)	Keterangan
1.	Kesatu	98,79	1.859.483.160,00	30.146.943.128,00	89,35	Efektif
2.	Kedua	110,41	4.314.547.967,00	4.036.998.422,00	93,57	Efektif
3.	Ketiga	105,46	99.006.218.874,00	81.534.269.378,00	86,75	Efektif
4.	Keempat	119,02	27.007.318.402,00	25.582.993.169,00	94,73	Efektif
5.	Kelima	- 22,97	469.267.317.750,00	409.680.654.811,00	87,30	Belum Efektif
6.	Keenam	79,08	23.884.224.613,00	19.039.992.224,00	94,36	Belum Efektif
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>76,16</b>	<b>1.065.943.785.505,00</b>	<b>817.376.695.246,00</b>	<b>76,68</b>	<b>Belum Efektif</b>

Meskipun secara umum berada pada kategori Baik, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang belum mencapai target.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.



## LAMPIRAN: PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KABUPATEN PANGANDARAN

1. *Innovation Government Award* (IGA) Tahun 2020 Tingkat Nasional sebagai Kabupaten (Sangat Inovatif) dari Kementerian Dalam Negeri.



2. Peringkat Terbaik II dalam rangka Pembangunan Daerah Kategori Dokumen Perencanaan Kabupaten Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



3. Prestasi dan Penghargaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga:

No	Mata Lomba	Unit Kerja	Keterangan
1	Guru KOBER/TPA Inovasi dan Inspiratif pada Masa Pandemi	Kober Al-Musri Pangandaran (YUYUM KUSMAYATI, S.Pd)	Peserta terbaik Tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Flipped classroom and Blended Learning Gurulympic PGRI tahun 2020	SDN 1 Bojong Langkaplancar (DEDE ISKANDAR, S.Pd)	Peraih Medali Perak
3	Cyber Pedagogik and UNESCO Framework for teachers Gurulympic PGRI tahun 2020		Peraih Medali Perak
4	E-Learning Ecosystem and Learning managemenet System Gurulympic PGRI tahun 2020		Peraih Medali Perunggu
5	Netiqutte and Society 5.0 Gurulympic PGRI tahun 2020		Peraih medali Perunggu
6	Bidang bahasa dan Sastra Gurulympic PGRI tahun 2020	SMPN 5 Langkaplancar (IPAN JENAB BARUS, S.Pd)	Peraih medali Emas
7	Problem Based and Experiential Learning Gurulympic PGRI tahun 2020		Peraih medali Perunggu
8	Online Colaboratif and Cooperatif Learning Gurulympic PGRI tahun 2020		Peraih medali Perunggu
9	Film Pendidikan Pelita dalam Gelap	SMPN 1 PADAHERANG	Juara 2 tingkat nasional Festival Vidio Edukasi oleh TV Edukasi dan Kemendikbud
10	SPENSATV		Juara 2 nominasi terbaik tingkat nasional, Digital Movie Competition 2020 oleh Kominfo, KPI dan BAKTI
11	Seni Tari	SDN 1 KARANGBENDA	FLS2N Jenjang SD Tingkat Provinsi Juara 1
12	Gitar Duet	SMPN 1 PANGANDARAN	FLS2N Jenjang SMP Tingkat Provinsi Juara 1
			FLS2N Jenjang SMP Tingkat Nasional Juara Harapan 1

Sumber: Disdikporan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

4. Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

5. Kabupaten/Kota Sehat dengan predikat (Swastisaba Padapa) Tahun 2020
6. Juara II Kabupaten/Kota Jawa (Jagoan Warga Raharja) Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
7. Juara II Kabupaten/Kota Jawa (Jagoan Warga Raharja) Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
8. Bank Indonesia (BI) Award Tahun 2020 sebagai instansi *supporting data dan informasi* terkooperatif.





**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2021**